SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hak Cipta Kerja menjadi undang-undang (2023/41/6856)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009/112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah...../3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 163);

18. Peraturan Pemerintah...../4

18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6731);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah;
4. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;
5. Bupati adalah Bupati di Wilayah Provinsi Papua Tengah;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
8. Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan pengacu pada RPJP Nasional;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.
12. Rencana kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

14. Musyawarah...../6

14. Musyawarah perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

RKPD merupakan:
1. Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode Tahun 2027 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2027; dan
2. Penjabaran dari RPJM Daerah Provinsi dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Provinsi, prioritas pembangunan Daerah Provinsi, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi
   b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Belanja Daerah Tahun 2027; dan
   c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2027.

(2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
   a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
   b. mewujudkan integrasi, dan sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antardaerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
   c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan;
   d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
   e. Mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ISI DAN URAIAN

Pasal 4

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, kebijakan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan Daerah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi;
   c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Provinsi;
   d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2027;
   e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tengah;
   f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi Tahun 2027;
   g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
   h. BAB VIII Penutup
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 September 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 7 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah perlu dilakukannya penyusunan dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan aturan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 25 tahun 2004 Pasal 3, telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang disebut RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260, juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan, serta pagu indikatif anggaran di tahun berkenaan. RKPD juga disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan terarah.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga, disebutkan bahwa dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah. Namun dalam masa peralihan sampai dengan terpilihnya kepala daerah tersebut, pemerintah DOB perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pengganti dokumen RPJMD dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.

Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Melalui RKPD, setiap Perangkat dapat Menyusun rencana kerja yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan Pembangunan daerah guna mendukung pencapaian target Pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Penting untuk mengawal konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD. Konsistensi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara

pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Tengah merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif, yang bersumber dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan dimaksud adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistis *(top-down planning)* dan desentralistis *(bottom-up planning).*

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2026 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi tahapan sebagai berikut.

1. Persiapan Penyusunan RKPD, Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun;
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri dari perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD
   a. Perumusan rancangan awal RKPD, Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:
      1) Pengolahan data dan informasi;
      2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
      3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
      4) Penelaahan terhadap kebijakan nasional;
      5) Perumusan permasalahan pembangunan;
      6) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
      7) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
      8) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
   b. Penyajian rancangan awal RKPD, Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
      1) Pendahuluan;
      2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
      3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
      4) Prioritas dan sasaran pembangunan;
      5) Rencana program prioritas daerah.
3. Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Papua.
4. Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
5. Penetapan RKPD, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, agar terjadi keselarasan antara perencanaan nasional dan daerah.

1.2 Dasar Hukum

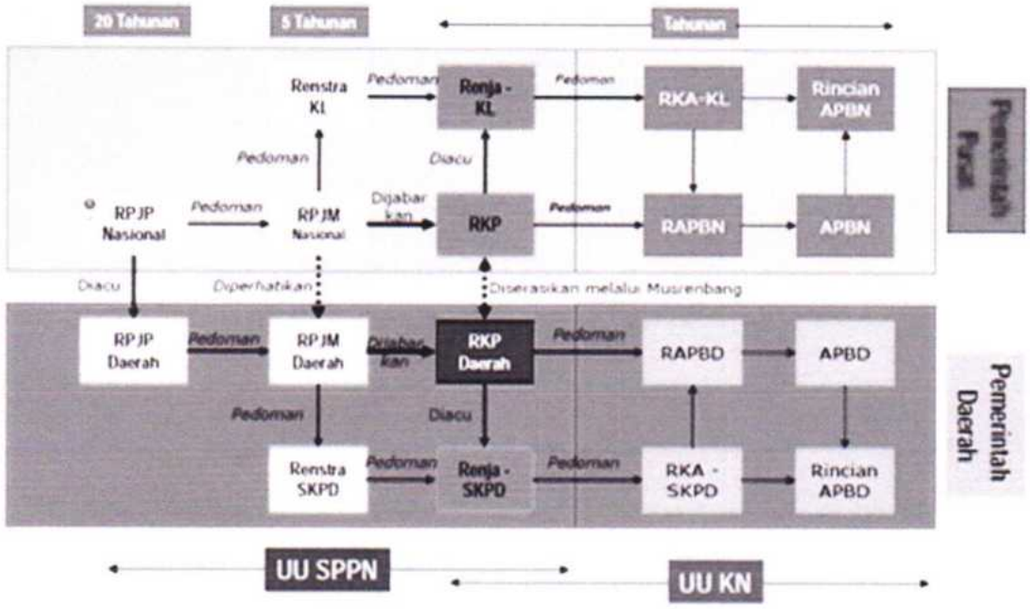
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 adalah: (diurutkan sesuai tahun)

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027;
34. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
39. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1. 1 Kerangka Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



1.4 Maksud dan Tujuan

Secara substantif, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 yang disinergikan dengan arah kebijakan Nasional dan RKPD Tahun 2027.

Adapun Tujuan penyusunan RKPD adalah:

1) Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027;
2) Menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2027;
3) Menjadi acuan penyusunan RKPD tahun 2026 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah;
4) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN
Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan otonomi Khusus.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, termasuk pendapatan dan belanja dana otonomi khusus.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan otonomi khusus.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2027 dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Pada bab ini juga mengemukakan tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten-kabupaten di provinsi Papua Tengah 2027.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.

BAB VIII PENUTUP
Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2027 yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana dan kondisi kependudukan.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

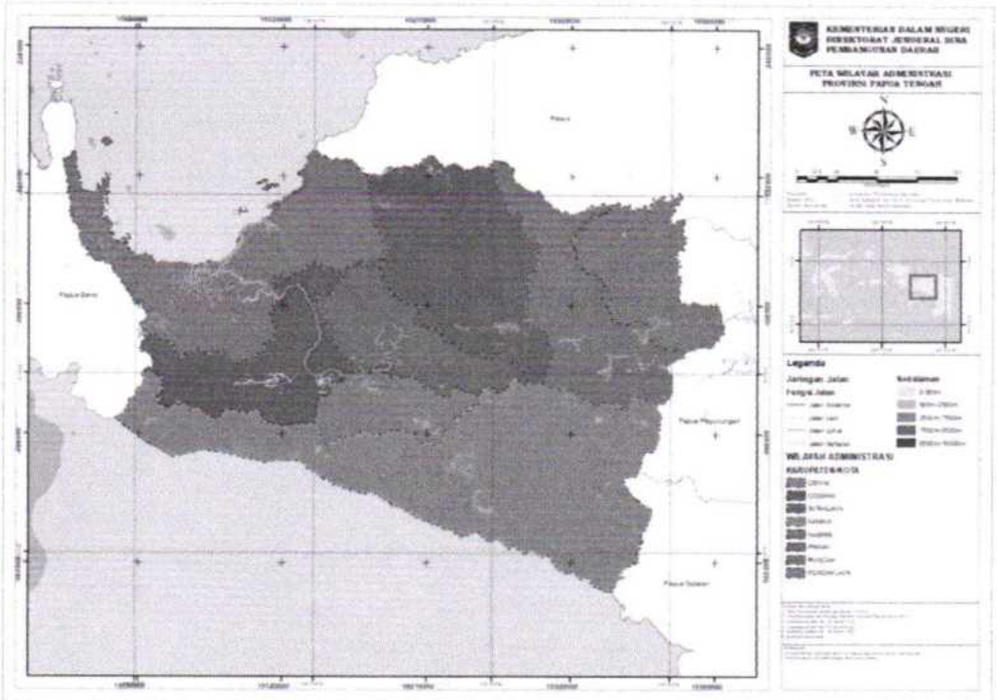
Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di bagian barat, Provinsi Papua Pegunungan di bagian timur, Provinsi Papua di bagian utara dan Provinsi Papua Selatan di bagian selatan. Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 Kabupaten dan memiliki ibukota yang berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten Mimika merupakan wilayah administrasi kabupaten terluas yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 21.693,51 km^2, sedangkan Kabupaten Deiyai merupakan wilayah administrasi kabupaten terkecil yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 537,39 km^2. Untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah dan batas administrasi Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2025

No	Kabupaten	Luas Wilayah	Persentase	Urutan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Mimika	18.309,72	30,0%	1 (Terluas)
2	Nabire	11.801,99	19,3%	2
3	Puncak Jaya	9.693,45	15,9%	3
4	Puncak	7.826,68	12,8%	4
5	Intan Jaya	5.334,45	8,7%	5
6	Paniai	4.869,18	8,0%	6
7	Dogiyai	3.792,93	6,2%	7
8	Deiyai	2.846,41	4,7%	8 (Terkecil)
TOTAL PROVINSI		61.079,59	100,0%	-

Sumber : Badan Informasi Geospasial & BPS (Satuan KM^2)

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

B. Topografi

Provinsi Papua Tengah berada di 2 wilayah topografi, yaitu pesisir (dataran rendah) dan pegunungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataran rendah dengan luas mencapai 23.957,80 km2 pada ketinggian <203 mdpl dan memiliki wilayah pegunungan dengan luas mencapai 2.078,18 km2 pada ketinggian 3499-5039 mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Provinsi
1	*2*	*3*	*4*
1	Nabire	7,00	587
2	Paniai	1.770,95	503
3	Puncak Jaya	2.119,67	330
4	Mimika	62,00	480
5	Puncak	2.303,59	377
6	Dogiyai	1.556,13	546
7	Intan Jaya	2.101,45	430
8	Deiyai	1.738,66	524

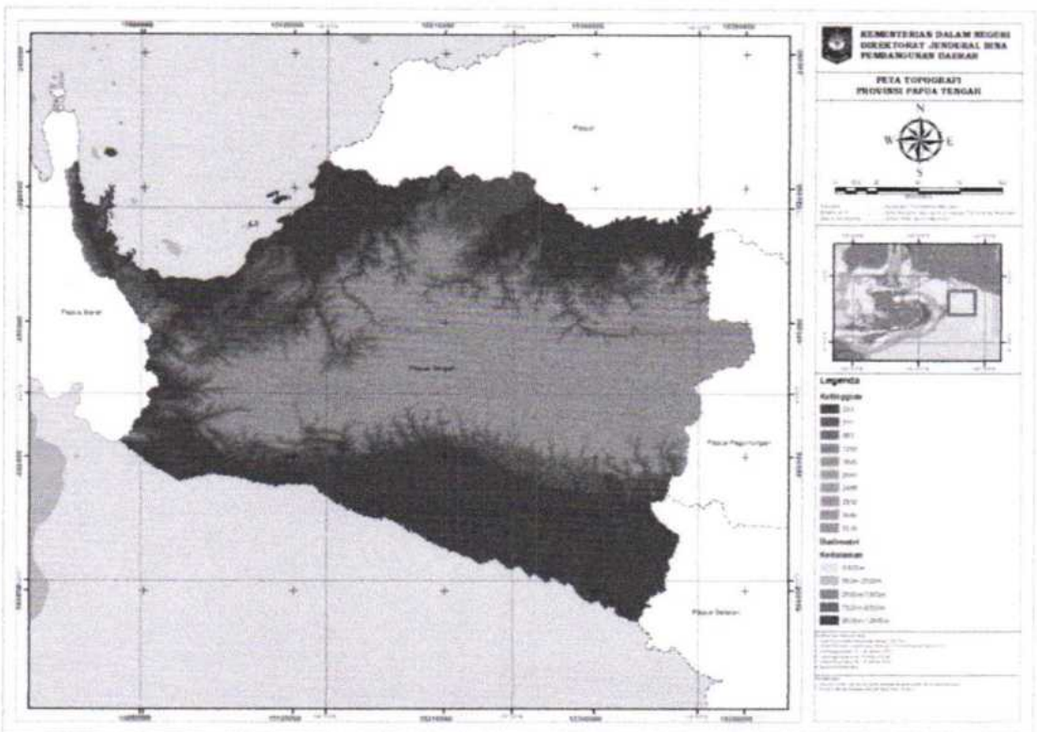
Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2025.

No.	Kabupaten	0 - 500 m Dataran Rendah	500 - 1.500 m Perbukitan	1.500 - 2.500 m Dataran Tinggi	>2.500 m Pegunungan Tinggi	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Mimika	12.740,00	3.110,00	1.690,00	769,72	18.309,72
2	Nabire	7.290,00	3.470,00	940,00	101,99	11.801,99

3	Puncak Jaya	240,00	890,00	3.210,00	5.353,45	9.693,45
4	Puncak	-	310,00	2.240,00	5.276,68	7.826,68
5	Intan Jaya	-	520,00	3.490,00	1.324,45	5.334,45
6	Paniai	-	450,00	3.380,00	1.039,18	4.869,18
7	Dogiyai	-	210,00	2.670,00	912,93	3.792,93
8	Deiyai	-	95,00	1.980,00	771,41	2.846,41
TOTAL PROVINSI		20.270,00	9.055,00	19.600,00	15.549,59	61.079,59

Sumber Badan Informasi Geospasial & BPS 2025

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

C. Hidrologi

Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi 18 Daerah Pengaliran Sungai. Luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terluas adalah Daerah Pengaliran Sungai Mamberamo dengan cakupan seluas 16.669,87 km^2 sedangkan luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terkecil adalah Daerah Pengaliran Sungai Wondiwoi dengan cakupan seluas 5,31 km^2. Untuk lebih jelasnya mengenai luas cakupan Daerah Pengaliran Sungai dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

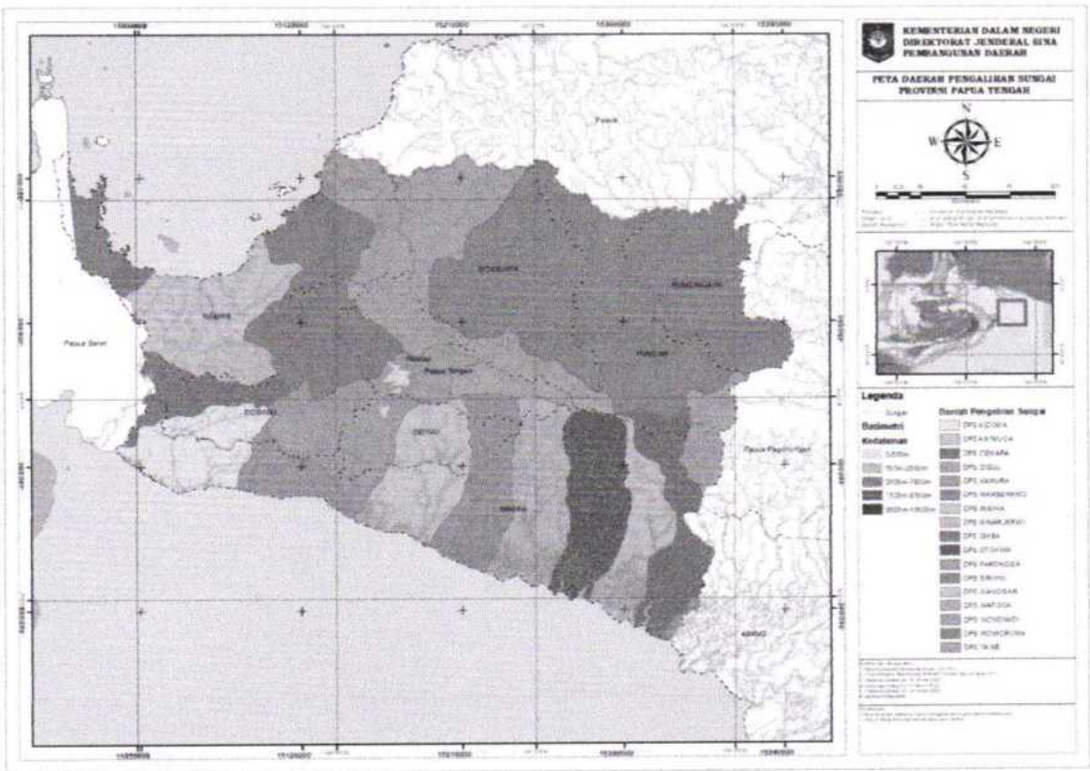
Tabel 2.3
Cakupan Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah

No.	Daerah Pengaliran Sungai	Luas (Km2)
1	*2*	*3*
1	N/a	71,37
2	DPS Aidoma	2.683,56
3	DPS Aikimuga	2.236,40
4	DPS Cemara	2.721,26
5	DPS Digul	1.418,32
6	DPS Kamura	2.757,32
7	DPS Mamberamo	16.669,87

No.	Daerah Pengaliran Sungai	Luas (Km2)
1	*2*	*3*
8	DPS Mimika	3.244,32
9	DPS Minarjerwi	3.191,55
10	DPS Omba	1.937,21
11	DPS Otokwa	3.186,00
12	DPS Parongga	1.327,64
13	DPS Siriwo	5.450,20
14	DPS Wanggar	4.270,73
15	DPS Wapoga	8.426,70
16	DPS Wondiwoi	5,31
17	DPS Woworoma	889,09
18	DPS Yawei	4.627,67

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Gambar 2.3
Peta Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

D. Rawan Bencana

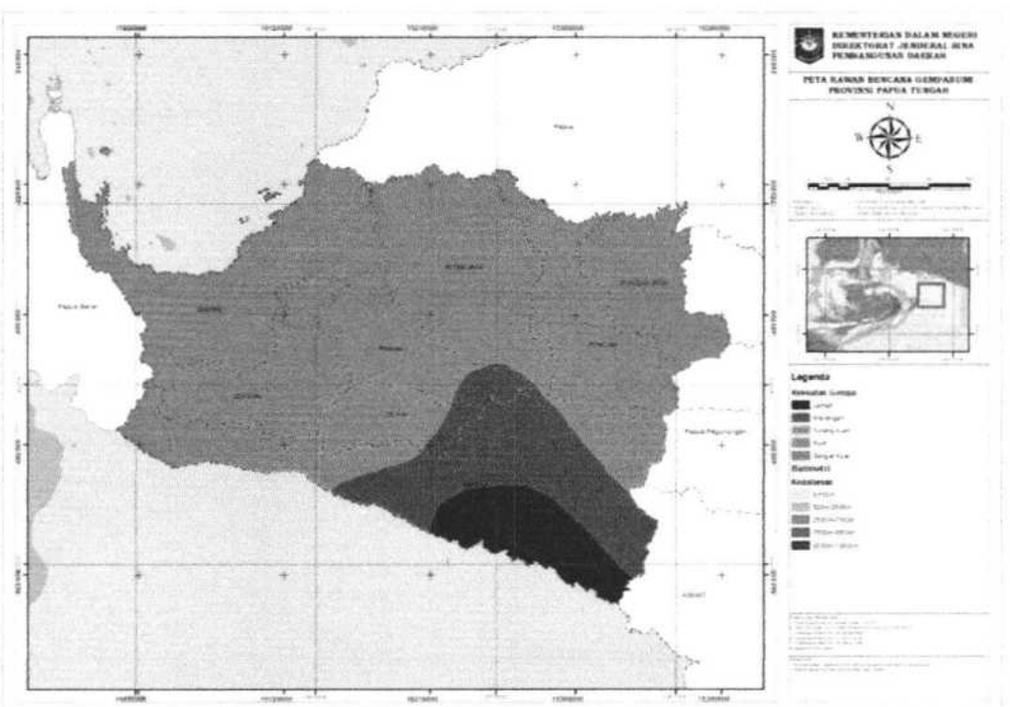
Provinsi Papua Tengah memiliki potensi rawan bencana pada beberapa kabupaten-kabupaten yang terletak pada Provinsi Papua Tengah salah satunya Ibu Kota Provinsi di Nabire pada Tahun 2004 dan 2006 terjadi gempa bumi dengan kekuatan rata-rata sebesar 6,4 – 6,7 skala richter. Adapun status rawan bencana per kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Daerah dengan Status Rawan Bencana terutama Gempa Bumi di Provinsi Papua Tengah Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Status Rawan Bencana
1	*2*	*3*
1	Nabire	Sangat Kuat dan Kuat
2	Paniai	Sangat Kuat, Kuat, Kurang Kuat dan Menengah
3	Puncak Jaya	Sangat Kuat dan Kuat
4	Mimika	Menengah dan Lemah
5	Puncak	Sangat Kuat, Kuat dan Kurang Kuat
6	Dogiyai	Sangat Kuat, Kuat dan Kurang Kuat
7	Intan Jaya	Sangat Kuat, Kuat dan Kurang Kuat
8	Deiyai	Kurang Kuat dan Menengah

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Gambar 2.4
Peta Potensi Kekuatan Gempabumi di Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.2.1. Potensi Hutan

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah berdasarkan dari Peta Rupa Bumi Indonesia mencapai 11.667,75 km2. Sementara luas lahan Hutan Provinsi Papua Tengah mencapai 5.828.043 Kawasan hutan yang terbesar di Provinsi Papua Tengah ini berupa Hutan Lindung yang luasnya mencapai 2.293.552 km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (ha), 2022

No.	Kab/Kota	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan					
		Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Nabire	15.848.672	6.890.351	90.772.441	35.476.446	N/A	31.425.993
2	Paniai	-	4.573.208	28.182.703	23.540.809	N/A	68.686
3	Puncak Jaya	-	9.311.408	52.253.757	30.011.048	N/A	4.502.407
4	Mimika	4.936.500	23.946.464	88.781.585	21.902.916	N/A	37.995.705
5	Puncak	887.365	22,124.76	887.365,00	279.549.88	N/A	131,953.17
6	Dogiyai	89.408	635.911	33.423.889	29.433.205	N/A	3.265.365
7	Intan Jaya	479.941	2.681.830	49.550.241	41.886.063	N/A	4.502.407
8	Deiyai	918.091	2.375.207	25.248.469	21.390.810	N/A	564.361
Papua Tengah		23.159.977	50.414.379	369.100.450	203.641.297	-	82.324.924

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

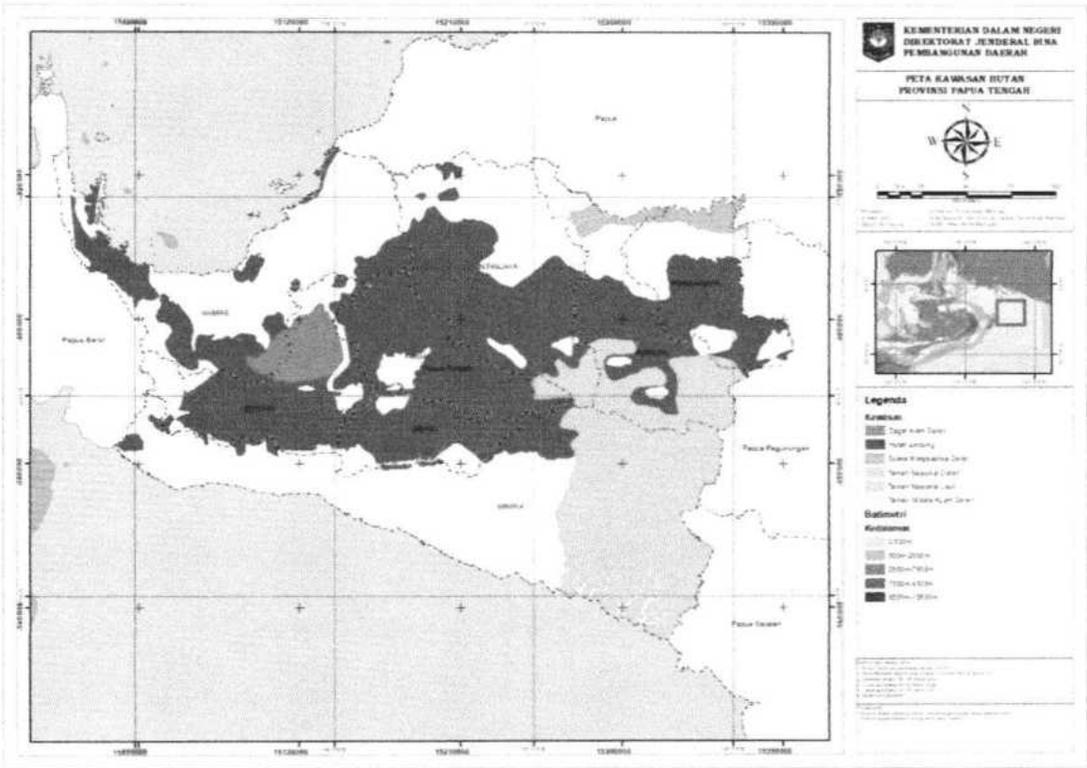
Jumlah Luas Hutan dan Perairan terluas di Provinsi Papua Tengah terluas berada di Kabupaten Mimika mencapai 1.715.577, sementara luas hutan dan perairan yang terkecil terdapat di kabupaten Deiyai.

Tabel 2.6
Luas Kawasan Peruntukan Hutan Provinsi Papua Tengah

No.	Keterangan	Luas (Km2)
1	*2*	*3*
1	Cagar Alam Darat	1.418,85
2	Hutan Lindung	24.888,42
3	Suaka Margasatwa Darat	931,16
4	Taman Nasional Darat	11.336,87
5	Taman Nasional Laut	18,11
6	Taman Wisata Alam Darat	62,78

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Gambar 2.5
Peta Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

B. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat yang berada di Provinsi Papua Tengah terdiri dari perkebunan dan pertanian. Kawasan perkebunan dan pertanian merupakan kawasan yang dikelola oleh masyarakat sehingga termasuk ke dalam kawasan hutan rakyat. Untuk lebih jelas mengenai kawasan hutan rakyat dapat melihat rincian luasan tutupan lahan pada tabel dan gambar berikut.

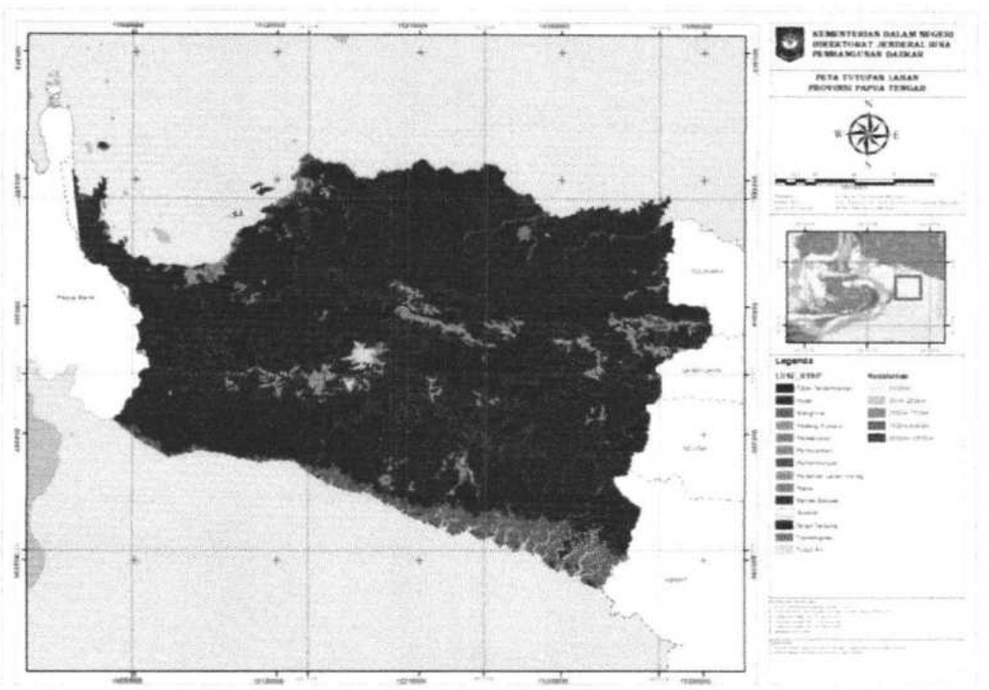
Tabel 2.7
Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tengah

No.	Penggunaan Lahan	Luas (km2)
1	*2*	*3*
1	Tidak Terdefinisikan	6.024,71
2	Hutan	38.656,20
3	Mangrove	2.998,34
4	Padang Rumput	184,29
5	Perkebunan	11,57
6	Permukiman	205,99

7	Pertambangan	14,23
8	Pertanian Lahan Kering	1.811,54
9	Rawa	222,39
10	Semak Belukar	1.556,80
11	Tambak	0,83
12	Tanah Terbuka	2.204,30
13	Transmigrasi	108,00
14	Tubuh Air	971,32

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Gambar 2.6
Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

2.1.1.2.2. Potensi Perikanan

A. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua Tengah memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua Tengah terbagi dua, yaitu perairan utara Papua Tengah tergabung dalam yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 Km) dan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km^2) sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua Tengah masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 Km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 Km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki potensi sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi

Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumber daya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua Tengah. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Tengah Utara dengan pusat kegiatan di Nabire;
- Laut Papua Selatan dengan pusat kegiatan di Mimika.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Perikanan tangkap yang digunakan oleh masyarakat relatif masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

Tabel 2.8
Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Tahun 2022-2025(Jiwa/Orang)

No.	Kabupaten	2022	2023	2024	2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mimika	2.140	2.310	2.480	2.560	Pesisir, terbanyak (laut & sungai)
2	Nabire	1.680	1.790	1.910	1.980	Pesisir kedua terbesar
3	Paniai	320	345	370	390	Danau Paniai (perikanan darat)
4	Deiyai	110	118	126	132	Perairan darat kecil
5	Intan Jaya	95	102	109	114	Sungai pegunungan
6	Dogiyai	82	88	94	98	Sungai & danau kecil
7	Puncak Jaya	68	73	78	81	Sangat terbatas
8	Puncak	54	58	62	65	Akses sulit, sedikit perairan
TOTAL PROVINSI		4.549	4.884	5.229	5.420	Terus bertambah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan PPT & Portal Data KKP (2022-2025)

B. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua Tengah memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada produksi budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut :

- Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih di Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Timika.
- Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika.
- Perikanan budidaya air tawar (kolam) yang berada pada 8 (delapan Kabupaten) yaitu Kab Nabire, Kabupaten Timika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Tengah tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan nila.

Tabel 2.9
Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya Tahun 2022-2025

No.	Kabupaten	2022	2023	2024	2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Paniai	145	162	178	191	Terbanyak, Danau Paniai & rawa luas
2	Nabire	98	107	116	124	Pesisir + budidaya air tawar

3	Mimika	86	94	102	109	Kolam, tambak, keramba
4	Deiyai	72	81	89	96	Danau & sungai tenang
5	Intan Jaya	51	57	63	68	Budidaya di sungai/kolam pegunungan
6	Dogiyai	44	49	54	58	Danau kecil & kolam Kampung
7	Puncak Jaya	29	32	35	38	Terbatas, suhu dingin
8	Puncak	21	23	25	27	Sangat terbatas, ketinggian ekstrem
TOTAL PROVINSI		546	605	662	711	Terus bertambah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan PPT & Portal Data KKP (2022-2025)

2.1.1.2.3. Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah sebagian besar pertambangan emas, granit dan tembaga. Pertambangan emas masih mendominasi potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelas mengenai lokasi potensi pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kabupaten/Kota	Lokasi	Jenis Galian Mineral
1	*2*	*3*
Nabire	Yaur	Pasir Kuarsa, Granit, Marmer
	Lagari	Emas
	S.Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng, Kaolin
	KaliBumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Napan	Emas, Tembaga
	Wapoga	Emas
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, Tembaga
	Ilaga	Arsenit, Tembaga, Emas, Perak
Paniai	Enarotali	Pasir Kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet
	Uwagimamo	Emas, Tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, Emas
	Komopa	Tembaga, Emas
Mimika	Tembagapura	Tembaga, Perak, Emas
Intan Jaya	Sugapa (Bulagi)	Emas

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Papua, 2016

2.1.1.2.4. Potensi Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah ialah: Taman Nasional Lorentz di Mimika, Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Nabire, Danau Idenberg di Puncak Jaya, Danau Tigi di Deiyai dan Danau Paniai serta Danau Tage di Paniai, Danau Mamae dan Air Terjun Bihewa di Nabire, serta Wisata Gunung Cartens pada Kabupaten Intan Jaya. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Tengah dikelompokkan menjadi 7

kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata pulau, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan obyek wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua Tengah yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika) dan KP Paradoi (Kabupaten Nabire). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM andal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Tabel 2.11
Jumlah Objek Wisata per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Nabire	87	97	99
2	Puncak Jaya	7	8	12
3	Paniai	6	6	6
4	Mimika	15	17	17
5	Puncak	4	4	4
6	Dogiyai	6	6	6
7	Intan Jaya	7	7	7
8	Deiyai	11	11	11
Papua Tengah		143	156	162

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,2026.

Gambar 2.7
Potensi Objek Wisata Pada Provinsi Papua Tengah



Taman Nasional Lorentz



Taman Nasional Teluk Cendrawasih

Sumber: Google.co.id

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2025, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.352.160 jiwa di Tahun 2025.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Mimika sebanyak 320.840 jiwa pada tahun 2025. Sementara jumlah penduduk terendah pada tahun 2025 berada di Kabupaten Deiyai sebanyak 87.400 jiwa.

Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan 2025

No.	Kabupaten	2024	2025	Pertumbuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Mimika	317.450	320.840	3.390	Terbanyak, pusat ekonomi & tambang
2	Puncak Jaya	218.420	220.710	2.290	Padat penduduk pegunungan
3	Nabire	178.340	180.190	1.850	Ibukota provinsi, pesisir
4	Puncak	176.720	178.580	1.860	Wilayah pegunungan tinggi
5	Intan Jaya	136.780	138.110	1.330	Pertanian & perkebunan
6	Dogiyai	116.330	117.130	800	Dataran tinggi padat
7	Paniai	108.450	109.200	750	Sekitar Danau Paniai
8	Deiyai	86.620	87.400	780	Terkecil jumlah penduduk
TOTAL PROVINSI		1.339.110	1.352.160	13.050	Naik rata-rata 0,9 – 1,2% per tahun

Sumber : Dirjen Kependudukan & Pencatatan Sipil, KEMENDAGRI (data registrasi penduduk akhir tahun 2024 & Semester 1 Tahun 2025); BPS (Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2024-2025).

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2010-2022 sebesar 4,3 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2024-2025 sebesar 0,47 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua Tengah periode ini lebih kecil jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk No. yang sebesar 1,25 persen berdasarkan Data BPS tahun 2024.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan 2025

No.	Kabupaten	2024 (Jiwa)	2025 (Jiwa)	Pertumbuhan Absolut	Laju Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Mimika	319.247	320.839	1.592	0,50 %
2	Nabire	179.142	180.190	1.048	0,58 %
3	Paniai	126.048	126.876	828	0,66 %
4	Deiyai	92.561	93.168	607	0,66 %
5	Intan Jaya	137.339	138.109	770	0,56 %
6	Dogiyai	116.333	117.129	796	0,68 %
7	Puncak Jaya	219.426	220.704	1.278	0,58 %
8	Puncak	177.416	178.580	1.164	0,66 %
TOTAL PROVINSI		1.369.112	1.375.595	6.483	0,47 %

Sumber : BPS(Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2024/2025), Dirjendukcapil (Data SIAK Terintegrasi).

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2025 mencapai 22,52 jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Deiyai dengan kepadatan penduduk mencapai 173,37 jiwa/km^2 dan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya dengan kepadatan penduduk mencapai 13,79 jiwa/km^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2025

No.	Kabupaten	Luas (km^2)	2024	2025	Perubahan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Mimika	21.693,51	14,72	14,79	+0,07	Wilayah paling luas, kepadatan paling rendah
2	Nabire	13.071,15	13,70	13,79	+0,09	Padat di ibu kota, jarang di pegunungan
3	Paniai	1.533,04	82,22	82,76	+0,54	Sangat padat; lembah datar, penduduk berkumpul
4	Deiyai	537,39	172,24	173,37	+1,13	Paling padat; wilayah sangat sempit, penduduk banyak
5	Intan Jaya	5.574,70	24,64	24,77	+0,13	Menengah, tersebar di lembah
6	Dogiyai	4.197,01	27,72	27,91	+0,19	Padat di pusat Distrik
7	Puncak Jaya	7.936,02	27,65	27,81	+0,16	Luas, tapi banyak penduduk di lembah utama
8	Puncak	6.435,20	27,57	27,75	+0,18	Tersebar, tidak terlalu padat
RATA-RATA PROVINSI		61.078,02	22,42	22,52	+0,10	Masih tergolong jarang penduduk

Sumber : BPS / BIG

Tabel 2.15
Jumlah Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2025

No.	Kabupaten	2024	% OAP 2024	2025	% OAP 2025	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Mimika	82.450	25,83%	84.120	26,22%	Terendah; banyak pendatang dari luar Papua
2	Nabire	71.680	40,01%	73.240	40,64%	Campuran; OAP dominan di wilayah pedalaman
3	Paniai	118.760	94,22%	119.850	94,46%	Hampir seluruhnya Orang Asli
4	Deiyai	89.340	96,52%	90.110	96,72%	Tertinggi; hampir 100% penduduk asli
5	Intan Jaya	131.270	95,58%	132.090	95,64%	Seluruhnya penduduk asli suku setempat
6	Dogiyai	109.420	94,06%	110.380	94,24%	Sangat dominan penduduk asli

7	Puncak Jaya	207.890	94,74%	209.430	94,89%	Hampir tidak ada penduduk pendatang
8	Puncak	168.530	94,99%	169.720	95,04%	Sangat dominan suku asli
TOTAL PROVINSI		879.340	64,23%	888.940	64,63%	

Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil & SIAK PLUS

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua Tengah dalam periode 4 (empat) tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2022-2025

No.	Kabupaten	2022	2023	2024	2025	Tren
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Mimika	116.380	124.910	134.700	131.070	Naik terus - turun sedikit 2025
2	Nabire	5.030	5.490	5.970	6.420	Naik stabil setiap tahun
3	Paniai	2.250	2.480	2.720	2.960	Naik perlahan
4	Deiyai	1.140	1.260	1.380	1.510	Pertumbuhan mantap
5	Intan Jaya	1.360	1.490	1.630	1.780	Terus meningkat
6	Dogiyai	1.620	1.780	1.950	2.120	Naik stabil
7	Puncak Jaya	2.640	2.900	3.180	3.460	Cukup cepat naiknya
8	Puncak	1.890	2.080	2.280	2.490	Pertumbuhan merata
TOTAL PROVINSI		132.310	142.390	153.810	149.810	Naik - turun 2025

Sumber: BPS Provinsi Papua, PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha 2022-2025.

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua Tengah melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Angka PDRB Provinsi Papua Tengah pada tahun 2022 sebesar 132.310 Miliar Rupiah dan pada tahun 2025 sebesar 149.810 Miliar Rupiah.

Tabel 2.17
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2022-2025

No.	Kabupaten	2022	2023	2024	2025	Tren
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Mimika	78.640	82,970	87.430	67.980	Naik - turun tajam
2	Nabire	3.420	3,650	3.890	4.130	Tumbuh stabil

3	Paniai	1.540	1.670	1.800	1.930	Terus naik
4	Deiyai	780	850	920	990	Tumbuh mantap
5	Intan Jaya	930	1.010	1.090	1.170	Naik perlahan
6	Dogiyai	1.100	1.190	1.280	1.370	Pertumbuhan merata
7	Puncak Jaya	1.790	1.940	2.090	2.240	Cukup cepat
8	Puncak	1.280	1.390	1.500	1.610	Naik konsisten
TOTAL PROVINSI		89.480	94.670	100.000	81.420	Naik - turun besar

Sumber: BPS Provinsi Papua, PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha 2022-2025.

Sementara itu, angka PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), selama kurun empat tahun terakhir adalah masing-masing 89,480 Miliar Rupiah (2022), 94.670 Miliar Rupiah (2023), 100.000 Miliar Rupiah (2024), dan 81,420 Miliar Rupiah (2025).

2.1.3.2. Indeks Gini

Indeks Gini Rasio pada umumnya digunakan untuk mengukur kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk pada suatu wilayah tertentu. Berikut ini terlihat data rasio gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah dalam 4 (empat) tahun terakhir yang terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.18
Rasio Gini Menurut Kabupaten 2022-2025

No.	Kabupaten	2022	2023	2024	2025	Tren
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Mimika	0,398	0,390	0,382	0,374	Turun terus
2	Nabire	0,354	0,347	0,341	0,335	Turun perlahan
3	Paniai	0,289	0,282	0,276	0,271	Makin merata
4	Deiyai	0,273	0,267	0,262	0,258	Sangat merata
5	Intan Jaya	0,264	0,259	0,254	0,250	Paling merata
6	Dogiyai	0,279	0,273	0,268	0,263	Merata, membaik
7	Puncak Jaya	0,291	0,285	0,279	0,274	Sedikit timpang, makin baik
8	Puncak	0,268	0,263	0,259	0,255	Sangat merata
RATA-RATA PROVINSI		0,312	0,305	0,298	0,292	Menurun terus

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi 2022 - 2025

Dari data di atas terlihat bahwa secara umum, nilai Gini Rasio Provinsi Papua Tengah selama periode 2022 s/d 2025 terus mengalami penurunan, data terakhir di 2025 menunjukkan Indeks Gini Rasio Provinsi Papua Tengah sebesar 0,292.

2.1.3.3. Tingkat Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua Tengah mencapai 28,13% dari jumlah penduduk pada tahun 2025. Kabupaten Intan Jaya merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 36,94 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2025, sedangkan Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 13,08% dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah(Jiwa/%) Tahun 2024 dan 2025

No.	Kabupaten	2024	% Miskin 2024	2025	% Miskin 2025	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Mimika	42.820	13,41%	41.970	13,08%	Terendah; ekonomi kuat, banyak lapangan kerja
2	Nabire	34.710	19,38%	34.100	18,92%	Menengah; lebih baik dari wilayah pegunungan
3	Paniai	44.240	35,10%	43.720	34,46%	Tinggi; akses terbatas, ekonomi pertanian saja
4	Deiyai	34.070	36,81%	33.650	36,12%	Sangat tinggi; wilayah sempit, sulit akses
5	Intan Jaya	51.460	37,47%	51.020	36,94%	Sangat tinggi; infrastruktur masih terbatas
6	Dogiyai	41.290	35,49%	40.760	34,80%	Tinggi; bertahap menurun
7	Puncak Jaya	79.060	36,03%	78.300	35,47%	Jumlah terbanyak; populasi besar + persentase tinggi
8	Puncak	64.120	36,13%	63.430	35,52%	Sangat tinggi; daerah pegunungan terpencil
TOTAL PROVINSI		391.770	28,61%	386.950	28,13%	Turun sedikit, masih tergolong tinggi

Sumber : BPS (Profil Kemiskinan di Indonesia) 2024-2025

2.1.3.4. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, juga PDB perkapita, yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selama tahun 2018-2022, IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Tengah sepanjang tahun 2018 $^{s}/_{d}$ 2022 sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Untuk Kabupaten Mimika, mencapai peringkat pertama di Provinsi Papua Tengah, yang telah mencapai 74,48 poin, kemudian diikuti dengan Kabupaten Nabire pada urutan ke-2, dengan 69,15 poin, dan Kabupaten Paniai di urutan ke-3, dengan 56,70 poin. Adapun pada tahun 2022, daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Puncak, dengan 43,17 poin. Untuk lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah Tahun 2021-2025

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8
E	Nabire	N/A	N/A	71,36	52,47	72,89
2	Paniai	N/A	N/A	58,83	76,85	62,41
3	Puncak Jaya	N/A	N/A	51,49	45,7	48,30
4	Mimika	N/A	N/A	75,91	57,72	77,27
5	Puncak	N/A	N/A	44,71	50,92	45,95
6	Dogiyai	N/A	N/A	56,74	52,29	53,72
7	Intan Jaya	N/A	N/A	50,39	52,47	52,16
8	Deiyai	N/A	N/A	51,4	76,85	53,72
Papua Tengah		-	-	57,60	60,25	60,64

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2025.

2.1.3.5. Rata-rata lama sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2.21
Rata- Rata Lama Sekolah (Penduduk Usia 25 Tahun ke atas) di Provinsi Papua Tengah Tahun 2021-2025

No.	Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	7,30	7,46	7,62	7,75	7,84
2	Puncak Jaya	2,88	3,00	3,12	3,21	3,27
3	Paniai	5,18	5,34	5,50	5,63	5,71
4	Mimika	8,47	8,61	8,75	8,88	8,97
5	Puncak	2,29	2,40	2,51	2,59	2,64
6	Dogiyai	3,38	3,51	3,64	3,74	3,81
7	Intan Jaya	3,60	3,73	3,86	3,97	4,04
8	Deiyai	3,94	4,08	4,21	4,32	4,40
Papua Tengah		5,47	5,68	5,89	6,01	6,13

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh di bawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, di mana hingga tahun 2025 tercatat RLS Provinsi Papua Tengah hanya mencapai 6,13 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua Tengah, dalam menyerap penduduk usia sekolah. Daerah di Provinsi Papua Tengah yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2025 berada di Kabupaten Mimika dengan nilai RLS 8,97 artinya sudah mencapai target program Pendidikan. Sedangkan daerah yang memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2025 berada di Kabupaten Puncak dengan nilai 2,64.

2.1.3.6. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel 2.22
Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2021-2025

No.	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Nabire	12,15	12,31	12,47	12,61	12,70
2	Puncak Jaya	7,62	7,76	7,90	7,99	7,43
3	Paniai	10,24	10,40	10,56	10,68	10,75
4	Mimika	13,42	13,58	13,74	13,89	13,98
5	Puncak	7,05	7,18	7,31	7,39	7,43
6	Dogiyai	8,43	8,58	8,73	8,83	8,89
7	Intan Jaya	8,76	8,91	9,06	9,17	9,23
8	Deiyai	9,12	9,27	9,42	9,53	9,60
Papua Tengah		9,28	9,44	9,59	9,63	9,71

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

2.1.3.7. Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua Tengah.

Tabel 2.23
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2025

No.	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)					
		2024	2024		2025	2025	
		Laki-laki	Perempuan	Rata - Rata	Laki - Laki	Perempuan	Rata - rata
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Nabire	67,25	71,02	69,14	67,68	71,44	69,56
2	Puncak Jaya	60,25	64,03	62,14	60,63	64,40	62,52
3	Paniai	64,12	67,90	66,01	64,54	68,31	66,43
4	Mimika	69,42	73,18	71,30	69,85	73,61	71,73
5	Puncak	59,18	62,96	61,07	59,55	63,32	61,44
6	Dogiyai	61,72	65,50	63,61	62,11	65,88	64,00

7	Intan Jaya	62,14	65,92	64,03	62,54	66,31	64,43
8	Deiyai	62,87	66,65	64,76	63,28	67,05	65,17
Papua Tengah		65,05	68,97	67,01	65,46	69,37	67,42

Sumber : BPS, Angka Harapan Hidup (AHH) Diperbaharui Tahun 2025

2.1.3.8. Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. Selanjutnya, dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 yang dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.24

Pengeluaran Perkapita Masyarakat di Provinsi Papua Tengah Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/ Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Mimika	1.187.420	1.242.650	1.298.340	1.345.720	1.382.100
2	Nabire	387.76	320.9	313.48	296.83	305.45
3	Paniai	214.87	236.54	242.18	258.5	271.3
4	Deiyai	176.32	198.75	210.46	223.89	235.6
5	Intan Jaya	183.63	266.8	354.13	321.65	332.7
6	Dogiyai	162.45	185.3	197.62	209.47	221.8
7	Puncak Jaya	148.79	172.56	184.21	196.58	208.4
8	Puncak	112.54	136.82	147.95	159.23	170.6
Rata-rata Provinsi Papua Tengah		421.72	456.45	482.1	507.84	529.5

Sumber : BPS Provinsi Papua,2025

Capaian pengeluaran Perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami kenaikan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dari 2021 hingga 2025. Peningkatan terjadi dari Tahun 2024 menuju Tahun 2025, Angka tertinggi berada di Tahun 2025 sebesar 529,5.

2.1.3.9. Persentase Balita Gizi Buruk

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.25

Status Gizi Anak Balita Umur 0-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua Tengah dan Indonesia Tahun 2023 - 2025 (%) dibuat terakhir 2021

No.	Kab/Kota	BB/U				TB/U			
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Nabire	11	456	3518	197	145	445	3641	20
2	Puncak Jaya	0	2	46	7	4	7	44	1
3	Paniai	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Mimika	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Puncak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dogiyai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Intan Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Deiyai	0	0	0	0	0	0	0	0
Papua Tengah		11	458	3564	204	149	152	3685	21

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah 2025

Tabel 2.26
Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan

No.	Kab./Kota	BB/TB					
		Gizi Buruk (0-59 Bulan)	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	106	289	3423	299	91	39
2	Puncak Jaya	11	33	112	15	4	3
3	Paniai	0	1	40	9	2	1
4	Mimika	58	351	8219	526	187	110
5	Puncak	1	4	170	29	8	4
6	Dogiyai	6	11	75	5	2	2
7	Intan Jaya	0	1	35	5	1	0
8	Deiyai	16	20	194	32	14	10
Papua Tengah		198	710	12268	920	309	169

Sumber :Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah 2025

2.1.3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk di atas 15 tahun pada Provinsi Papua Tengah mencapai 713.544 jiwa, yang terdiri dari 596.283 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 76 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 153.004 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua Tengah mencapai 15.257 jiwa atau sebanyak 2,20% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kabupaten Mimika memiliki jumlah penduduk di atas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua Tengah dengan jumlah mencapai 162.465 jiwa, yang terdiri dari 115.391 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,46 % dan 50.210 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Mimika mencapai 7,8 %.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua Tengah berada pada Kabupaten Puncak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Puncak mencapai 85,95 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0 %.

Kabupaten Nabire memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Nabire mencapai 6,65% atau sebanyak 5.425 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten	2021	2022	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Nabire	73.09	70.47	71.49	68.55
2	Puncak Jaya	91.39	95.85	75.59	84.51
3	Paniai	89.43	77.91	69.48	68.19
4	Mimika	64.77	69.68	68.72	68.29
5	Puncak	89.43	97.46	86.29	92.36
6	Dogiyai	78.2	81.87	57.79	87.72

7	Intan Jaya	75.75	80.15	67.61	56.99
8	Deiyai	85.01	71.55	57.79	70.23
Papua Tengah		80.86	80.61	69.34	74.60

Sumber : BPS (Provinsi Papua Tengah Dalam Angka,2024,2025,2026)

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.1.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

A. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)					
		Kelompok Usia	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Mimika	7-12	97,45	97,82	98,15	98,41	98,60
		13 - 15	92,18	92,74	93,26	93,70	94,02
		16 - 18	76,34	77,12	77,85	78,46	78,91
2	Nabire	7-12	94,21	94,75	95,23	95,62	95,89
		13 - 15	85,62	86,38	87,07	87,64	88,03
		16 - 18	64,28	65,15	65,96	66,63	67,10
3	Paniai	7-12	82,54	83,47	84,32	85,04	85,56
		13 - 15	68,73	69,81	70,80	71,65	72,28
		16 - 18	46,12	47,08	47,97	48,71	49,25
4	Deiyai	7-12	76,32	77,45	78,49	79,37	79,99
		13 - 15	58,46	59,67	60,79	61,73	62,41
		16 - 18	38,24	39,16	40,02	40,72	41,24
5	Intan Jaya	7-12	72,18	73,36	74,45	75,38	76,05
		13 - 15	51,75	52,94	54,05	54,99	55,67
		16 - 18	34,51	35,40	36,22	36,89	37,39
6	Dogiyai	7-12	68,43	69,65	70,78	71,74	72,43
		13 - 15	48,29	49,47	50,56	51,48	52,14
		16 - 18	31,87	32,74	33,54	34,19	34,67

7	Puncak Jaya	7-12	61,25	62,48	63,62	64,58	65,27
		13 - 15	40,64	41,78	42,83	43,71	44,34
		16 - 18	26,42	27,23	27,98	28,58	29,02
8	Puncak	7-12	54,72	55,96	57,11	58,07	58,76
		13 - 15	30,18	31,24	32,22	33,03	33,60
		16 - 18	19,76	20,48	21,14	21,67	22,05
Provinsi Papua Tengah		7-12	79,86	80,74	81,57	82,28	82,81
		13 - 15	65,42	66,35	67,22	67,96	68,49
		16 - 18	47,15	47,98	48,75	49,39	49,86

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

2. Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah di Provinsi Papua Tengah stabil dari tahun 2021 sampai 2025. Jumlah SD, SMP dan SMA di Provinsi Papua Tengah mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Kabupaten Mimika merupakan wilayah yang memiliki fasilitas terbanyak di Provinsi Papua Tengah dengan jumlah 88 SD, 43 SMP dan 26 SMA pada tahun 2021. Untuk lebih jelas mengenai rincian jumlah fasilitas sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Jumlah Fasilitas Sekolah di Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten
Tahun 2021 - 2025

No.	Kab/Kota	SD			SMP			SMA/SMK			Perguruan Tinggi		
		2021	2024	2025	2021	2024	2025	2021	2024	2025	2021	2024	2025
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Nabire	73	74	71	37	37	38	26	31	29	8	9	11
2	Puncak Jaya	26	30	31	6	5	4	8	7	4	-	1	2
3	Paniai	72	72	75	10	14	18	11	10	5	-	-	-
4	Mimika	83	87	88	38	42	43	26	26	18	6	5	4
5	Puncak	38	38	37	8	8	8	3	3	2	-	-	-
6	Dogiyai	47	57	46	10	11	10	4	4	3	-	-	3
7	Intan Jaya	31	38	34	6	9	8	2	1	1	-	-	-
8	Deiyai	34	34	39	9	9	10	4	4	6	-	-	3
Papua Tengah		404	430	421	124	135	139	84	86	68	14	15	23

Sumber : BPS (Papua Tengah Dalam Angka 2026)

3. Perkembangan Guru dan Murid

Jumlah guru di Provinsi Papua Tengah stabil dari Tahun 2021 sampai Tahun 2025, Jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 11,204. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan guru di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30

Perkembangan Guru di Provinsi Papua Tengah Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten	Jenis	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mimika	Negeri	2.214	2.348	2.472	2.635	2.791
		Swasta	914	926	940	970	999
		Total	3.128	3.274	3.412	3.605	3.790
2	Nabire	Negeri	2.085	2.187	2.302	2.491	2.645
		Swasta	791	804	823	851	868
		Total	2.876	2.991	3.125	3.342	3.513
3	Paniai	Negeri	982	1.051	1.128	1.235	1.362
		Swasta	160	167	178	190	202
		Total	1.142	1.218	1.306	1.425	1.564
4	Deiyai	Negeri	458	503	551	624	695
		Swasta	58	60	63	68	72
		Total	516	563	614	692	767
5	Intan Jaya	Negeri	189	211	240	262	285
		Swasta	15	16	18	19	20
		Total	204	227	258	281	305
6	Dogiyai	Negeri	384	424	469	537	604
		Swasta	37	40	43	47	49
		Total	421	464	512	584	653
7	Puncak Jaya	Negeri	218	239	263	294	329
		Swasta	19	20	21	23	24
		Total	237	259	284	317	353
8	Puncak	Negeri	147	164	181	207	243
		Swasta	11	12	13	14	16
		Total	158	176	194	221	259
Provinsi Papua Tengah		Negeri	6.677	7.127	7.606	8.285	8.954
		Swasta	2.005	2.045	2.099	2.182	2.250
		Total	8.682	9.172	9.705	10.467	11.204

Sumber: BPS Papua & Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Jumlah murid di Provinsi Papua Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai 2025. Pada tahun 2025 jumlah Murid di Provinsi Papua Tengah mencapai 164,920. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31

Perkembangan Murid di Provinsi Papua Tengah Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten	Status	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mimika	Negeri	32.418	33.872	35.245	36.980	38.520
		Swasta	14.275	14.510	14.830	15.360	15.790
		Total	46.693	48.382	50.075	52.340	54.310
2	Nabire	Negeri	24.860	26.015	27.280	28.940	30.270
		Swasta	8.420	8.605	8.840	9.210	9.480
		Total	33.280	34.620	36.120	38.150	39.750
3	Paniai	Negeri	12.540	13.425	14.380	15.670	17.040
		Swasta	2.160	2.240	2.350	2.490	2.620
		Total	14.700	15.665	16.730	18.160	19.660

4	Deiyai	Negeri	7.185	7.760	8.370	9.240	10.120
		Swasta	890	935	985	1.050	1.110
		Total	8.075	8.695	9.355	10.290	11.230
5	Intan Jaya	Negeri	5.420	5.910	6.450	7.080	7.730
		Swasta	315	330	350	370	390
		Total	5.735	6.240	6.800	7.450	8.120
6	Dogiyai	Negeri	6.270	6.825	7.410	8.190	8.970
		Swasta	540	570	605	645	680
		Total	6.810	7.395	8.015	8.835	9.650
7	Puncak Jaya	Negeri	8.140	8.850	9.610	10.580	11.540
		Swasta	425	450	475	510	535
		Total	8.565	9.300	10.085	11.090	12.075
8	Puncak	Negeri	6.830	7.460	8.120	8.970	9.820
		Swasta	240	255	270	290	305
		Total	7.070	7.715	8.390	9.260	10.125
Provinsi Papua Tengah		Negeri	103.663	110.117	116.865	125.650	134.010
		Swasta	27.265	27.895	28.705	29.925	30.910
		Total	130.928	138.012	145.570	155.575	164.920

Sumber : BPS Provinsi Papua & Dinas Pendidikan, 2025

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2.32
Angka Kematian Bayi Tahun 2025

No.	Kab/Kota	Angka Kematian Bayi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 1000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	83	2401	3.46
2	Puncak Jaya	43	419	10.26
3	Paniai	151	45	335.56
4	Mimika	3	4247	0.07
5	Puncak	6	155	3.87
6	Dogiyai	5	110	4.55
7	Intan Jaya	4	45	8.89
8	Deiyai	51	464	10.99
Papua Tengah		346	7886	4,39

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua Tengah merupakan akumulasi dari 8 kabupaten/kota.

2. Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau

pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Tabel 2.33
Angka Kematian Ibu Tahun 2025

No.	Kab/Kota	Angka Kematian Ibu		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 100.000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	6	2401	0,25
2	Puncak Jaya	9	419	2,15
3	Paniai	2	45	4,44
4	Mimika	16	4247	0,38
5	Puncak	0	155	0
6	Dogiyai	0	0	0
7	Intan Jaya	0	0	0
8	Deiyai	0	0	0
Papua Tengah		33	7267	0,00454

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2025

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua Tengah per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2025, angka kematian ibu mencapai angka 33.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua Tengah terdapat pada Kabupaten Mimika dengan total 1452,7 km (31,11%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Puncak merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua Tengah dengan 249,7 km (5,34%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Panjang Jalan di Provinsi Papua Tengah (KM)Menurut Kabupaten
Tahun 2022 - 2025

No.	Kabupaten	Jenis	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Mimika	Aspal	812,6	887,4	962,1	1.035,8
		Lainnya	474,8	455,2	436,1	415,9
		Total	1.287,4	1.342,6	1.398,2	1.451,7
2	Nabire	Aspal	548,2	602,7	658,4	713,6
		Lainnya	394,6	383,8	373,0	360,6
		Total	942,8	986,5	1.031,4	1.074,2
3	Paniai	Aspal	126,4	158,9	191,2	223,7
		Lainnya	286,1	299,4	313,5	326,1
		Total	412,5	458,3	504,7	549,8
4	Deiyai	Aspal	62,8	84,5	106,3	128,4
		Lainnya	213,4	230,2	245,8	261,1
		Total	276,2	314,7	352,1	389,5
5	Intan Jaya	Aspal	34,2	51,8	69,4	87,1
		Lainnya	150,5	167,6	184,4	200,1
		Total	184,7	219,4	253,8	287,2
6	Dogiyai	Aspal	41,5	60,2	78,8	97,5
		Lainnya	173,8	188,4	203,1	216,9
		Total	215,3	248,6	281,9	314,4

7	Puncak Jaya	Aspal	46,7	66,3	86,0	105,8
		Lainnya	202,2	216,2	230,2	243,9
		Total	248,9	282,5	316,2	349,7
8	Puncak	Aspal	22,4	38,6	54,7	71,0
		Lainnya	134,0	148,6	163,8	178,1
		Total	156,4	187,2	218,5	249,1
Provinsi		Aspal	1.694,8	1.950,4	2.206,9	2.462,9
		Lainnya	2.029,4	2.089,4	2.149,9	2.202,7
		Total	3.724,2	4.039,8	4.356,8	4.665,6

Sumber : BPS & Dinas PUPR

D. Perumahan Rakyat

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Terdapat akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua Tengah semenjak tahun 2022 sampai dengan 2025 adalah sebanyak 71.840 unit. Adapun jumlah rumah layak huni selama tahun 2022 - 2025 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua Tengah (Unit) 2022-2025

No.	Kabupaten	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Mimika	22.470	24.890	27.540	30.120
2	Nabire	14.280	15.760	17.390	19.050
3	Paniai	4.950	5.720	6.580	7.430
4	Deiyai	2.140	2.580	3.060	3.510
5	Intan Jaya	1.680	2.030	2.410	2.790
6	Dogiyai	2.370	2.840	3.320	3.780
7	Puncak Jaya	1.920	2.310	2.740	3.160
8	Puncak	1.150	1.420	1.710	2.000
Jumlah Provinsi		50.960	57.550	64.750	71.840

Sumber: BPS & Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Tahun 2025

E. Ketenteraman Perlindungan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) adalah upaya mengondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pengamanan di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Jumlah Polisi Pamong Praja per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2025

No.	Kabupaten	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
1	Mimika	127	142	158
2	Nabire	94	106	119
3	Paniai	48	57	66
4	Deiyai	32	39	45
5	Intan Jaya	21	27	33
6	Dogiyai	29	35	41
7	Puncak Jaya	24	30	36
8	Puncak	18	23	28
Jumlah Provinsi Papua Tengah		393	459	526

Sumber: Dinas Satpol PP & Satu Data Papua Tengah 2026

F. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu strategis pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua.

Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.

G. Keagamaan

- Tempat Ibadah

Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua Tengah cenderung terjadi peningkatan sepanjang tahun 2022-2025. Tercatat sampai dengan tahun 2025 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 7,20 unit. Artinya 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 7 – 8 unit tempat ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 8 kabupaten/kota sepanjang tahun 2022-2025 sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Rasio Tempat Ibadah (Unit/ 10.0000 Penduduk) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2022-2025

No.	Kabupaten	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Mimika	4,12	4,35	4,58	4,71
2	Nabire	5,87	6,14	6,42	6,68
3	Paniai	7,24	7,68	8,12	8,55
4	Deiyai	8,71	9,26	9,79	10,24
5	Intan Jaya	9,45	9,92	10,41	10,87
6	Dogiyai	8,16	8,63	9,10	9,54
7	Puncak Jaya	7,82	8,29	8,74	9,18
8	Puncak	8,94	9,47	9,98	10,42
Rata-rata Provinsi		6,27	6,59	6,91	7,20

Sumber: BPS & Kementerian Agama

Tabel 2.38
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025

No.	Kabupaten	Masjid + Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mimika	142	318	174	5	3	642
2	Nabire	98	294	132	2	1	527
3	Paniai	7	286	145	0	0	438
4	Deiyai	3	217	92	0	0	312
5	Intan Jaya	1	94	55	0	0	150
6	Dogiyai	4	192	100	0	0	296
7	Puncak Jaya	2	176	90	0	0	268
8	Puncak	1	138	70	0	0	209
TOTAL PROVINSI		258	1.715	858	7	4	2.842

Sumber: Kementerian Agama

H. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase kesempatan kerja, persentase angkatan kerja yang kerja serta distribusi lapangan pekerjaan merupakan gambaran yang bermanfaat untuk melihat prospek ekonomi suatu daerah. TPAK merupakan rasio antara banyaknya penduduk angkatan kerja dengan banyaknya Penduduk usia kerja. Hal ini menggambarkan banyaknya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik itu dengan bekerja ataupun mencari kerja.

Tabel 2.39
Tingkat Partisipasi Angka Kerja Tahun 2025

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Penduduk Usia >15 Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mimika	320.839	228.612	181.560	174.420	7.140	47.052	79,42	3,93
2	Nabire	180.190	124.970	95.290	91.640	3.650	29.680	76,18	3,83
3	Paniai	126.876	84.320	61.000	58.890	2.110	23.320	72,35	3,46
4	Deiyai	93.168	60.750	42.370	40.980	1.390	18.380	69,74	3,28
5	Intan Jaya	138.109	89.410	61.090	59.120	1.970	28.320	68,21	3,22
6	Dogiyai	117.129	76.030	53.670	51.940	1.730	22.360	70,58	3,22
7	Puncak Jaya	220.704	138.240	93.910	90.870	3.040	44.330	67,93	3,24
8	Puncak	178.580	112.960	77.780	75.290	2.490	35.180	68,86	3,20
TOTAL PROVINSI		1.375.595	915.292	666.670	643.150	23.520	248.622	73,89	3,53

Sumber: BPS & SAKERNAS 2025 (satuan Jiwa/%)

2. Angkatan Kerja Aparatur Sipil Negara

Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Tengah mencapai 8.116 jiwa atau sebesar 39,9% dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan jumlah pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.629 atau sebesar 32% pegawai negeri sipil perempuan berasal dari Kabupaten Mimika. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025(Satuan Orang/ Termasuk PNS & PPPK)

No.	Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	% Perempuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mimika	2.490	1.795	4.285	41,9%	Terbanyak, cakupan layanan luas, pusat pelayanan
2	Nabire	1.745	1.375	3.120	44,1%	Ibukota provinsi, instansi pusat & daerah
3	Puncak Jaya	1.540	920	2.460	37,4%	Wilayah luas, banyak Distrik, layanan dasar
4	Paniai	1.325	820	2.145	38,2%	Padat penduduk, pusat pendidikan & kesehatan
5	Intan Jaya	1.110	680	1.790	38,0%	Wilayah pegunungan, distribusi pelayanan
6	Dogiyai	985	625	1.610	38,8%	Padat penduduk, layanan pendidikan dominan
7	Puncak	950	585	1.535	38,1%	Wilayah tinggi, akses sulit, jumlah terbatas
8	Deiyai	780	490	1.270	38,6%	Jumlah paling sedikit, wilayah terkecil
TOTAL PROVINSI		10.925	7.29	18.215	40,0%	Termasuk PNS & PPPK

Sumber: Badan Kepegawaian Negara(BKN), Rekapitulasi data SIMPEG 2025, BKPSDM 2025, Portal Satu Data 2025.

1. Pangan

A. Indeks Kerawanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah atau negara. Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana masyarakat di wilayah tersebut dapat mengakses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan. Adapun

data Indeks Kerawanan Pangan (IKP) provinsi Papua Tengah tahun 2023- 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah 2023-2025

No.	Kabupaten	2023	2024	2025	Status 2025	Tren
1	2	3	4	5	6	7
1	Mimika	62,45	63,82	65,17	Agak Tahan	Terus membaik
2	Nabire	57,12	58,49	59,83	Agak Tahan	Meningkat perlahan
3	Paniai	45,28	46,74	48,19	Agak Rentan	Naik sedikit
4	Deiyai	38,76	40,21	41,65	Sangat Rentan	Terendah, meski naik
5	Intan Jaya	41,35	42,80	44,24	Rentan	Bertahap membaik
6	Dogiyai	44,62	46,07	47,51	Agak Rentan	Sedikit lebih baik
7	Puncak Jaya	40,18	41,63	43,07	Rentan	Kondisi masih sulit
8	Puncak	42,54	43,99	45,43	Rentan	Meningkat pelan
RATA-RATA PROVINSI		46,54	47,99	49,42	Agak Rentan	Sedikit membaik

Sumber Data: BPS (Susenas, Neraca Bahan Makanan dan Pertanian), Badan Pangan Nasional (Publikasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP),2023-2025.

Berdasarkan data di atas bahwa indeks ketahanan Pangan provinsi papua Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2023-2025 yang awalnya berada pada nilai 46,54 pada tahun 2023 menjadi 49,42 pada tahun 2025.

I. Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah akomodasi sebanyak 34 unit, 735 kamar dan 1770 tempat tidur yang tersebar pada Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai dan Mimika pada tahun 2020. Kabupaten Nabire merupakan wilayah yang paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang pariwisata.

Tabel 2.42

Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2022- 2025

No.	Kabupaten	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Mimika	Jumlah Akomodasi	28	31	34	36
		Jumlah Kamar	985	1.062	1.148	1.21
		Jumlah Tempat Tidur	1.842	1.995	2.164	2.28
2	Nabire	Jumlah Akomodasi	19	21	23	25
		Jumlah Kamar	542	590	638	685
		Jumlah Tempat Tidur	1.018	1.105	1.192	1.28
3	Puncak Jaya	Jumlah Akomodasi	10	11	12	13
		Jumlah Kamar	198	215	232	248
		Jumlah Tempat Tidur	375	408	442	470
4	Paniai	Jumlah Akomodasi	8	9	10	11
		Jumlah Kamar	165	180	195	210
		Jumlah Tempat Tidur	310	340	370	398
5	Intan Jaya	Jumlah Akomodasi	6	7	7	8

		Jumlah Kamar	112	125	132	145
		Jumlah Tempat Tidur	210	235	248	272
6	Dogiyai	Jumlah Akomodasi	5	5	6	6
		Jumlah Kamar	94	98	110	118
		Jumlah Tempat Tidur	178	185	208	222
7	Puncak	Jumlah Akomodasi	4	4	5	5
		Jumlah Kamar	72	76	88	92
		Jumlah Tempat Tidur	136	144	166	174
8	Deiyai	Jumlah Akomodasi	3	3	4	4
		Jumlah Kamar	58	62	74	78
		Jumlah Tempat Tidur	110	118	140	148
TOTAL PROVINSI		Jumlah Akomodasi	83	91	101	108
		Jumlah Kamar	2.226	2.408	2.617	2.786
		Jumlah Tempat Tidur	4.179	4.53	4.928	5.244

Sumber: BPS (Direktori Usaha Akomodasi & Penyajian makan minum 2022-2025), KEMENPAREKRAF (data Statistik Kepariwisataan daerah 2022-2025

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang berperan dalam meningkatkan perekonomian sekaligus memperkenalkan budaya dan keindahan alam suatu daerah. Taman Nasional Teluk Cendrawasih dan puncak Gunung Cartensz merupakan contoh daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Papua Tengah.

Tabel 2.43 Statistik Pariwisata pada Jasa Akomodasi di Provinsi Papua Tengah, 2024

No.	Indikator	Jumlah
1	2	3
1	Rata-rata lama Menginap tamu WNA (hari))	2,69
2	Rata-rata lama menginap tamu WNI (hari)	2,20
3	Rata-rata lama menginap tamu (hari)	2,22
4	Jumlah tamu asing (orang)	8.180
5	Jumlah tamu Indonesia (orang)	231.556
6	Jumlah tamu (orang)	239.736
7	Jumlah malam kamar tersedia (kamar)	670.614
8	Jumlah malam kamar terjual (kamar)	252.105

Sumber Data :BPS (Papua Tengah Dalam Angka Tahun 2025)

2. Pertanian

Tahun 2024, tercatat luas panen padi Provinsi Papua Tengah sebesar 1.436,12 Ha. Sementara produksi padi mencapai 6.072,38 ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada tahun 2024 mencapai 3.467,26 ton.

Produksi komoditas di Provinsi Papua Tengah paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua Tengah mencapai 7.356,28 Ton dan produksi padi setara beras mencapai 4.178,72 Ton. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupaten Nabire. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian produksi komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Produksi Komoditas Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No.	Kabupaten	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)
1	2	3	4	5	6
1	Nabire	7.312,00	4.153,56	991,00	725,00
2	Puncak Jaya	-	-	-	-
3	Paniai	-	-	346,00	113,00
4	Mimika	44,28	25,16	128,00	106,00
5	Puncak	-	-	182,00	-
6	Dogiyai	-	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-	-
8	Deiyai	-	-	-	-
Jumlah		7.356,28	4.178,72	1.647,00	944,00

Sumber Data : Papua Tengah Dalam Angka Tahun 2025

B. Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Papua Tengah, 2024

Tabel 2.45 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah 2022-2024

No.	Komponen	Padi
1	*2*	*3*
1	Luas Panen (Ha)	1.436,12
2	Produksi (Ton GKG)	6.072,38

Sumber Data : BPS (Papua Tengah Dalam Angka Tahun 2025)

Tahun 2024, tercatat luas panen padi Provinsi Papua Tengah sebesar 1.436,12 Ha. Sementara produksi padi mencapai 6.072,38 ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras pada tahun 2024 mencapai 3.467,26 ton.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Perekonomian Provinsi Papua Tengah dapat diidentifikasi dari akumulasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha dalam mengidentifikasi sektor basis, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.46
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (juta rupiah)
Tahun 2022-2025

No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.789.150	3.945.600	4.102.300	4.258.700
2	Pertambangan & Penggalian	72.894.600	76.520.800	80.156.400	61.982.100
3	Industri Pengolahan	2.012.800	2.145.700	2.289.500	2.376.200
4	Listrik, Gas, Air Bersih	353.4	375.7	399.4	420.8
5	Konstruksi	3.782.400	4.158.900	4.492.700	4.625.400
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	3.724.900	4.037.400	4.365.500	4.558.200
7	Angkutan & Komunikasi	2.368.300	2.606.900	2.855.600	3.024.100
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.616.600	1.756.500	1.909.900	1.995.600
9	Jasa Kemasyarakatan & Sosial	6.346.500	7.097.700	7.761.300	8.080.700

TOTAL PDRB ADHK	96.988.650	102.645.200	107.573.600	91.323.800

Sumber: BPS Provinsi Papua (PDRB Menurut Lapangan Usaha 2022-2025)

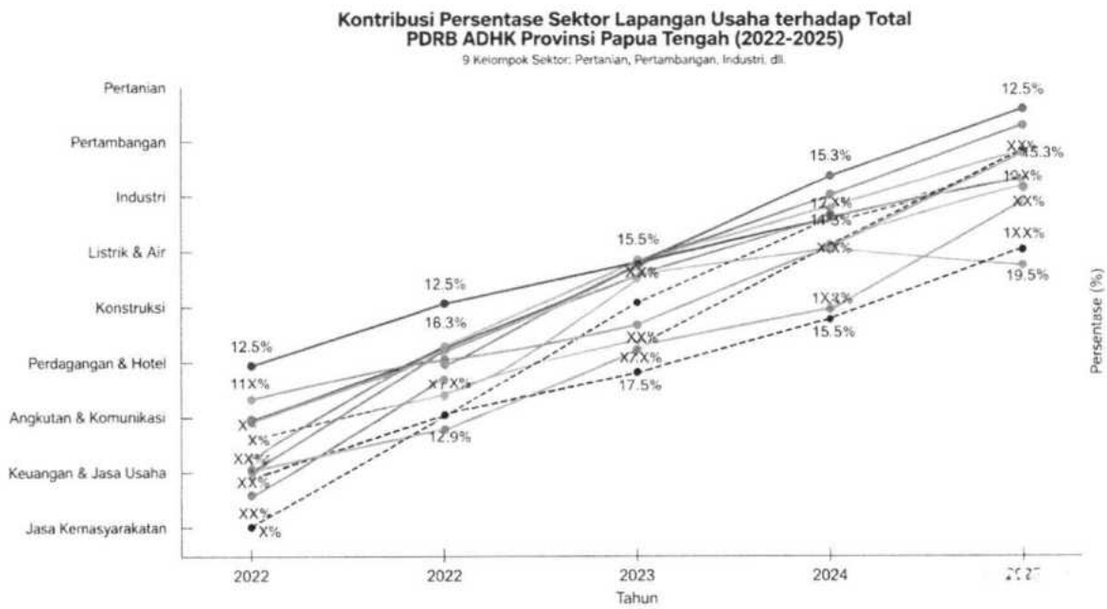
Tabel 2.47
Proporsi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (persen)
Tahun 2022-2025

No.	Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3,91	3,84	3,81	4,66
2	Pertambangan & Penggalian	75,16	74,55	74,51	67,87
3	Industri Pengolahan	2,08	2,09	2,13	2,60
4	Listrik, Gas, Air Bersih	0,36	0,37	0,37	0,46
5	Konstruksi	3,90	4,05	4,18	5,06
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	3,84	3,93	4,06	4,99
7	Angkutan & Komunikasi	2,44	2,54	2,65	3,31
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,67	1,71	1,78	2,19
9	Jasa Kemasyarakatan & Sosial	6,54	6,92	7,21	8,85
TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua (PDRB Menurut Lapangan Usaha 2022-2025)

Tabel di atas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama tahun 2022-2025, dengan pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar (67,87%).

Gambar 2.8
Grafik Fluktuasi Kontribusi Sektor lapangan Usaha terhadap Total PDRB ADHK
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS Provinsi Papua (PDRB Menurut Lapangan Usaha 2022-2025)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang sangat mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua Tengah. Akan tetapi, terdapat penurunan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2025.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Papua tengah Tahun 2025-2030 dan situasi eksisting di lapangan, Serta berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 sehingga didapat beberapa isu strategis aktual yang dapat diangkat menjadi isu strategis dalam RKPD Tahun 2025. Adapun rincian permasalahan dan isu strategis dari setiap kabupaten yang hadir dalam pertemuan dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.48

Isu Strategis dan Permasalahan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No.	Kab./Kota	Isu Strategis dan Permasalahan	
1	*2*	*3*	
1	Kabupaten Nabire	1	Ketergantungan masyarakat akan pemerintah sangat tinggi, namun Pelayanan pemerintah masih rendah
		2	Konektivitas wilayah pada 15 distrik di Kab. Nabire yang belum terkoneksi jalan darat, terutama di Distrik Dipa, Meno , Napan, dan Wapoga membutuhkan pembangunan jalan baru
		3	Kurang optimalnya penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
		4	Masih banyak permukiman kumuh pada wilayah pesisir dan pegunungan
		5	SPAM dan fasilitas persampahan yang masih minim
		6	Tingkat kemiskinan ekstrem sangat tinggi
		7	Tingkat keamanan sangat rendah
		8	Belum Maksimalnya Distribusi Pangan
		9	Tingginya Tingkat Inflasi Daerah
2	Kabupaten Mimika	1	Konektivitas wilayah menuju beberapa kabupaten dan ibukota provinsi masih buruk
		2	Tingkat kemiskinan ekstrem sangat tinggi
		3	Pembangunan infrastruktur perumahan masih rendah
		4	Tingkat keamanan sangat rendah
		5	SPAM dan fasilitas persampahan yang masih minim
		6	Kurang Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		7	Belum Maksimalnya Distribusi Pangan
		8	Tingginya Tingkat Inflasi Daerah
3	Kabupaten Puncak Jaya	1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		2	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		3	Masalah dan konflik masih menggunakan hukum adat
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Tingkat keamanan sangat rendah
		7	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		8	Tingginya Prevalensi Stunting

		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
		10	Kurang Ketersediaan Pangan
		11	Belum Maksimalnya Distribusi Pangan
		12	Tingginya Tingkat Inflasi Daerah
4	Kabupaten Intan Jaya	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
		10	Kurang Ketersediaan Pangan
		11	Belum Maksimalnya Distribusi Pangan
		12	Tingginya Tingkat Inflasi Daerah
5	Kabupaten Paniai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
		10	Kurang Ketersediaan Pangan
		11	Belum Maksimalnya Distribusi Pangan
		12	Tingginya Tingkat Inflasi Daerah
6	Kabupaten Deiyai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
		10	Kurang Ketersediaan Pangan
		11	Belum Maksimalnya Distribusi Pangan
		12	Tingginya Tingkat Inflasi Daerah

7	Kabupaten Dogiyai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
		10	Kurang Ketersediaan Pangan
		11	Belum Maksimalnya Distribusi Pangan
		12	Tingginya Tingkat Inflasi Daerah
8	Kabupaten Puncak	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
		10	Kurang Ketersediaan Pangan
		11	Belum Maksimalnya Distribusi Pangan
		12	Tingginya Tingkat Inflasi Daerah

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Provinsi Papua Tengah Tahun 2025

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah

Selain permasalahan pembangunan, perlu dilakukan identifikasi permasalahan atau hal-hal lain yang berpotensi menjadi penghambat pelaksanaan program atau kegiatan yang oleh OPD/PERANGKAT DAERAH. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan urusan di provinsi DOB. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang didapat dari masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 isu strategis yang diangkat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Tengah yang mempertimbangkan urgensi pembangunan, masalah serupa yang terjadi di seluruh kabupaten, dan masalah yang merupakan kewenangan provinsi. Lima isu strategis di Provinsi Papua Tengah yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.49
Lima Isu Strategis Aktual di Provinsi Papua Tengah

No.	Isu Strategis	Permasalahan Pendukung
1	*2*	*3*
1	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Perangkat Daerah Provinsi	Belum adanya infrastruktur penunjang untuk penyelenggaraan urusan

2	Pemenuhan Pelayanan Dasar	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Kesehatan
		Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan
		Rendahnya Konektivitas Jaringan Prasarana Infrastruktur
		Rendahnya Ketersediaan Pangan pada Beberapa Kabupaten
3	Daya Saing Wilayah	Rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Papua
		Tingginya tingkat kemiskinan penduduk
		Masih Tingginya Inflasi Daerah
4	Keamanan Wilayah	Masih adanya konflik antara kelompok
		Penanganan pengungsi akibat konflik
5	Konektivitas Wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah (jalan, pelabuhan, bandara)
		Kebutuhan untuk mengaktifkan kembali pembangunan jalan trans nasional terhambat karena alasan keamanan

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Provinsi Papua Tengah Tahun 2025

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2025 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2027. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Papua Tengah:

Tabel 2. 50 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		606,344,404,899.00		380,272,969,280.95	62.72			226,071,435,618.05	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		51,658,273,188.00		43,548,897,631.45	84.30			8,109,375,556.55	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		642,600,000.00		608,879,800.00	94.75			33,720,200.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Dokumen	86,160,000.00	93.86	1 Dokumen	93.86	5,640,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Dokumen	86,230,000.00	93.93	1 Dokumen	93.93	5,570,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Dokumen	86,200,000.00	93.90	1 Dokumen	93.90	5,600,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Dokumen	91,669,800.00	99.86	1 Dokumen	99.86	130,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	91,800,000.00	1 Dokumen	86,160,000.00	93.86	1 Dokumen	93.86	5,640,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

		PERANGKAT DAERAH	Semua Kel/Kampung								
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Laporan	86,230,000.00	93.93	1 Laporan	93.93	5,570,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Laporan	86,230,000.00	93.93	1 Laporan	93.93	5,570,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,748,369,455.00		5,478,012,267.00	81.18			1,270,357,188.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	6,381,169,455.00	50 Orang/ Bulan	5,133,092,267.00	80.44	50 Orang/ Bulan	80.44	1,248,077,188.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Laporan	86,230,000.00	93.93	1 Laporan	93.93	5,570,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Dokumen	86,230,000.00	93.93	1 Dokumen	93.93	5,570,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Laporan	86,230,000.00	93.93	1 Laporan	93.93	5,570,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

		PERANGKAT DAERAH									
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,800,000.00	1 Dokumen	86,230,000.00	93.93	1 Dokumen	93.93	5,570,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		959,600,000.00		484,810,000.00	50.52			474,790,000.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	177,400,000.00	1 Dokumen	91,770,000.00	51.73	1 Dokumen	51.73	85,630,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Air Permukaan, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	427,400,000.00	1 Dokumen	242,400,000.00	56.72	1 Dokumen	56.72	185,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	177,400,000.00	1 Laporan	91,770,000.00	51.73	1 Laporan	51.73	85,630,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	177,400,000.00	1 Laporan	58,870,000.00	33.18	1 Laporan	33.18	118,530,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		320,233,000.00		60,000,000.00	18.74			260,233,000.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas	Semua Kota/Kab,	42,000,000.00	1 Paket	42,000,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Bea Balik Nama

		Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	258,233,000.00	15 Orang	-	-	15 Orang	-	258,233,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	20,000,000.00	50 Orang	18,000,000.00	90.00	50 Orang	90.00	2,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12,453,492,300.00		8,872,971,590.00	71.25			3,580,520,710.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,623,317,100.00	35 Paket	1,555,771,490.00	95.84	35 Paket	95.84	67,545,610.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	551,141,200.00	1 Paket	173,100,578.00	31.41	1 Paket	31.41	378,040,622.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,036,482,000.00	3 Paket	1,155,213,728.00	56.73	3 Paket	56.73	881,268,272.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,669,753,000.00	1 Laporan	1,877,144,460.00	70.31	1 Laporan	70.31	792,608,540.00	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,572,799,000.00	1 Laporan	4,111,741,334.00	73.78	1 Laporan	73.78	1,461,057,666.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan

											Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		460,100,000.00		459,296,000.00	99.83			804,000.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	460,100,000.00	1 Unit	459,296,000.00	99.83	1 Unit	99.83	804,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,499,334,000.00		2,233,682,114.00	49.64			2,265,651,886.00	

1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	782,250,000.00	1 Laporan	150,604,656.00	19.25	1 Laporan	19.25	631,645,344.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,717,084,000.00	1 Laporan	2,083,077,458.00	56.04	1 Laporan	56.04	1,634,006,542.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25,574,544,433.00		25,351,245,860.45	99.13			223,298,572.55	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		330,000,000.00		234,915,000.00	71.19	-	71.19	95,085,000.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	123,750,000.00	2 Unit	30,810,000.00	24.90	2 Unit	24.90	92,940,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

			Semua Kel/Kampung								
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	65,000,000.00	10 Unit	64,912,800.00	99.87	10 Unit	99.87	87,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	25,055,794,433.00	30 Ha	25,020,608,060.45	99.86	30 Ha	99.86	35,186,372.55	Pajak Air Permukaan, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		513,882,223,026.00		326,557,486,052.50	63.55			187,324,736,973.50	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus		35,152,392,645.00		23,322,741,794.00	66.35			11,829,650,851.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,463,759,345.00	3 Unit	7,446,266,874.00	99.77	3 Unit	99.77	17,492,471.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),

											Pajak Air Permukaan Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	132,000,000.00	4 Paket	130,536,000.00	98.89	4 Paket	98.89	1,464,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,710,000,000.00	3 Paket	5,683,929,894.00	99.54	3 Paket	99.54	26,070,106.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil

											(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), PKB, Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,945,951,600.00	500 Peserta Didik	3,125,750,970.00	79.21	500 Peserta Didik	79.21	820,200,630.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,179,958,000.00	50 Orang	4,542,689,733.00	63.27	50 Orang	63.27	2,637,268,267.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, DAU yang

											Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,608,613,900.00	500 Orang	857,350,413.00	53.30	500 Orang	53.30	751,263,487.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,849,600,000.00	2 Satuan Pendidikan	-	-	2 Satuan Pendidikan	-	4,849,600,000.00	DAK Non Fisik-BOS Reguler, DAK Non Fisik-BOS Kinerja
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	326,852,000.00	50 Orang	-	-	50 Orang	-	326,852,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	383,933,700.00	500 Orang	352,382,400.00	91.78	500 Orang	91.78	31,551,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	184,469,400.00	2 Dokumen	16,044,614.00	8.70	2 Dokumen	8.70	168,424,786.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi	Semua Kota/Kab,	470,457,600.00	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	-	470,457,600.00	Bea Balik Nama

		Kebijakan Bidang Pendidikan	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), PKB
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		69,600,000.00		-	-	-	-	69,600,000.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		2,170,610,100.00		550,692,753.00	25.37	-	25.37	1,619,917,347.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	444,050,000.00	5 Ruang	442,782,387.00	99.71	5 Ruang	99.71	1,267,613.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	212,537,000.00	5 Komunitas	174,315,756.00	82.02	5 Komunitas	82.02	38,221,244.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)

1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04	Pengelolaan Akademi Komunitas		1,002,959,900.00		402,961,466.00	40.18			599,998,434.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas		427,113,900.00		272,927,466.00	63.90	-	63.90	154,186,434.00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.04.0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas		575,846,000.00	1 Dokumen	130,034,000.00	22.58	1 Dokumen	22.58	445,812,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan , Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, PKB
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.07	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan		477,726,870,481.00		302,831,782,792.50	63.39			174,895,087,688.50	
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan		112,592,059,724.00		67,753,279,240.00	60.18	-	60.18	44,838,780,484.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan , Sisa Lebih Perhitunga

											n Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, PKB, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan.
1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.3.07.0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan		365,134,810,757.00		235,078,503,552.50	64.38	-	64.38	130,056,307,204.50	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil

											(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, PKB, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan,

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang terdiri dari 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan, dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp, 606,344,404,899,00 dan Terealisasi sebesar Rp, 380,272,969,280.95 dengan persentase realisasi sebesar 62,72%.

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.2.14.0.00.02.0000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		281,755,408,911.00		233,699,980,655.00	82.94			48,055,428,256.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		35,594,956,111.00		32,703,332,115.00	91.88			2,891,623,996.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,677,278,021.00		5,498,049,648.00	96.84			179,228,373.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,677,278,021.00	56 Orang/ Bulan	5,498,049,648.00	96.84	56 Orang/ Bulan	96.84	179,228,373.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		210,420,000.00		210,420,000.00	100.00			-	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	210,420,000.00	1 Paket	210,420,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		13,317,219,100.00		10,950,911,740.00	82.23			2,366,307,360.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,498,341,900.00	5 Paket	1,491,977,900.00	99.58	5 Paket	99.58	6,364,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	75,018,300.00	1 Paket	75,018,300.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	6,269,326,700.00	12 Laporan	5,859,715,400.00	93.47	12 Laporan	93.47	409,611,300.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,474,532,200.00	3 Laporan	3,524,200,140.00	64.37	3 Laporan	64.37	1,950,332,060.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		517,072,000.00		517,072,000.00	100.00			-	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	517,072,000.00	1 Paket	517,072,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		260,280,000.00		172,666,680.00	66.34			87,613,320.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	260,280,000.00	12 Laporan	172,666,680.00	66.34	12 Laporan	66.34	87,613,320.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15,612,686,990.00		15,354,212,047.00	98.34			258,474,943.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	15,612,686,990.00	8 Unit	15,354,212,047.00	98.34	8 Unit	98.34	258,474,943.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum

											Terselesaikan, Dana Alokasi Umum (DAU), LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		217,754,082,300.00		179,110,708,522.00	82.25			38,643,373,778.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		122,069,184,500.00		106,699,518,288.00	87.41			15,369,666,212.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	34,663,216,030.00	1 Unit	32,653,954,695.00	94.20	1 Unit	94.20	2,009,261,335.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Pajak RokokDAU yang Ditentukan

											Penggunaannya Bidang KesehatanDana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	61,733,790,099.00	8 Unit	49,905,111,059.00	80.84	8 Unit	80.84	11,828,679,040.00	Pajak Rokok, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, Pajak Rokok, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		4,346,221,936.00		2,996,620,826.00	68.95	-	68.95	1,349,601,110.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	21,325,956,435.00	1 Paket	21,143,831,708.00	99.15	1 Paket	99.15	182,124,727.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan

1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		92,833,049,700.00		70,173,845,534.00	75.59			22,659,204,166.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	698,345,400.00	98.000 Orang	-	-	98.000 Orang	-	698,345,400.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	327,726,600.00	98.000 Orang	-	-	98.000 Orang	-	327,726,600.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,600,000,000.00	80 Dokumen	5,527,700,202.00	98.71	80 Dokumen	98.71	72,299,798.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	539,231,000.00	5 Dokumen	277,973,592.00	51.55	5 Dokumen	51.55	261,257,408.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,348,078,700.00	80 Dokumen	5,133,419,818.00	95.99	80 Dokumen	95.99	214,658,882.00	Pajak Rokok Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil

											(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	76,743,919,000.00	5 Dokumen	58,632,855,058.00	76.40	5 Dokumen	76.40	18,111,063,942.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Pajak Rokok, Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,763,715,000.00	80 Dokumen	47,922,603.00	1.73	80 Dokumen	1.73	2,715,792,397.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	812,034,000.00	80 Dokumen	553,974,261.00	68.22	80 Dokumen	68.22	258,059,739.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		2,851,848,100.00		2,237,344,700.00	78.45			614,503,400.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	35,344,700.00	8 Unit	35,344,700.00	100.00	8 Unit	100.00	-	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,816,503,400.00	8 Unit	2,202,000,000.00	78.18	8 Unit	78.18	614,503,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas

											Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		6,767,426,500.00		3,058,409,055.00	45.19			3,709,017,445.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		6,767,426,500.00		3,058,409,055.00	45.19			3,709,017,445.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,328,480,100.00	800 Orang	2,334,889,800.00	53.94	800 Orang	53.94	1,993,590,300.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,438,946,400.00	25 Dokumen	723,519,255.00	29.67	25 Dokumen	29.67	1,715,427,145.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		18,702,463,400.00		17,358,152,864.00	92.81			1,344,310,536.00	

1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		18,702,463,400.00		17,358,152,864.00	92.81			1,344,310,536.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		18,702,463,400.00		17,358,152,864.00	92.81	-	92.81	1,344,310,536.00	

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang terdiri dari 4 (Empat) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 281,755,408,911 dan Terealisasi sebesar Rp. 233,699,980,655 dengan persentase realisasi sebesar 82,94 %.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.1.04.0.00.03.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		706,616,281,163.00		447,717,759,760.98	63.36			258,898,521,402.02	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		186,638,147,064.00		108,764,659,762.81	58.28			77,873,487,301.19	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*75,009,287.00*		-	-			75,009,287.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,670,000.00	1 Dokumen	-	-			5,670,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	39,870,000.00	1 Dokumen	-	-			39,870,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,670,000.00	1 Dokumen	-	-			5,670,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	5,670,000.00	1 Dokumen	-	-			5,670,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

		PERANGKAT DAERAH	Semua Kel/Kampung								
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,670,000.00	1 Dokumen	-	-			5,670,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,670,000.00	1 Laporan	-	-			5,670,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	6,789,287.00	1 Laporan	-	-			6,789,287.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*5,967,286,330.00*		*5,752,952,007.00*	*96.41*			214,334,323.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,840,702,330.00	80 Orang/ Bulan	5,653,952,007.00	96.80	80 Orang/ Bulan	96.80	186,750,323.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	42,441,000.00	1 Laporan	34,200,000.00	80.58	1 Laporan	80.58	8,241,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	44,593,000.00	18 Laporan	34,200,000.00	76.69	18 Laporan	76.69	10,393,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

		Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH									
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	39,550,000.00	1 Laporan	30,600,000.00	77.37	1 Laporan	77.37	8,950,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*448,405,000.00*		*391,285,000.00*	*87.26*			57,120,000.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	299,000,000.00	80 Paket	299,000,000.00	100.00	80 Paket	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	149,405,000.00	35 Orang	92,285,000.00	61.77	35 Orang	61.77	57,120,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*6,576,842,518.00*		*6,434,549,882.00*	*97.84*			142,292,636.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,774,500.00	12 Paket	49,751,000.00	99.95	12 Paket	99.95	23,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	910,000,000.00	1 Paket	909,940,000.00	99.99	1 Paket	99.99	60,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	402,867,118.00	100000 Paket	401,690,000.00	99.71	100000 Paket	99.71	1,177,118.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	437,371,200.00	1 Paket	436,277,000.00	99.75	1 Paket	99.75	1,094,200.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	466,501,700.00	2800 Laporan	466,501,700.00	100.00	2800 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,310,328,000.00	300 Laporan	4,170,390,182.00	96.75	300 Laporan	96.75	139,937,818.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*162,752,169,818.00*		*85,659,335,848.81*	*52.63*			77,092,833,969.19	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	661,608,000.00	10 Paket	661,578,000.00	100.00	10 Paket	100.00	30,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	699,756,000.00	10 Unit	699,556,000.00	99.97	10 Unit	99.97	200,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	111,725,697,004.00	7 Unit	34,820,781,487.32	31.17	7 Unit	31.17	76,904,915,516.68	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, DAU yang Ditentukan

											Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	39,515,108,814.00	2 Unit	39,341,288,139.00	99.56	2 Unit	99.56	173,820,675.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	10,150,000,000.00	2 Unit	10,136,132,222.49	99.86	2 Unit	99.86	13,867,777.51	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*988,068,000.00*		*700,638,051.00*	*70.91*			287,429,949.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	24,800,000.00	20 Laporan	8,900,000.00	35.89	20 Laporan	35.89	15,900,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	238,146,000.00	24 Laporan	154,693,051.00	64.96	24 Laporan	64.96	83,452,949.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	725,122,000.00	6 Laporan	537,045,000.00	74.06	6 Laporan	74.06	188,077,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*9,830,366,111.00*		*9,825,898,974.00*	*99.95*			4,467,137.00	

1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,600,000.00	1 Unit	-	-			3,600,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	9,826,766,111.00	2 Unit	9,825,898,974.00	99.99	2 Unit	99.99	867,137.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		47,654,582,274.46		30,210,644,578.54	63.40			17,443,937,695.92	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.02.1.01*	*Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota*		*47,433,982,731.46*		*29,990,046,051.00*	*63.22*			17,443,936,680.46	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	37,298,982,731.46	2 KM	20,586,046,051.00	55.19	2 KM	55.19	16,712,936,680.46	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	10,135,000,000.00	5 KM	9,404,000,000.00	92.79	5 KM	92.79	731,000,000.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.02.1.02*	*Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota*		*220,599,543.00*		*220,598,527.54*	*100.00*			1,015.46	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	220,599,543.00	2 KM	220,598,527.54	100.00	2 KM	100.00	1,015.46	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		39,236,203,028.72		28,939,621,082.51	73.76			10,296,581,946.21	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.03.1.01*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota*		*39,236,203,028.72*		*28,939,621,082.51*	*73.76*			10,296,581,946.21	

1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	358,435,000.00	8 Kabupaten/ Kota	20,494,400.00	5.72	8 Kabupaten/ Kota	5.72	337,940,600.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	24,612,802,816.72	3 Liter/Detik	20,567,842,017.51	83.57	3 Liter/Detik	83.57	4,044,960,799.21	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), DTI-Papua-Air Bersih
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	14,264,965,212.00	3 Liter/Detik	8,351,284,665.00	58.54	3 Liter/Detik	58.54	5,913,680,547.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, DTI-Papua-Air Bersih
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		500,000,000.00		422,279,300.00	84.46			77,720,700.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.04.1.01*	*Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional*		*500,000,000.00*		*422,279,300.00*	*84.46*			77,720,700.00	

1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	500,000,000.00	1 Dokumen	422,279,300.00	84.46	1 Dokumen	84.46	77,720,700.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		3,043,750,000.00		2,277,656,426.00	74.83			766,093,574.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.05.1.01*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional*		*3,043,750,000.00*		*2,277,656,426.00*	*74.83*			766,093,574.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,043,750,000.00	5 M^3/Hari	2,277,656,426.00	74.83	5 M^3/Hari	74.83	766,093,574.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		12,682,912,465.21		12,657,568,265.00	99.80			25,344,200.21	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.06.1.01*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi*		*12,682,912,465.21*		*12,657,568,265.00*	*99.80*			25,344,200.21	

1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	6,330,795,165.21	0 Sistem Drainase Perkotaan	6,305,550,865.00	99.60	0 Sistem Drainase Perkotaan	99.60	25,244,300.21	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	6,352,117,300.00	20 Sistem Drainase Perkotaan	6,352,017,400.00	100.00	20 Sistem Drainase Perkotaan	100.00	99,900.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		24,438,297,400.00		23,604,346,480.00	96.59			833,950,920.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.07.1.01*	*Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi*		*2,041,644,200.00*		*1,831,921,200.00*	*89.73*			209,723,000.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.07.1.01.0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,756,250,000.00	100 M^3/Hari	1,697,267,000.00	96.64	100 M^3/Hari	96.64	58,983,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	135,394,200.00	3 Liter/Detik	134,654,200.00	99.45	3 Liter/Detik	99.45	740,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), DTI-Papua-Air Bersih

		Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi									
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	150,000,000.00	1 Unit	-	-			150,000,000.00	DTI-Papua-Air Bersih
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.07.3.02*	*Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP*		*22,396,653,200.00*		*21,772,425,280.00*	*97.21*			624,227,920.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.07.3.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	22,396,653,200.00	20 KM	21,772,425,280.00	97.21	20 KM	97.21	624,227,920.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, PKB
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		388,454,221,048.61		238,490,139,937.12	61.39			149,964,081,111.49	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.10.1.01*	*Penyelenggaraan Jalan Provinsi*		*388,454,221,048.61*		*238,490,139,937.12*	*61.39*			149,964,081,111.49	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Semua Kota/Kab, Semua	10,912,007,371.00	20 KM	9,697,964,000.00	88.87	20 KM	88.87	1,214,043,371.00	Sisa Lebih Perhitungan

			Distrik, Semua Kel/Kampung								Anggaran Tahun Sebelumnya,PKB
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	180,240,255,913.00	50 KM	73,177,694,816.81	40.60	50 KM	40.60	107,062,561,096.19	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), PKB, DBH Sawit, DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan, DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	60,447,561,189.00	5 Jembatan	21,296,031,484.95	35.23	5 Jembatan	35.23	39,151,529,704.05	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), PKB, DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan

											Infrastruktur Perhubungan
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	73,468,284,653.54	0 KM	72,035,967,400.00	98.05	0 KM	98.05	1,432,317,253.54	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	62,572,831,922.07	60 KM	62,282,482,235.36	99.54	60 KM	99.54	290,349,686.71	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	813,280,000.00	1000 KM	-	-			813,280,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		241,736,277.00		125,480,000.00	51.91			116,256,277.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.11.3.01*	*Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi*		*241,736,277.00*		*125,480,000.00*	*51.91*			116,256,277.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.11.3.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	241,736,277.00	30 Orang	125,480,000.00	51.91	30 Orang	51.91	116,256,277.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGG		3,726,431,605.00		2,225,363,929.00	59.72			1,501,067,676.00	

		ARAAN PENATAAN RUANG									
1.03.1.04.0.00.03.0000	*1.03.12.1.01*	*Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi*		*3,726,431,605.00*		*2,225,363,929.00*	*59.72*			1,501,067,676.00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	25,000,000.00	1 Publikasi	-	-			25,000,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,659,051,605.00	1 Dokumen	2,225,363,929.00	60.82	1 Dokumen	60.82	1,433,687,676.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
1.03.1.04.0.00.03.0000	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	42,380,000.00	50 Orang	-	-			42,380,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan, dan 53 (Lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 706,616,281,163, dan Terealisasi sebesar Rp. 447,717,759,760,98 dengan persentase realisasi sebesar 63,36%

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.0.00.0.00.04.0000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		39,762,419,974.00		37,616,410,497.00	94.60			2,146,009,477.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		22,125,294,099.00		20,692,544,404.00	93.52			1,432,749,695.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		505,417,200.00		504,772,200.00	99.87			645,000.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	127,457,000.00	1 Dokumen	127,002,000.00	99.64	1 Dokumen	99.64	455,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	99,952,900.00	1 Dokumen	99,862,900.00	99.91	1 Dokumen	99.91	90,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	156,323,900.00	1 Dokumen	156,323,900.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	121,683,400.00	1 Laporan	121,583,400.00	99.92	1 Laporan	99.92	100,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

		Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kel/Kampung								
1.05.0.00.0.00.04.0000	*1.05.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*5,557,597,399.00*		*5,391,792,929.00*	*97.02*			*165,804,470.00*	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5,127,417,099.00		4,964,172,629.00	96.82			163,244,470.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	153,950,000.00	1 Laporan	153,950,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	142,650,000.00	4 Laporan	142,650,000.00	100.00	4 Laporan	100.00	-	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	133,580,300.00	1 Dokumen	131,020,300.00	98.08	1 Dokumen	98.08	2,560,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	*1.05.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*1,875,707,000.00*		*1,774,380,948.00*	*94.60*			*101,326,052.00*	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,453,745,000.00	500 Paket	1,448,506,000.00	99.64	500 Paket	99.64	5,239,000.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	421,962,000.00	15 Orang	325,874,948.00	77.23	15 Orang	77.23	96,087,052.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

1.05.0.00.0.00.04.0000	*1.05.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*8,625,241,000.00*		*8,407,843,425.00*	*97.48*			*217,397,575.00*	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	43,109,200.00	1 Paket	43,097,240.00	99.97	1 Paket	99.97	11,960.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,911,900.00	1 Paket	-	-	1 Paket	-	7,911,900.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	56,462,500.00	1 Paket	56,397,200.00	99.88	1 Paket	99.88	65,300.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,339,650,000.00	1 Paket	3,339,650,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	487,012,000.00	1 Paket	487,012,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	83,360,000.00	10 Dokumen	18,400,000.00	22.07	10 Dokumen	22.07	64,960,000.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,646,686,000.00	1 Laporan	2,640,169,000.00	99.75	1 Laporan	99.75	6,517,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,961,049,400.00	1 Laporan	1,823,249,985.00	92.97	1 Laporan	92.97	137,799,415.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		4,135,803,500.00		3,362,571,998.00	81.30			773,231,502.00	

		Pemerintah Daerah									
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,064,000,000.00	8 Unit	2,293,139,998.00	74.84	8 Unit	74.84	770,860,002.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	401,839,500.00	1 Paket	401,000,000.00	99.79	1 Paket	99.79	839,500.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	469,964,000.00	10 Unit	469,332,000.00	99.87	10 Unit	99.87	632,000.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Unit	199,100,000.00	99.55	1 Unit	99.55	900,000.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,021,248,000.00		884,440,904.00	86.60			136,807,096.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	120,000,000.00	1 Laporan	120,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	106,020,000.00	1 Laporan	85,879,904.00	81.00	1 Laporan	81.00	20,140,096.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	795,228,000.00	1 Laporan	678,561,000.00	85.33	1 Laporan	85.33	116,667,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		404,280,000.00		366,742,000.00	90.71			37,538,000.00	

1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	42,400,000.00	9 Unit	5,042,000.00	11.89	9 Unit	11.89	37,358,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	290,630,000.00	7 Unit	290,620,000.00	100.00	7 Unit	100.00	10,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	71,250,000.00	15 Unit	71,080,000.00	99.76	15 Unit	99.76	170,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		14,047,828,600.00		13,478,943,120.00	95.95			568,885,480.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	*1.05.02.1.01*	*Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*		*13,913,777,600.00*		*13,362,892,896.00*	*96.04*			*550,884,704.00*	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	11,898,675,600.00	300 Orang	11,428,906,511.00	96.05	300 Orang	96.05	469,769,089.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	316,112,000.00	1 Dokumen	306,541,385.00	96.97	1 Dokumen	96.97	9,570,615.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

		Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi									
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,K etertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		1,433,990,000.00		1,362,445,000.00	95.01	-	95.01	71,545,000.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		265,000,000.00		265,000,000.00	100.00	-	100.00	-	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		134,051,000.00		116,050,224.00	86.57			18,000,776.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	134,051,000.00	1 Laporan	116,050,224.00	86.57	1 Laporan	86.57	18,000,776.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA		1,536,177,000.00		1,464,771,070.00	95.35			71,405,930.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		303,493,000.00		285,258,000.00	93.99			18,235,000.00	

1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	303,493,000.00	1 Dokumen	285,258,000.00	93.99	1 Dokumen	93.99	18,235,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1,232,684,000.00		1,179,513,070.00	95.69			53,170,930.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	101,250,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00	69.14	1 Dokumen	69.14	31,250,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	589,823,000.00	1 Dokumen	572,291,573.00	97.03	1 Dokumen	97.03	17,531,427.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	541,611,000.00	8 Orang	537,221,497.00	99.19	8 Orang	99.19	4,389,503.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		2,053,120,275.00		1,980,151,903.00	96.45			72,968,372.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		1,874,368,275.00		1,822,551,951.00	97.24			51,816,324.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,446,621,000.00	1 Laporan	1,396,376,951.00	96.53			50,244,049.00	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi,	Semua Kota/Kab,	124,296,000.00		124,296,000.00	100.00			-	

		Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	303,451,275.00	51 Unit	301,879,000.00	99.48			1,572,275.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		178,752,000.00		157,599,952.00	88.17			21,152,048.00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	178,752,000.00	1 Laporan	157,599,952.00	88.17			21,152,048.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 4 (Empat) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 39,762,419,974,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 37,616,410,497,00 dengan persentase realisasi sebesar 94,60%

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.2.08.0.00.05.0000		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		67,392,567,297.00		42,354,957,536.00	62.85			25,037,609,761.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		15,971,426,046.00		13,560,921,676.00	84.91			2,410,504,370.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		415,387,000.00		363,887,000.00	87.60			51,500,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	105,721,000.00	1 Dokumen	92,221,000.00	87.23			13,500,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	40,850,000.00	1 Dokumen	35,850,000.00	87.76			5,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	40,850,000.00	1 Dokumen	35,850,000.00	87.76			5,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	40,850,000.00	1 Dokumen	35,850,000.00	87.76			5,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	40,850,000.00	1 Dokumen	35,850,000.00	87.76			5,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	146,266,000.00	1 Laporan	128,266,000.00	87.69			18,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,359,157,946.00		3,222,120,823.00	95.92			137,037,123.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,100,897,946.00	35 Orang/ Bulan	3,008,260,823.00	97.01			92,637,123.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	94,860,000.00	1 Laporan	80,860,000.00	85.24			14,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	81,700,000.00	1 Dokumen	66,500,000.00	81.40			15,200,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	81,700,000.00	1 Laporan	66,500,000.00	81.40			15,200,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1,651,706,000.00		1,324,040,711.00	80.16			327,665,289.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	415,000,000.00	1 Paket	415,000,000.00	100.00			-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	40,850,000.00	1 Dokumen	35,850,000.00	87.76			5,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	40,850,000.00	1 Dokumen	35,850,000.00	87.76			5,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	81,700,000.00	1 Dokumen	61,500,000.00	75.28			20,200,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,073,306,000.00	68 Orang	775,840,711.00	72.29			297,465,289.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		7,196,915,600.00		6,141,141,074.00	85.33			1,055,774,526.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	25,024,500.00	1 Paket	950,000.00	3.80			24,074,500.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	350,000,000.00	1 Paket	347,499,264.00	99.29			2,500,736.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	83,660,600.00	1 Paket	77,410,600.00	92.53			6,250,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,512,603,000.00	1 Paket	2,512,548,700.00	100.00			54,300.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	605,121,500.00	1 Paket	605,121,500.00	100.00			-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	56,000,000.00	1 Dokumen	53,600,000.00	95.71			2,400,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,497,140,000.00	2 Laporan	1,494,536,100.00	99.83			2,603,900.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,067,366,000.00	4 Laporan	1,049,474,910.00	50.76			1,017,891,090.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		646,604,500.00		420,000,000.00	64.95			226,604,500.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	97,500,000.00	1 Paket	-	-			97,500,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Kel/Kampung								
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	9,104,500.00	10 Unit	-	-			9,104,500.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	540,000,000.00	2 Unit	420,000,000.00	77.78			120,000,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,619,245,000.00		2,010,922,068.00	76.77			608,322,932.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	316,045,000.00	1 Laporan	316,045,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	229,660,000.00	2 Laporan	43,247,068.00	18.83			186,412,932.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,073,540,000.00	1 Laporan	1,651,630,000.00	79.65			421,910,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82,410,000.00		78,810,000.00	95.63			3,600,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	82,410,000.00	1 Unit	78,810,000.00	95.63			3,600,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1,800,000,000.00		835,351,203.00	46.41			964,648,797.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		900,000,000.00		216,334,000.00	24.04			683,666,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	900,000,000.00	40 Orang	216,334,000.00	24.04			683,666,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial

		Masyarakat Kewenangan Provinsi	Semua Kel/Kampung								
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.02.3.03	Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)		900,000,000.00		619,017,203.00	68.78			280,982,797.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.02.3.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi dan bentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	900,000,000.00	3 Lokasi	619,017,203.00	68.78			280,982,797.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		6,200,000,000.00		5,903,280,957.00	95.21			296,719,043.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti		1,243,056,000.00		1,132,862,000.00	91.14			110,194,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	743,056,000.00	600 Orang	672,662,000.00	90.53			70,394,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		4,209,472,000.00		4,060,748,957.00	96.47			148,723,043.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,865,000,000.00	200 Orang	1,818,132,000.00	97.49			46,868,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,844,472,000.00	200 Orang	1,745,712,800.00	94.65			98,759,200.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	500,000,000.00	40 Orang	496,904,157.00	99.38			3,095,843.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		747,472,000.00		709,670,000.00	94.94			37,802,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	490,528,000.00	300 Orang	470,550,000.00	95.93			19,978,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial

			Semua Kel/Kampung								
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	256,944,000.00	100 Orang	239,120,000.00	93.06			17,824,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		31,421,141,251.00		11,345,277,000.00	36.11			20,075,864,251.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		31,421,141,251.00		11,345,277,000.00	36.11			20,075,864,251.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	31,421,141,251.00	2990 Orang	11,345,277,000.00	36.11			20,075,864,251.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang terdiri dari 4 (Empat) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 67,392,567,297,00 , dan Terealisasi sebesar Rp. 42,354,957,536,00 dengan persentase realisasi sebesar 62,85%

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.3.32.3.29.06.0000		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		115,725,673,798.00		83,369,591,383.90	72.04			32,356,082,414.10	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6,574,737,175.00		5,772,460,295.00	87.80			802,276,880.00	
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*117,890,000.00*		*49,090,000.00*	*41.64*			*68,800,000.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	76,190,000.00	1 Dokumen	49,090,000.00	64.43	1 Dokumen	64.43	27,100,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	28,170,000.00	2 Dokumen	-	-			28,170,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	13,530,000.00	2 Laporan	-	-			13,530,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*3,698,049,309.00*		*3,462,076,091.00*	*93.62*			*235,973,218.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,223,039,309.00	22 Orang/ Bulan	3,127,666,091.00	97.04	22 Orang/ Bulan	97.04	95,373,218.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	446,000,000.00	1 Dokumen	314,100,000.00	70.43	1 Dokumen	70.43	131,900,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,

											Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	29,010,000.00	1 Laporan	20,310,000.00	70.01	1 Laporan	70.01	8,700,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*542,228,000.00*		*386,140,000.00*	*71.21*			*156,088,000.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	387,500,000.00	50 Paket	386,140,000.00	99.65	50 Paket	99.65	1,360,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	154,728,000.00	5 Orang	-	-			154,728,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*972,149,666.00*		*745,856,064.00*	*76.72*			*226,293,602.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	29,038,000.00	2 Paket	27,813,300.00	95.78	2 Paket	95.78	1,224,700.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	112,000,000.00	1 Paket	99,682,000.00	89.00	1 Paket	89.00	12,318,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	25,867,700.00	1 Paket	24,435,000.00	94.46	1 Paket	94.46	1,432,700.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	163,948,966.00	1 Paket	163,895,500.00	99.97	1 Paket	99.97	53,466.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	150,000,000.00	2 Paket	58,358,000.00	38.91	2 Paket	38.91	91,642,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab,	37,060,000.00	1 Laporan	11,485,800.00	30.99	1 Laporan	30.99	25,574,200.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	454,235,000.00	1 Laporan	360,186,464.00	79.30	1 Laporan	79.30	94,048,536.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*234,850,200.00*		*215,695,200.00*	*91.84*			*19,155,000.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	126,414,200.00	3 Paket	125,896,200.00	99.59	3 Paket	99.59	518,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	108,436,000.00	10 Unit	89,799,000.00	82.81	10 Unit	82.81	18,637,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*649,570,000.00*		*567,536,140.00*	*87.37*			*82,033,860.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	20,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	50.00	1 Laporan	50.00	10,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	117,130,000.00	1 Laporan	49,465,140.00	42.23	1 Laporan	42.23	67,664,860.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	512,440,000.00	1 Laporan	508,071,000.00	99.15	1 Laporan	99.15	4,369,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*360,000,000.00*		*346,066,800.00*	*96.13*			*13,933,200.00*	

2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	60,000,000.00	5 Unit	47,566,800.00	79.28	5 Unit	79.28	12,433,200.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	300,000,000.00	1 Unit	298,500,000.00	99.50	1 Unit	99.50	1,500,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		8,600,000,000.00		8,341,622,064.00	97.00			258,377,936.00	
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.03.1.01*	*Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi*		*8,600,000,000.00*		*8,341,622,064.00*	*97.00*			*258,377,936.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	8,600,000,000.00	2 Unit	8,341,622,064.00	97.00	2 Unit	97.00	258,377,936.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		12,267,806,000.00		9,271,938,250.00	75.58			2,995,867,750.00	
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.04.3.01*	*Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota*		*12,267,806,000.00*		*9,271,938,250.00*	*75.58*			*2,995,867,750.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.04.3.01.0007	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,267,806,000.00	500 Orang	9,271,938,250.00	75.58	500 Orang	75.58	2,995,867,750.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaa

											n Ekonomi Masyarakat
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		9,700,448,200.00		2,054,384,211.00	21.18			7,646,063,989.00	
2.07.3.32.3.29.06.0000	*2.07.05.1.03*	*Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)*		*9,700,448,200.00*		*2,054,384,211.00*	*21.18*			*7,646,063,989.00*	
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	344,797,000.00	1 Surat Keputusan	58,623,650.00	17.00	1 Surat Keputusan	17.00	286,173,350.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.3.32.3.29.06.0000	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	9,355,651,200.00	25000 Orang	1,995,760,561.00	21.33	25000 Orang	21.33	7,359,890,639.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1.06.2.08.0.00.05.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		441,168,000.00		111,523,000.00	25.28			329,645,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	*2.08.02.1.01*	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi*		*441,168,000.00*		*111,523,000.00*	*25.28*			*329,645,000.00*	
1.06.2.08.0.00.05.0000	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		441,168,000.00		111,523,000.00	25.28			329,645,000.00	

1.06.2.08.0.00.05.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		550,000,000.00		117,321,000.00	21.33			432,679,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	*2.08.03.1.01*	*Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*		*550,000,000.00*		*117,321,000.00*	*21.33*			*432,679,000.00*	
1.06.2.08.0.00.05.0000	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		550,000,000.00		117,321,000.00	21.33			432,679,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		10,358,832,000.00		10,147,590,700.00	97.96			211,241,300.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	*2.08.05.1.01*	*Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi*		*10,358,832,000.00*		*10,147,590,700.00*	*97.96*			*211,241,300.00*	
1.06.2.08.0.00.05.0000	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		10,358,832,000.00		10,147,590,700.00	97.96			211,241,300.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		650,000,000.00		333,692,000.00	51.34			316,308,000.00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	*2.08.06.1.01*	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi*		*650,000,000.00*		*333,692,000.00*	*51.34*			*316,308,000.00*	
1.06.2.08.0.00.05.0000	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		650,000,000.00		333,692,000.00	51.34			316,308,000.00	

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari 8 (Delapan) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan, dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 115,725,673,798,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 83,369,591,383.9 dengan persentase realisasi sebesar 72,04%

DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.3.27.3.25.07.0000		DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN		147,007,605,695.00		87,536,174,472.00	59.55			59,471,431,223.00	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		12,789,686,276.00		10,367,390,831.00	81.06			2,422,295,445.00	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		685,130,400.00		417,518,820.00	60.94			267,611,580.00	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	226,314,000.00	1 Dokumen	143,826,620.00	63.55	1 Dokumen	63.55	82,487,380.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	149,910,800.00	1 Dokumen	96,256,800.00	64.21	1 Dokumen	64.21	53,654,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	24,024,300.00	1 Dokumen	17,455,200.00	72.66	1 Dokumen	72.66	6,569,100.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	69,177,200.00	1 Laporan	53,189,200.00	76.89	1 Laporan	76.89	15,988,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	215,704,100.00	1 Laporan	106,791,000.00	49.51	1 Laporan	49.51	108,913,100.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	*2.09.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*7,470,788,385.00*		*6,808,908,347.00*	*91.14*			*661,880,038.00*	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,410,324,985.00	60 Orang/ Bulan	6,768,544,347.00	91.34	60 Orang/ Bulan	91.34	641,780,638.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	27,701,200.00	1 Laporan	17,605,000.00	63.55	1 Laporan	63.55	10,096,200.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	32,762,200.00	1 Laporan	22,759,000.00	69.47	1 Laporan	69.47	10,003,200.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	*2.09.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*1,103,325,495.00*		*706,838,450.00*	*64.06*			*396,487,045.00*	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	119,229,600.00	1 Dokumen	92,850,000.00	77.87	1 Dokumen	77.87	26,379,600.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	120,781,500.00	1 Dokumen	89,414,400.00	74.03	1 Dokumen	74.03	31,367,100.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	863,314,395.00	20 Orang	524,574,050.00	60.76	20 Orang	60.76	338,740,345.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

		Tugas dan Fungsi	Semua Kel/Kampung								
2.09.3.27.3.25.07.0000	*2.09.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*1,643,769,996.00*		*1,292,843,635.00*	*78.65*			*350,926,361.00*	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,934,896.00	1 Paket	3,615,000.00	60.91	1 Paket	60.91	2,319,896.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	185,668,100.00	1 Paket	179,041,700.00	96.43	1 Paket	96.43	6,626,400.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	121,073,000.00	1 Paket	4,047,000.00	3.34	1 Paket	3.34	117,026,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	73,422,000.00	1 Paket	68,380,500.00	93.13	1 Paket	93.13	5,041,500.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	163,114,000.00	1 Laporan	163,062,400.00	99.97	1 Laporan	99.97	51,600.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,094,558,000.00	1 Laporan	874,697,035.00	79.91	1 Laporan	79.91	219,860,965.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	*2.09.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*465,000,000.00*		*144,008,000.00*	*30.97*			*320,992,000.00*	

2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	465,000,000.00	20 Unit	144,008,000.00	30.97	20 Unit	30.97	320,992,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.09.3.27.3.25.07.0000	*2.09.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*1,093,150,000.00*		*778,578,557.00*	*71.22*			*314,571,443.00*	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	15,000,000.00	1 Laporan	-	-	1 Laporan	-	15,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	73,750,000.00	1 Laporan	42,018,557.00	56.97	1 Laporan	56.97	31,731,443.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,004,400,000.00	1 Laporan	736,560,000.00	73.33	1 Laporan	73.33	267,840,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		328,522,000.00		218,695,022.00	66.57			109,826,978.00	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	110,610,000.00	1 Unit	12,231,361.00	11.06	1 Unit	11.06	98,378,639.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Kel/Kampung								
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	217,912,000.00	3 Unit	206,463,661.00	94.75	3 Unit	94.75	11,448,339.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Alokasi Umum (DAU)
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		16,787,222,100.00		14,930,556,523.00	88.94			1,856,665,577.00	
2.09.3.27.3.25.07.0000	*2.09.03.1.01*	*Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*		*16,663,424,100.00*		*14,884,118,723.00*	*89.32*			*1,779,305,377.00*	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,596,710,000.00	3 Unit	454,656,900.00	28.47	3 Unit	28.47	1,142,053,100.00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,806,096,000.00	1 Dokumen	5,439,440,416.00	93.68	1 Dokumen	93.68	366,655,584.00	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha	Semua Kota/Kab,	9,260,618,100.00	1 Laporan	8,990,021,407.00	97.08	1 Laporan	97.08	270,596,693.00	Dana Otonomi

		Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.09.3.27.3.25.07.0000	*2.09.03.1.03*	*Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*		*123,798,000.00*		*46,437,800.00*	*37.51*			*77,360,200.00*	
2.09.3.27.3.25.07.0000	2.09.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	123,798,000.00	1 Laporan	46,437,800.00	37.51	1 Laporan	37.51	77,360,200.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang terdiri dari 2 (Dua) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 147,007,605,695 dan Terealisasi sebesar Rp. 87,536,174,472 dengan persentase realisasi sebesar 59,55%

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI		SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA	%	SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN	HASIL KINERJA		%			
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*11*	*12*	*12*
2.11.3.28.2.10.08.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN		82,340,880,735.00		75,649,045,792.34	91.87				6,691,834,942.66	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		125,609,200.00		60,310,000.00	48.01				65,299,200.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.10.03.3.01*	*Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi*		*125,609,200.00*		*60,310,000.00*	*48.01*				*65,299,200.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.10.03.3.01.0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	125,609,200.00	1 Dokumen	60,310,000.00	48.01	1 Dokumen		48.01	65,299,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		1,073,389,700.00		1,051,433,850.00	97.95				21,955,850.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.10.05.1.01*	*Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah*		*1,073,389,700.00*		*1,051,433,850.00*	*97.95*				*21,955,850.00*	

		untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1,073,389,700.00		1,051,433,850.00	97.95			21,955,850.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		440,750,000.00		277,801,960.00	63.03			162,948,040.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.10.10.1.01*	*Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*		*440,750,000.00*		*277,801,960.00*	*63.03*			*162,948,040.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	440,750,000.00	1 Laporan	277,801,960.00	63.03	1 Laporan	63.03	162,948,040.00	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH)
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		3,910,278,000.00		3,598,086,881.00	92.02			312,191,119.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.01.1.03*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*767,194,000.00*		*759,925,200.00*	*99.05*			*7,268,800.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	767,194,000.00	1 Laporan	759,925,200.00	99.05	1 Laporan	99.05	7,268,800.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*234,500,000.00*		*200,530,000.00*	*85.51*			*33,970,000.00*	

2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	234,500,000.00	5 Orang	200,530,000.00	85.51	5 Orang	85.51	33,970,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*1,969,501,000.00*		*1,941,729,368.00*	*98.59*			*27,771,632.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	250,000,000.00	1 Paket	244,984,300.00	97.99	1 Paket	97.99	5,015,700.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	1,719,501,000.00	1 Laporan	1,696,745,068.00	98.68	1 Laporan	98.68	22,755,932.00	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*145,000,000.00*		*144,913,015.00*	*99.94*			*86,985.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	145,000,000.00	1 Laporan	144,913,015.00	99.94	1 Laporan	99.94	86,985.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*794,083,000.00*		*550,989,298.00*	*69.39*			*243,093,702.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	794,083,000.00	6 Unit	550,989,298.00	69.39	6 Unit	69.39	243,093,702.00	Pajak Air Permukaan
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		2,147,135,000.00		2,031,281,407.00	94.60			115,853,593.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.02.1.02*	*Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup*		*2,147,135,000.00*		*2,031,281,407.00*	*94.60*			*115,853,593.00*	

		Strategis (KLHS) Provinsi									
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	2,147,135,000.00	2 Dokumen	2,031,281,407.00	94.60	2 Dokumen	94.60	115,853,593.00	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH)
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		985,878,000.00		978,079,885.00	99.21			7,798,115.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.03.1.01*	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup*		*985,878,000.00*		*978,079,885.00*	*99.21*			*7,798,115.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		985,878,000.00		978,079,885.00	99.21	-	99.21	7,798,115.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		781,832,800.00		736,944,305.00	94.26			44,888,495.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.04.1.01*	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi*		*781,832,800.00*		*736,944,305.00*	*94.26*			*44,888,495.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	781,832,800.00	1 Unit	736,944,305.00	94.26	1 Unit	94.26	44,888,495.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan

2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		37,381,697,380.00		33,349,353,369.00	89.21			4,032,344,011.00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	*2.11.11.1.01*	*Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional*		*37,381,697,380.00*		*33,349,353,369.00*	*89.21*			*4,032,344,011.00*	
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	1,910,632,780.00	26 Unit	1,351,630,480.00	70.74	26 Unit	70.74	559,002,300.00	Pajak Air Permukaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	23,286,480,600.00	42 Unit	22,275,996,759.00	95.66	42 Unit	95.66	1,010,483,841.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
2.11.3.28.2.10.08.0000	2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik Semua Kel/Kampung	12,184,584,000.00	1000 Ton	9,721,726,130.00	79.79	1000 Ton	79.79	2,462,857,870.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang terdiri dari 8 (Delapan) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Lingkungan

Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 82,340,880,735 dan Terealisasi sebesar Rp. 75,649,045,792.34 dengan persentase realisasi sebesar 91,87%

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.12.2.13.0.00.09.0000		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		15,930,718,009.00		13,141,635,016.00	82.49			2,789,082,993.00	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		5,317,857,009.00		4,957,201,696.00	93.22			360,655,313.00	
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.12.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*199,200,000.00*		*199,032,000.00*	*99.92*			*168,000.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,800,000.00	1 Dokumen	49,758,000.00	99.92	1 Dokumen	99.92	42,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,800,000.00	1 Dokumen	49,758,000.00	99.92	1 Dokumen	99.92	42,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,800,000.00	1 Dokumen	49,758,000.00	99.92	1 Dokumen	99.92	42,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,800,000.00	1 Laporan	49,758,000.00	99.92	1 Laporan	99.92	42,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.12.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*3,125,866,009.00*		*2,969,947,278.00*	*95.01*			*155,918,731.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	3,125,866,009.00	36 Orang/ Bulan	2,969,947,278.00	95.01	36 Orang/ Bulan	95.01	155,918,731.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Kel/Kampung								
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.12.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*1,506,450,000.00*		*1,361,862,041.00*	*90.40*			*144,587,959.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	10,726,000.00	1 paket	5,358,200.00	49.96	1 paket	49.96	5,367,800.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	78,849,000.00	1 paket	77,819,500.00	98.69	1 paket	98.69	1,029,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	40,000,000.00	1 paket	-	-	1 paket	-	40,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	86,353,000.00	1 paket	86,352,700.00	100.00	1 paket	100.00	300.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	29,800,000.00	1 Dokumen	20,400,000.00	68.46	1 Dokumen	68.46	9,400,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	740,864,000.00	1 Laporan	739,107,500.00	99.76	1 Laporan	99.76	1,756,500.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	519,858,000.00	1 Laporan	432,824,141.00	83.26	1 Laporan	83.26	87,033,859.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.12.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*270,841,000.00*		*270,000,000.00*	*99.69*			*841,000.00*	

2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	242,000.00	1 paket	-	-	1 paket	-	242,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	599,000.00	10 Unit	-	-	10 Unit	-	599,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	270,000,000.00	1 Unit	270,000,000.00	100.00	1 Unit	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.12.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*215,500,000.00*		*156,360,377.00*	*72.56*			*59,139,623.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	90,000,000.00	1 Laporan	90,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	125,500,000.00	1 Laporan	66,360,377.00	52.88	1 Laporan	52.88	59,139,623.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		3,904,283,000.00		3,035,210,900.00	77.74			869,072,100.00	
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.12.04.1.02*	*Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*		*3,904,283,000.00*		*3,035,210,900.00*	*77.74*			*869,072,100.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,061,565,000.00	1 Laporan	1,516,481,000.00	73.56	1 Laporan	73.56	545,084,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi	Semua Kota/Kab,	1,842,718,000.00	1 Laporan	1,518,729,900.00	82.42	1 Laporan	82.42	323,988,100.00	Dana Otonomi Khusus 1%-

		Administrasi Kependudukan	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								Papua-Administrasi Pemerintahan
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		2,786,056,000.00		2,304,171,320.00	82.70			481,884,680.00	
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.12.05.1.01*	*Penyediaan Profil Kependudukan*		*2,500,000,000.00*		*2,076,415,320.00*	*83.06*			*423,584,680.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,500,000,000.00	1 Dokumen	2,076,415,320.00	83.06	1 Dokumen	83.06	423,584,680.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.12.05.3.01*	*Penyediaan Profil Kependudukan*		*286,056,000.00*		*227,756,000.00*	*79.62*			*58,300,000.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.12.05.3.01.0003	Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	286,056,000.00	1 Dokumen	227,756,000.00	79.62	1 Dokumen	79.62	58,300,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		49,800,000.00		-	-			49,800,000.00	
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.13.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*49,800,000.00*		-	-			*49,800,000.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,800,000.00	0 Laporan	-	-			49,800,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.13.08	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA		3,872,722,000.00		2,845,051,100.00	73.46			1,027,670,900.00	
2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.13.08.3.01*	*Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua*		*1,911,696,000.00*		*1,466,783,500.00*	*76.73*			*444,912,500.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.13.08.3.01.0012	Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,911,696,000.00		1,466,783,500.00	76.73			444,912,500.00	

2.12.2.13.0.00.09.0000	*2.13.08.3.02*	*Pemberdayaan Orang Asli Papua*		*1,961,026,000.00*		*1,378,267,600.00*	*70.28*			*582,758,400.00*	
2.12.2.13.0.00.09.0000	2.13.08.3.02.0001	Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,961,026,000.00		1,378,267,600.00	70.28			582,758,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
1.02.2.14.0.00.02.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		478,586,000.00		383,407,680.00	80.11			95,178,320.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	*2.14.02.1.01*	*Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*		*478,586,000.00*		*383,407,680.00*	*80.11*			*95,178,320.00*	
1.02.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi		478,586,000.00		383,407,680.00	80.11			95,178,320.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		757,888,000.00		218,612,710.00	28.84			539,275,290.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	*2.14.03.1.01*	*Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal*		*757,888,000.00*		*218,612,710.00*	*28.84*			*539,275,290.00*	
1.02.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal		757,888,000.00		218,612,710.00	28.84			539,275,290.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1,700,006,600.00		867,357,709.00	51.02			832,648,891.00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	*2.14.04.1.01*	*Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan*		*1,700,006,600.00*		*867,357,709.00*	*51.02*			*832,648,891.00*	

		dan Kesejahteraan Keluarga									
1.02.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		1,700,006,600.00		867,357,709.00	51.02			832,648,891.00	

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung yang terdiri dari 8 (Delapan) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan, dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15,930,718,009,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 13,141,635,016,00 dengan persentase realisasi sebesar 82,49%.

DINAS PERHUBUNGAN

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.0.00.0.00.10.0000		DINAS PERHUBUNGAN		84,326,632,443.00		81,395,971,995.00	96.52			2,930,660,448.00	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		14,352,626,641.00		14,133,891,619.00	98.48			218,735,022.00	
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*300,000,000.00*		*300,000,000.00*	*100.00*			-	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)

2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*2,747,730,341.00*		*2,668,512,661.00*	*97.12*			*79,217,680.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,597,730,341.00	30 Orang/bulan	2,518,512,661.00	96.95	30 Orang/bulan	96.95	79,217,680.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	75,000,000.00	1 Laporan	75,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	75,000,000.00	1 Laporan	75,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.01.1.03*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*50,000,000.00*		*50,000,000.00*	*100.00*			-	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*682,920,000.00*		*676,676,116.00*	*99.09*			*6,243,884.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	286,500,000.00	1 Paket	286,500,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	75,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	321,420,000.00	20 Orang	315,176,116.00	98.06	20 Orang	98.06	6,243,884.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*6,255,836,500.00*		*6,228,337,961.00*	*99.56*			*27,498,539.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	626,641,000.00	2 Paket	626,641,000.00	100.00	2 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,524,760,000.00	1 Paket	1,524,752,500.00	100.00	1 Paket	100.00	7,500.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	210,697,000.00	1 Paket	210,697,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	559,341,500.00	4 Laporan	559,328,100.00	100.00	4 Laporan	100.00	13,400.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,334,397,000.00	4 Laporan	3,306,919,361.00	99.18	4 Laporan	99.18	27,477,639.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*625,409,600.00*		*625,409,600.00*	*100.00*			-	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	570,000,000.00	13 Unit	570,000,000.00	100.00			-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab,	55,409,600.00	22 Unit	55,409,600.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*3,640,730,200.00*		*3,534,955,281.00*	*97.09*			*105,774,919.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	217,934,000.00	10	217,934,000.00	100.00	10	100.00	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	304,612,200.00	1 Laporan	279,367,381.00	91.71	1 Laporan	91.71	25,244,819.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,118,184,000.00	1 Laporan	3,037,653,900.00	97.42	1 Laporan	97.42	80,530,100.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*50,000,000.00*		*50,000,000.00*	*100.00*			-	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	0 Unit	50,000,000.00	100.00			-	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		16,887,021,000.00		16,668,873,192.00	98.71			218,147,808.00	
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.02.1.02*	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi*		*14,153,171,000.00*		*13,939,477,678.00*	*98.49*			*213,693,322.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	11,017,341,000.00	831 Unit	10,813,146,178.00	98.15	831 Unit	98.15	204,194,822.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum

			Semua Kel/Kampung								Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,289,000,000.00	42 Unit	2,280,271,500.00	99.62	42 Unit	99.62	8,728,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH), DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	846,830,000.00	359 Unit	846,060,000.00	99.91	359 Unit	99.91	770,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.02.1.05*	*Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi*		*2,733,850,000.00*		*2,729,395,514.00*	*99.84*			*4,454,486.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,733,850,000.00	637 Unit	2,729,395,514.00	99.84	637 Unit	99.84	4,454,486.00	Dana Bagi Hasil (DBH), DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		15,176,398,000.00		13,466,525,102.00	88.73			1,709,872,898.00	
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.03.1.09*	*Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional*		*8,192,398,000.00*		*7,945,648,433.00*	*96.99*			*246,749,567.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	8,192,398,000.00	2 Unit	7,945,648,433.00	96.99	2 Unit	96.99	246,749,567.00	Dana Bagi Hasil (DBH), DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.03.1.10*	*Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*		*6,984,000,000.00*		*5,520,876,669.00*	*79.05*			*1,463,123,331.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		6,984,000,000.00		5,520,876,669.00	79.05			1,463,123,331.00	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		37,910,586,802.00		37,126,682,082.00	97.93			783,904,720.00	
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.04.3.01*	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi*		*10,924,496,802.00*		*10,830,473,117.00*	*99.14*			*94,023,685.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.04.3.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	10,924,496,802.00	301 Unit	10,830,473,117.00	99.14	301 Unit	99.14	94,023,685.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.0.00.0.00.10.0000	*2.15.04.3.02*	*Pembangunan Bandar Udara*		*26,986,090,000.00*		*26,296,208,965.00*	*97.44*			*689,881,035.00*	
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.04.3.02.0002	Pembangunan Bandar Udara	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,938,470,000.00	1 Unit	2,736,428,478.00	93.12	1 Unit	93.12	202,041,522.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.15.0.00.0.00.10.0000	2.15.04.3.02.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	24,047,620,000.00	5 Unit/Paket	23,559,780,487.00	97.97	5 Unit/Paket	97.97	487,839,513.00	Dana Bagi Hasil (DBH), DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang terdiri dari 4 (Empat) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan, dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 84.326,632,443,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 81.395,971,995 dengan presentase realisasi sebesar 96,52%.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.2.21.2.20.11.0000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		36,830,064,024.00		23,912,222,858.00	64.93			12,917,841,166.00	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		6,284,208,524.00		4,891,710,817.00	77.84			1,392,497,707.00	
2.16.2.21.2.20.11.0000	*2.16.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*485,464,000.00*		*226,441,675.00*	*46.64*			*259,022,325.00*	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	53,470,000.00	1 Dokumen	16,400,000.00	30.67	1 Dokumen	30.67	37,070,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	53,470,000.00	1 Dokumen	49,200,000.00	92.01	1 Dokumen	92.01	4,270,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	53,470,000.00	2 Dokumen	49,200,000.00	92.01	2 Dokumen	92.01	4,270,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	75,506,000.00		49,200,000.00	65.16	-	65.16	26,306,000.00	

2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.01.0008	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	246,841,000.00	22 Data	62,441,675.00	25.30	22 Data	25.30	184,399,325.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	*2.16.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*2,867,159,024.00*		*2,786,152,673.00*	*97.17*			*81,006,351.00*	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,768,759,024.00	18 Orang/ Bulan	2,720,552,673.00	98.26	18 Orang/ Bulan	98.26	48,206,351.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,200,000.00	4 Laporan	16,400,000.00	33.33	4 Laporan	33.33	32,800,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,200,000.00	1 Laporan	49,200,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	*2.16.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*1,322,887,500.00*		*656,609,403.00*	*49.63*			*666,278,097.00*	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	128,740,000.00	12 Paket	8,642,500.00	6.71	12 Paket	6.71	120,097,500.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	124,300,000.00	4 Paket	124,300,000.00	100.00	4 Paket	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	150,024,500.00	4 Paket	130,225,500.00	86.80	4 Paket	86.80	19,799,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	299,236,000.00	12 Laporan	161,291,403.00	53.90	12 Laporan	53.90	137,944,597.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	620,587,000.00	3 Laporan	232,150,000.00	37.41	3 Laporan	37.41	388,437,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH),

		Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kel/Kampung								Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	*2.16.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*532,000,000.00*		*532,000,000.00*	*100.00*			-	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	532,000,000.00	8 Unit	532,000,000.00	100.00	8 Unit	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.16.2.21.2.20.11.0000	*2.16.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*1,076,698,000.00*		*690,507,066.00*	*64.13*			*386,190,934.00*	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	363,816,000.00	1 Laporan	138,289,066.00	38.01	1 Laporan	38.01	225,526,934.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	712,882,000.00	2 Laporan	552,218,000.00	77.46	2 Laporan	77.46	160,664,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1,295,397,200.00		816,925,956.00	63.06			478,471,244.00	
2.16.2.21.2.20.11.0000	*2.16.02.1.01*	*Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi*		*1,295,397,200.00*		*816,925,956.00*	*63.06*			*478,471,244.00*	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	143,227,200.00	100 Konten	114,948,456.00	80.26	100 Konten	80.26	28,278,744.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	797,010,000.00	15 Permohonan	360,000,000.00	45.17	15 Permohonan	45.17	437,010,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	355,160,000.00	1 Media	341,977,500.00	96.29	1 Media	96.29	13,182,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		26,744,649,000.00		15,884,239,300.00	59.39			10,860,409,700.00	
2.16.2.21.2.20.11.0000	*2.16.03.1.01*	*Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*		*91,000,000.00*		*80,000,000.00*	*87.91*			*11,000,000.00*	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	91,000,000.00	4 Dokumen	80,000,000.00	87.91	4 Dokumen	87.91	11,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.16.2.21.2.20.11.0000	*2.16.03.1.02*	*Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi*		*26,653,649,000.00*		*15,804,239,300.00*	*59.29*			*10,849,409,700.00*	
2.16.2.21.2.20.11.0000	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	26,653,649,000.00	70 perangkat daerah	15,804,239,300.00	59.29	70 perangkat daerah	59.29	10,849,409,700.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi, DTI-Papua-Telekomunikasi

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang terdiri dari 3 (Tiga) Program, 8 (Delapan) Kegiatan, dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 36.830,064,024,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 23.912,222,858,00 dengan persentase realisasi sebesar 64,93%.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17.3.31.3.30.12.0000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN		113,005,162,743.00		64,690,143,954.00	57.25			48,315,018,789.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		9,309,229,454.00		8,539,894,538.00	91.74			769,334,916.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*244,069,600.00*		*93,494,000.00*	*38.31*			*150,575,600.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	47,027,700.00	5 Dokumen	25,040,000.00	53.25	5 Dokumen	53.25	21,987,700.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	82,983,600.00	5 Dokumen	16,108,000.00	19.41	5 Dokumen	19.41	66,875,600.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	114,058,300.00	5 Laporan	52,346,000.00	45.89	5 Laporan	45.89	61,712,300.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*3,492,761,151.00*		*3,468,391,632.00*	*99.30*			*24,369,519.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,296,767,551.00	27 Orang/ Bulan	3,276,790,232.00	99.39	27 Orang/ Bulan	99.39	19,977,319.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	97,208,300.00	3 Laporan	93,816,100.00	96.51	3 Laporan	96.51	3,392,200.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

			Semua Kel/Kampung								(BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	98,785,300.00	5 Laporan	97,785,300.00	98.99	5 Laporan	98.99	1,000,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*257,750,000.00*		*207,750,000.00*	*80.60*			*50,000,000.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	257,750,000.00	45 Paket	207,750,000.00	80.60	45 Paket	80.60	50,000,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*4,353,865,033.00*		*3,898,898,906.00*	*89.55*			*454,966,127.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	405,465,800.00	3 Paket	405,460,800.00	100.00	3 Paket	100.00	5,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	164,279,443.00	5 Paket	164,279,443.00	100.00	5 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	882,000,000.00	1 Paket	701,280,000.00	79.51	1 Paket	79.51	180,720,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua	301,984,890.00	1 Paket	301,878,000.00	99.96	1 Paket	99.96	106,890.00	Bea Balik Nama Kendaraan

			Distrik, Semua Kel/Kampung								Bermotor (BBNKB), Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	102,400,000.00	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	-	102,400,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	976,580,900.00	25 Laporan	971,418,000.00	99.47	25 Laporan	99.47	5,162,900.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,521,154,000.00	5 Laporan	1,354,582,663.00	89.05	5 Laporan	89.05	166,571,337.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Alokasi Umum (DAU)

2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*191,670,900.00*		*191,670,000.00*	*100.00*			*900.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	191,670,900.00	3 Paket	191,670,000.00	100.00	3 Paket	100.00	900.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*609,642,770.00*		*523,820,000.00*	*85.92*			*85,822,770.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	50 Laporan	50,000,000.00	100.00	50 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	65,002,770.00	0 Laporan	-	-	0 Laporan	-	65,002,770.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	494,640,000.00	5 Laporan	473,820,000.00	95.79	5 Laporan	95.79	20,820,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*159,470,000.00*		*155,870,000.00*	*97.74*			*3,600,000.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	159,470,000.00	10 Unit	155,870,000.00	97.74	10 Unit	97.74	3,600,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		43,800,000.00		8,528,500.00	19.47			35,271,500.00	

2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.02.1.01*	*Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*		*14,940,000.00*		-	-			*14,940,000.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		14,940,000.00		-	-			14,940,000.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.02.1.02*	*Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*		*28,860,000.00*		*8,528,500.00*	*29.55*			*20,331,500.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		28,860,000.00		8,528,500.00	29.55			20,331,500.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		745,320,000.00		40,874,068.00	5.48			704,445,932.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.04.1.01*	*Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*		*745,320,000.00*		*40,874,068.00*	*5.48*			*704,445,932.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko,	Semua Kota/Kab, Semua	745,320,000.00	100 Unit Usaha	40,874,068.00	5.48	100 Unit Usaha	5.48	704,445,932.00	Bea Balik Nama Kendaraan

		Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Distrik, Semua Kel/Kampung								Bermotor (BBNKB)
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		18,116,525,000.00		13,500,000,000.00	74.52			4,616,525,000.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.05.1.01*	*Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*		*18,116,525,000.00*		*13,500,000,000.00*	*74.52*			*4,616,525,000.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		18,116,525,000.00		13,500,000,000.00	74.52			4,616,525,000.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		3,358,013,789.00		96,880,000.00	2.89			3,261,133,789.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.06.1.01*	*Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*		*3,358,013,789.00*		*96,880,000.00*	*2.89*			*3,261,133,789.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		848,606,000.00		-	-			848,606,000.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi		2,509,407,789.00		96,880,000.00	3.86			2,412,527,789.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA		63,710,894,500.00		28,584,372,332.00	44.87			35,126,522,168.00	

		KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.07.1.01*	*Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan*		*63,710,894,500.00*		*28,584,372,332.00*	*44.87*			*35,126,522,168.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	40,000,000,000.00	30 Orang	26,800,000,000.00	67.00	30 Orang	67.00	13,200,000,000.00	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	20,949,164,000.00	0 Unit Usaha	175,666,393.00	0.84	0 Unit Usaha	0.84	20,773,497,607.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		2,761,730,500.00		1,608,705,939.00	58.25			1,153,024,561.00	

2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		3,490,085,000.00		-	-			3,490,085,000.00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	*2.17.08.1.01*	*Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah*		*3,490,085,000.00*		-	-			*3,490,085,000.00*	
2.17.3.31.3.30.12.0000	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,490,085,000.00	300 Unit Usaha	-	-	300 Unit Usaha	-	3,490,085,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang terdiri dari 7 (Tujuh) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 113.005,162,743,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 64.690,143,954,00 dengan persentase realisasi sebesar 57,25%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.0.00.0.00.13.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		15,982,247,497.00		15,786,062,470.28	98.77			196,185,026.72	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		14,269,179,097.00		14,096,292,735.28	98.79			172,886,361.72	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49,386,000.00		49,386,000.00	100.00			-	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,219,500.00	1 Dokumen	12,219,500.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,219,500.00	1 Dokumen	12,219,500.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,323,500.00	1 Laporan	12,323,500.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,623,500.00	1 Laporan	12,623,500.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,614,526,962.00		5,541,153,093.00	98.69			73,373,869.00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,262,176,462.00	20 Orang/ Bulan	2,189,802,593.00	96.80	20 Orang/ Bulan	96.80	72,373,869.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua	3,326,860,000.00	1 Dokumen	3,325,860,000.00	99.97	1 Dokumen	99.97	1,000,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan

			Distrik, Semua Kel/Kampung								Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,023,500.00	1 Laporan	12,023,500.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	13,467,000.00	1 Laporan	13,467,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2,027,608,200.00		1,967,370,853.00	97.03			60,237,347.00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	465,091,200.00	1 Paket	464,753,856.00	99.93	1 Paket	99.93	337,344.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,562,517,000.00	39 Orang	1,502,616,997.00	96.17	39 Orang	96.17	59,900,003.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	*2.18.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*3,838,290,635.00*		*3,837,022,026.00*	*99.97*			*1,268,609.00*	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	47,352,000.00	1 Paket	47,352,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	716,306,200.00	1 Paket	715,803,172.00	99.93	1 Paket	99.93	503,028.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

			Semua Kel/Kampung								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	71,629,035.00	1 Paket	71,629,035.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	381,225,000.00	1 Paket	381,225,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	289,420,800.00	1 Paket	289,420,800.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	75,800,000.00	1 Dokumen	75,496,000.00	99.60	1 Dokumen	99.60	304,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	721,730,600.00	1 Laporan	721,347,562.00	99.95	1 Laporan	99.95	383,038.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih

											Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,534,827,000.00	1 Laporan	1,534,748,457.00	99.99	1 Laporan	99.99	78,543.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	*2.18.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*1,935,281,300.00*		*1,934,080,432.00*	*99.94*			*1,200,868.00*	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	366,484,800.00	1 Paket	366,478,112.00	100.00	1 Paket	100.00	6,688.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,568,796,500.00	227 Unit	1,567,602,320.00	99.92	227 Unit	99.92	1,194,180.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	*2.18.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*486,331,000.00*		*450,615,000.00*	*92.66*			*35,716,000.00*	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	70,810,000.00	1 Laporan	70,810,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua	45,565,000.00	1 Laporan	34,121,000.00	74.88	1 Laporan	74.88	11,444,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Distrik, Semua Kel/Kampung								
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	369,956,000.00	1 Laporan	345,684,000.00	93.44	1 Laporan	93.44	24,272,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		317,755,000.00		316,665,331.28	99.66			1,089,668.72	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	42,530,000.00	1 Unit	42,146,510.00	99.10	1 Unit	99.10	383,490.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	46,700,000.00	20 Unit	46,680,000.00	99.96	20 Unit	99.96	20,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	228,525,000.00	1 Unit	227,838,821.28	99.70	1 Unit	99.70	686,178.72	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		641,590,600.00		639,671,000.00	99.70			1,919,600.00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		641,590,600.00		639,671,000.00	99.70	-	99.70	1,919,600.00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		641,590,600.00		639,671,000.00	99.70	-	99.70	1,919,600.00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		1,071,477,800.00		1,050,098,735.00	98.00			21,379,065.00	

2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1,071,477,800.00		1,050,098,735.00	98.00			21,379,065.00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	392,774,800.00	15 Kegiatan usaha	392,517,070.00	99.93	15 Kegiatan usaha	99.93	257,730.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
2.18.0.00.0.00.13.0000	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	678,703,000.00	300 Pelaku Usaha	657,581,665.00	96.89	300 Pelaku Usaha	96.89	21,121,335.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari 3 (Tiga) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.982,247,497,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 15.7860,62470,28, dengan presentase realisasi sebesar 98,77%.

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.19.3.26.0.00.14.0000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA		88,463,855,474.00		50,385,576,280.11	56.96			38,078,279,193.89	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		9,814,839,502.00		7,493,739,731.00	76.35			2,321,099,771.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*143,511,000.00*		*81,370,000.00*	*56.70*			*62,141,000.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	45,029,000.00	1 Dokumen	29,820,000.00	66.22	1 Dokumen	100.00	15,209,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	48,098,000.00	1 Dokumen	18,950,000.00	39.40	1 Dokumen	100.00	29,148,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,384,000.00	1 Laporan	32,600,000.00	64.70	1 Laporan	100.00	17,784,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*3,428,236,016.00*		*3,087,145,543.00*	*90.05*			*341,090,473.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	2,731,378,016.00	39 Orang/ Bulan	2,651,889,543.00	97.09	39 Orang/ Bulan	100.00	79,488,473.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Kel/Kampung								
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	648,260,000.00	1 Dokumen	412,748,000.00	63.67	1 Dokumen	100.00	235,512,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	48,598,000.00	1 Dokumen	22,508,000.00	46.31	1 Dokumen	100.00	26,090,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*797,048,000.00*		*154,080,000.00*	*19.33*			*642,968,000.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	154,080,000.00	50 Orang	154,080,000.00	100.00	50 Orang	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	642,968,000.00	40 Orang	-	-	40 Orang	-	642,968,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*4,227,480,895.00*		*3,048,077,788.00*	*72.10*			*1,179,403,107.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	537,124,875.00	10 Orang	527,854,600.00	98.27	10 Orang	100.00	9,270,275.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	30,773,000.00	1 Paket	12,285,000.00	39.92	1 Paket	100.00	18,488,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	593,700,000.00	1 Paket	553,669,000.00	93.26	1 Paket	73.04	40,031,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,

											Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	51,827,220.00	1 Paket	51,200,000.00	98.79	1 Paket	100.00	627,220.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,000,000.00	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	12,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,063,478,800.00	1 Laporan	916,098,400.00	86.14	1 Laporan	86.14	147,380,400.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,938,577,000.00	1 Laporan	986,970,788.00	50.91	1 Laporan	50.91	951,606,212.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*4,432,646.00*		*4,430,000.00*	*99.94*			*2,646.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,432,646.00	16 Unit	4,430,000.00	99.94	16 Unit	100.00	2,646.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan*		*1,137,489,345.00*		*1,068,648,000.00*	*93.95*			*68,841,345.00*	

		Pemerintahan Daerah									
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Laporan	50,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	43,873,345.00	1 Laporan	24,000,000.00	54.70	1 Laporan	100.00	19,873,345.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,043,616,000.00	1 Laporan	994,648,000.00	95.31	1 Laporan	100.00	48,968,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*76,641,600.00*		*49,988,400.00*	*65.22*			*26,653,200.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	76,641,600.00	16 Unit	49,988,400.00	65.22	16 Unit	100.00	26,653,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		13,017,861,262.00		6,894,716,671.00	52.96			6,123,144,591.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.02.1.01*	*Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi*		*12,279,276,262.00*		*6,822,716,671.00*	*55.56*			*5,456,559,591.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Semua Kota/Kab,	1,451,444,000.00	240 Orang	1,131,569,000.00	77.96	240 Orang	100.00	319,875,000.00	Sumbangan Pihak

		Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	823,680,400.00	1 Dokumen	444,341,471.00	53.95	1 Dokumen	100.00	379,338,929.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,482,390,200.00	100 Persentase	4,592,906,200.00	83.78	100 Persentase	100.00	889,484,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,536,260,662.00	150 Orang	653,900,000.00	25.78	150 Orang	60.76	1,882,360,662.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas

											Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,985,501,000.00	200 Orang	-	-	200 Orang	100.00	1,985,501,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.02.1.02*	*Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi*		*738,585,000.00*		*72,000,000.00*	*9.75*			*666,585,000.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		738,585,000.00	50 Organisasi	72,000,000.00	9.75	50 Organisasi	100.00	666,585,000.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		39,886,868,020.00		25,169,864,944.11	63.10			14,717,003,075.89	
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.03.1.01*	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi*		*3,351,299,000.00*		*2,574,804,836.00*	*76.83*			*776,494,164.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan		3,351,299,000.00	1 Dokumen	2,574,804,836.00	76.83	1 Dokumen	100.00	776,494,164.00	

		Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus									
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.03.1.02*	*Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga*		*5,750,848,620.00*		*1,686,754,376.00*	*29.33*			*4,064,094,244.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,750,848,620.00	1 Kegiatan	1,686,754,376.00	29.33	1 Kegiatan	60.16	4,064,094,244.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.03.1.03*	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional*		*3,874,326,400.00*		*1,356,503,568.11*	*35.01*			*2,517,822,831.89*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,874,326,400.00	274 Orang	1,356,503,568.11	35.01	166 Orang	60.82	2,517,822,831.89	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.03.1.04*	*Pembinaan dan Pengembangan*		*26,910,394,000.00*		*21,208,161,000.00*	*78.81*			*5,702,233,000.00*	

		Organisasi Olahraga									
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	26,910,394,000.00	1 Dokumen	21,208,161,000.00	78.81	1 Dokumen	100.00	5,702,233,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		327,335,000.00		50,992,000.00	15.58			276,343,000.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	*2.19.04.1.01*	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*		*327,335,000.00*		*50,992,000.00*	*15.58*			*276,343,000.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	327,335,000.00	8 Organisasi	50,992,000.00	15.58	8 Organisasi	100.00	276,343,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		15,073,778,400.00		8,232,585,934.00	54.62			6,841,192,466.00	

2.19.3.26.0.00.14.0000	*3.26.02.1.01*	*Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi*		*12,403,243,400.00*		*6,961,358,734.00*	*56.13*			*5,441,884,666.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,394,989,240.00	16 Lokasi	6,124,684,734.00	82.82	16 Lokasi	80.00	1,270,304,506.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,500,000,000.00	1 Dokumen	739,592,000.00	21.13	1 Dokumen	100.00	2,760,408,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	508,254,160.00	1 Laporan	97,082,000.00	19.10	1 Laporan	100.00	411,172,160.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,000,000,000.00	110 Orang	-	-	110 Orang	100.00	1,000,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.19.3.26.0.00.14.0000	*3.26.02.1.02*	*Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi*		*2,670,535,000.00*		*1,271,227,200.00*	*47.60*			*1,399,307,800.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,428,397,000.00	60 Lokasi	1,271,227,200.00	89.00	60 Lokasi	100.00	157,169,800.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

		Pariwisata Provinsi									
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,242,138,000.00	0 Orang	-	-	0 Orang	-	1,242,138,000.00	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		2,065,323,000.00		1,500,000,000.00	72.63			565,323,000.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	*3.26.03.1.01*	*Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi*		*2,065,323,000.00*		*1,500,000,000.00*	*72.63*			*565,323,000.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,065,323,000.00	1 Kegiatan	1,500,000,000.00	72.63	1 Kegiatan	100.00	565,323,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		371,168,090.00		-	-			371,168,090.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	*3.26.04.1.02*	*Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*		*371,168,090.00*		-	-			*371,168,090.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	371,168,090.00	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100.00	371,168,090.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Sisa

			Semua Kel/Kampung								Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		7,906,682,200.00		1,043,677,000.00	13.20			6,863,005,200.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	*3.26.05.1.01*	*Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan*		*4,000,000,000.00*		*1,043,677,000.00*	*26.09*			*2,956,323,000.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		4,000,000,000.00	1 Laporan	1,043,677,000.00	26.09	1 Laporan	100.00	2,956,323,000.00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	*3.26.05.3.03*	*Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*		*3,906,682,200.00*		-	-			*3,906,682,200.00*	
2.19.3.26.0.00.14.0000	3.26.05.3.03.0001	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,906,682,200.00	1 Laporan	-	-	1 Laporan	100.00	3,906,682,200.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang terdiri dari 8 (Delapan) Program, 20 (Dua Puluh) Kegiatan, dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan. Adapun pagu Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 88,463,855,474,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 50.385,576,280,11 dengan persentase realisasi sebesar 56,96 %.

SEKRETARIAT DAERAH

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.2.23.2.24.15.0000		SEKRETARIAT DAERAH		397,400,498,627.00		357,200,567,190.00	89.88			40,199,931,437.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		298,914,613,867.00		284,917,910,427.00	95.32			13,996,703,440.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		740,805,686.00		740,715,600.00	99.99			90,086.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	141,122,486.00	1 Dokumen	141,089,400.00	99.98			33,086.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	149,920,800.00	1 Dokumen	149,896,800.00	99.98			24,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	149,920,800.00	1 Dokumen	149,909,800.00	99.99			11,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	149,920,800.00	1 Dokumen	149,909,800.00	99.99			11,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	149,920,800.00	1 Dokumen	149,909,800.00	99.99			11,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Kel/Kampung								
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13,757,351,903.00		13,272,677,662.00	96.48			484,674,241.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,357,351,903.00	1080 Orang/Bulan	11,988,837,662.00	97.02			368,514,241.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Laporan	153,000,000.00	76.50			47,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	400,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	400,000,000.00	1 Dokumen	330,840,000.00	82.71			69,160,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada		600,000,000.00		576,530,000.00	96.09			23,470,000.00	

		Perangkat Daerah									
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Dokumen	176,530,000.00	88.27			23,470,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2,217,086,150.00		1,941,291,485.00	87.56			275,794,665.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	993,921,750.00	90 Paket	993,921,750.00	100.00			-	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	858,842,000.00	50 Orang	583,047,335.00	67.89			275,794,665.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan	Semua Kota/Kab,	364,322,400.00	90 Orang	364,322,400.00	100.00			-	Pendapatan Bagi Hasil

		Perundang-undangan	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		38,275,510,800.00		36,291,982,384.00	94.82			1,983,528,416.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,445,683,600.00	1 Paket	2,442,580,000.00	99.87			3,103,600.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	709,121,700.00	1 Paket	701,268,000.00	98.89			7,853,700.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,000,008,000.00	1 Paket	845,875,000.00	84.59			154,133,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,651,523,300.00	1 Paket	2,649,657,000.00	99.93			1,866,300.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	6,291,845,000.00	3200 Dokumen	5,757,779,900.00	91.51			534,065,100.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	19,453,529,200.00	1 Laporan	19,449,578,179.00	99.98			3,951,021.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,423,800,000.00	12 Laporan	4,145,244,305.00	76.43			1,278,555,695.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	100.00			-	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6,914,716,903.00		6,782,309,722.00	98.09			132,407,181.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,534,828,288.00	2 Unit	2,511,234,722.00	99.07			23,593,566.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang

											IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,379,888,615.00	1 Unit	4,271,075,000.00	97.52			108,813,615.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		21,275,533,395.00		18,358,339,691.00	86.29			2,917,193,704.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	1 Laporan	39,360,000.00	19.68			160,640,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,843,858,395.00	1 Laporan	2,949,148,691.00	76.72			894,709,704.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	17,231,675,000.00	1 Laporan	15,369,831,000.00	89.20			1,861,844,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		5,410,782,036.00		4,367,644,520.00	80.72			1,043,137,516.00	

		Urusan Pemerintahan Daerah									
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	10 Unit	110,695,000.00	55.35			89,305,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	200,000,000.00	10 Unit	-	-			200,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,020,782,036.00	3 Unit	3,602,176,037.00	89.59			418,605,999.00	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	990,000,000.00	5 Unit	654,773,483.00	66.14			335,226,517.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah		38,712,890,271.00		34,418,625,089.00	88.91			4,294,265,182.00	

		dan Wakil Kepala Daerah									
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	331,901,354.00	24 Orang/Bulan	178,074,372.00	53.65			153,826,982.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	700,000,000.00	2 Orang	-	-			700,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	37,680,988,917.00	24 Orang/ Bulan	34,240,550,717.00	90.87			3,440,438,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah		42,884,743,423.00		42,425,852,527.00	98.93			458,890,896.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,374,386,200.00	1 Paket	7,360,233,800.00	99.81			14,152,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	14,442,564,323.00	1 Paket	14,005,121,760.00	96.97			437,442,563.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan

											Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	21,067,792,900.00	1 Paket	21,060,496,967.00	99.97			7,295,933.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		60,741,453,000.00		60,258,396,200.00	99.20			483,056,800.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	10,338,678,900.00	1 Dokumen	10,327,716,200.00	99.89			10,962,700.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	39,050,041,500.00	1 Laporan	38,635,008,900.00	98.94			415,032,600.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	11,352,732,600.00	1 Laporan	11,295,671,100.00	99.50			57,061,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	*4.01.01.1.14*	*Fasilitasi Keprotokolan*		*67,383,740,300.00*		*65,483,545,547.00*	*97.18*			*1,900,194,753.00*	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	26,608,034,000.00	1 Laporan	25,933,255,047.00	97.46			674,778,953.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang

			Semua Kel/Kampung								IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	25,549,172,500.00	1 Laporan	24,818,171,300.00	97.14			731,001,200.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	15,226,533,800.00	1 Laporan	14,732,119,200.00	96.75			494,414,600.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		5,615,833,400.00		4,773,073,920.00	84.99			842,759,480.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		3,365,513,800.00		2,599,184,720.00	77.23			766,329,080.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	700,157,000.00	1 Dokumen	626,534,000.00	89.48			73,623,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	793,137,300.00	1 Dokumen	771,873,500.00	97.32			21,263,800.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Semua Kota/Kab,	1,872,219,500.00	1 Dokumen	1,200,777,220.00	64.14			671,442,280.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

			Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		2,250,319,600.00		2,173,889,200.00	96.60			76,430,400.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,113,293,400.00	1 Dokumen	1,113,293,000.00	100.00			400.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,137,026,200.00	1 Dokumen	1,060,596,200.00	93.28			76,430,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		29,418,475,810.00		9,055,883,423.00	30.78			20,362,592,387.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		24,836,891,110.00		4,587,056,437.00	18.47			20,249,834,673.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,767,381,440.00	1 Dokumen	1,709,936,570.00	96.75			57,444,870.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,019,521,070.00	1 Dokumen	1,924,131,267.00	95.28			95,389,803.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	21,049,988,600.00	1 Dokumen	952,988,600.00	4.53			20,097,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah		3,131,782,100.00		3,130,246,932.00	99.95			1,535,168.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi	Semua Kota/Kab,	724,687,100.00	1 Dokumen	723,999,293.00	99.91			687,807.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

		Kepala Daerah dan DPRPT	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	957,889,600.00	1 Dokumen	957,536,044.00	99.96			353,556.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,449,205,400.00	1 Laporan	1,448,711,595.00	99.97			493,805.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		1,449,802,600.00		1,338,580,054.00	92.33			111,222,546.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	897,525,000.00	1 Dokumen	875,391,454.00	97.53			22,133,546.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	258,457,600.00	1 Dokumen	258,433,600.00	99.99			24,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	293,820,000.00	1 Laporan	204,755,000.00	69.69			89,065,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		42,882,986,600.00		39,383,426,005.00	91.84			3,499,560,595.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		30,603,950,500.00		30,104,653,105.00	98.37			499,297,395.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	8,538,686,000.00	44 Unit	8,080,259,640.00	94.63			458,426,360.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	22,065,264,500.00	16 Lembaga	22,024,393,465.00	99.81			40,871,035.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		5,617,278,000.00		5,617,077,600.00	100.00			200,400.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,117,278,000.00	1 Dokumen	3,117,077,600.00	99.99			200,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,000,000,000.00	16 Lembaga	1,000,000,000.00	100.00			-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	1 Dokumen	1,500,000,000.00	100.00			-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		6,661,758,100.00		3,661,695,300.00	54.97			3,000,062,800.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga,	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,501,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000.00	0.07			1,500,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan

		Kebudayaan, dan Pariwisata									Mineral Logam dan Batu Bara
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		4,550,048,000.00		3,549,985,200.00	78.02			1,000,062,800.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		610,710,100.00		110,710,100.00	18.13			500,000,000.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		3,123,385,000.00		3,076,890,701.00	98.51			46,494,299.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		2,297,364,000.00		2,261,092,558.00	98.42			36,271,442.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	890,908,000.00	1 Dokumen	889,261,440.00	99.82			1,646,560.00	Dana Bagi Hasi (DBH)

4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	369,204,000.00	1 Dokumen	351,099,159.00	95.10			18,104,841.00	Dana Bagi Hasi (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	243,536,000.00	1 Dokumen	233,781,705.00	95.99			9,754,295.00	Dana Bagi Hasi (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	793,716,000.00	1 Dokumen	786,950,254.00	99.15			6,765,746.00	Dana Bagi Hasi (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		826,021,000.00		815,798,143.00	98.76			10,222,857.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	376,827,000.00	2 Kasus	369,478,207.00	98.05			7,348,793.00	Dana Bagi Hasi (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	449,194,000.00	2 Kasus	446,319,936.00	99.36			2,874,064.00	Dana Bagi Hasi (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		4,224,738,000.00		3,359,076,472.00	79.51			865,661,528.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		1,645,235,000.00		1,325,425,118.00	80.56			319,809,882.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,107,913,000.00	1 Dokumen	977,168,184.00	88.20			130,744,816.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		537,322,000.00		348,256,934.00	64.81			189,065,066.00	

4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		271,786,000.00		217,425,400.00	80.00			54,360,600.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	90,908,000.00	1 Dokumen	67,116,200.00	73.83			23,791,800.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	89,254,000.00	1 Dokumen	75,446,400.00	84.53			13,807,600.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		91,624,000.00	1 Dokumen	74,862,800.00	81.71			16,761,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		2,307,717,000.00		1,816,225,954.00	78.70			491,491,046.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		120,053,000.00		93,793,000.00	78.13			26,260,000.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air		159,763,000.00		101,729,000.00	63.67			58,034,000.00	

		Minum, Limbah dan Sanitasi									
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		1,571,371,000.00	1 Dokumen	1,240,793,711.00	78.96			330,577,289.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		456,530,000.00	1 Dokumen	379,910,243.00	83.22			76,619,757.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		8,718,600,950.00		8,347,738,447.00	95.75			370,862,503.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		5,953,539,300.00		5,840,858,461.00	98.11			112,680,839.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		1,101,318,200.00	1 Laporan	1,101,123,900.00	99.98			194,300.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		4,416,056,000.00	1 Laporan	4,324,505,061.00	97.93			91,550,939.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		436,165,100.00	1 Laporan	415,229,500.00	95.20			20,935,600.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1,760,130,650.00		1,559,185,247.00	88.58			200,945,403.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		338,386,500.00	1 Laporan	248,445,656.00	73.42			89,940,844.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		650,381,500.00	1 Laporan	647,984,680.00	99.63			2,396,820.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi		771,362,650.00	1 Laporan	662,754,911.00	85.92			108,607,739.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

		Pengadaan Barang dan Jasa									
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1,004,931,000.00		947,694,739.00	94.30			57,236,261.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		406,200,000.00	15 Orang	429,960,000.00	105.85			- 23,760,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		176,596,000.00	1 Dokumen	154,446,533.00	87.46			22,149,467.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		422,135,000.00	1 Dokumen	363,288,206.00	86.06			58,846,794.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		692,192,000.00		532,943,475.00	76.99			159,248,525.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		365,322,000.00		316,214,234.00	86.56			49,107,766.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		134,108,000.00	1 Laporan	125,237,690.00	93.39			8,870,310.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		126,000,000.00	1 Laporan	124,720,544.00	98.98			1,279,456.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		105,214,000.00	1 Laporan	66,256,000.00	62.97			38,958,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		326,870,000.00		216,729,241.00	66.30			110,140,759.00	

4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		109,982,000.00	1 Dokumen	56,180,000.00	51.08			53,802,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		108,444,000.00	1 Laporan	72,668,891.00	67.01			35,775,109.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		108,444,000.00	1 Dokumen	87,880,350.00	81.04			20,563,650.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.09	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA		3,809,673,000.00		3,753,624,320.00	98.53			56,048,680.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.09.3.02	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus		3,809,673,000.00		3,753,624,320.00	98.53			56,048,680.00	
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.09.3.02.0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus		3,437,185,200.00	1 Dokumen	3,381,251,625.00	98.37			55,933,575.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.01.2.23.2.24.15.0000	4.01.09.3.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus		372,487,800.00	1 Laporan	372,372,695.00	99.97			115,105.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Program, 30 (Tiga Puluh) Kegiatan, dan 101 (Seratus Satu) Sub Kegiatan. Adapun pagu Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 397.400,498,627,00, dan Terealisasi sebesar Rp. 357.200,567,190,00, dengan persentase realisasi sebesar 89,88 %

SEKRETARIAT DPRPT

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.0.00.0.00.16.0000		SEKRETARIAT DPRPT		300,108,926,102.00		261,774,838,301.00	87.23			38,334,087,801.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		105,511,789,502.00		96,247,090,160.00	91.22			9,264,699,342.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		850,000,000.00		849,851,000.00	99.98			149,000.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	49,964,500.00	99.93	1 Dokumen	99.93	35,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	49,964,500.00	99.93	1 Dokumen	99.93	35,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	49,964,500.00	99.93	1 Dokumen	99.93	35,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Laporan	49,964,500.00	99.93	1 Laporan	99.93	35,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Laporan	49,993,000.00	99.99	1 Laporan	99.99	7,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,583,201,022.00		4,328,431,442.00	94.44			254,769,580.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,620,721,022.00	264 Orang/ Bulan	2,539,201,442.00	96.89	264 Orang/ Bulan	96.89	81,519,580.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	851,280,000.00	12 Dokumen	678,030,000.00	79.65	12 Dokumen	79.65	173,250,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	185,200,000.00	1 Dokumen	185,200,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	185,200,000.00	1 Dokumen	185,200,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	185,200,000.00	1 Laporan	185,200,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	185,200,000.00	1 Dokumen	185,200,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)

4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	185,200,000.00	1 Laporan	185,200,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	185,200,000.00	1 Dokumen	185,200,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		150,000,000.00		121,299,500.00	80.87			28,700,500.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	21,335,000.00	42.67	1 Dokumen	42.67	28,665,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Laporan	49,964,500.00	99.93	1 Laporan	99.93	35,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1,828,029,400.00		1,794,013,421.00	98.14			34,015,979.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	718,700,000.00	1 Paket	718,005,781.00	99.90	1 Paket	99.90	694,219.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Dokumen	49,988,000.00	99.98	1 Dokumen	99.98	12,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua	50,000,000.00	1 Dokumen	49,999,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	1,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

			Distrik, Semua Kel/Kampung								
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,427,400.00	25 Orang	-	-	25 Orang	-	4,427,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,004,902,000.00	50 Orang	976,020,640.00	97.13	50 Orang	97.13	28,881,360.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		26,028,514,300.00		25,102,179,475.00	96.44			926,334,825.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	127,264,000.00	1 Paket	127,264,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,399,970,700.00	1 Paket	1,392,235,800.00	99.45	1 Paket	99.45	7,734,900.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		352,172,000.00		351,000,000.00	99.67	-	99.67	1,172,000.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	790,500,000.00	1 Paket	790,500,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,328,183,000.00	1 Paket	1,319,478,500.00	99.34	1 Paket	99.34	8,704,500.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua	501,500,000.00	1 Dokumen	375,650,000.00	74.91	1 Dokumen	74.91	125,850,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH),

			Distrik, Semua Kel/Kampung								Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	11,871,574,000.00	1 Laporan	11,871,537,300.00	100.00	1 Laporan	100.00	36,700.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,011,420,000.00	1 Laporan	4,228,597,275.00	84.38	1 Laporan	84.38	782,822,725.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,645,930,600.00	1 Dokumen	4,645,916,600.00	100.00	1 Dokumen	100.00	14,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2,895,774,000.00		1,389,331,500.00	47.98			1,506,442,500.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	828,300,000.00	2 Unit	-	-	2 Unit	-	828,300,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	674,400,000.00	1 Unit	-	-	1 Unit	-	674,400,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,393,074,000.00	15 Unit	1,389,331,500.00	99.73	15 Unit	99.73	3,742,500.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,091,572,500.00		6,999,999,731.00	98.71			91,572,769.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab,	1,199,922,500.00	1 Laporan	1,199,922,500.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Pajak Kendaraan

			Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	367,330,000.00	1 Laporan	334,347,231.00	91.02	1 Laporan	91.02	32,982,769.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	5,524,320,000.00	1 Laporan	5,465,730,000.00	98.94	1 Laporan	98.94	58,590,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,282,130,000.00		684,070,500.00	53.35			598,059,500.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	355,330,000.00	25 Unit	-	-	25 Unit	-	355,330,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	193,240,000.00	2 Unit	50,683,000.00	26.23	2 Unit	26.23	142,557,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	99,960,000.00	100 Unit	-	-	100 Unit	-	99,960,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	633,600,000.00	1 Unit	633,387,500.00	99.97	1 Unit	99.97	212,500.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRPT		43,910,653,780.00		39,909,439,232.00	90.89			4,001,214,548.00	

4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	35,591,195,780.00	784 Orang/ Bulan	35,159,522,032.00	98.79	784 Orang/ Bulan	98.79	431,673,748.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,251,200,000.00	1 Paket	890,575,200.00	20.95	1 Paket	20.95	3,360,624,800.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,068,258,000.00	56 Orang	3,859,342,000.00	94.86	56 Orang	94.86	208,916,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRPT		16,891,914,500.00		15,068,474,359.00	89.21			1,823,440,141.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,231,135,000.00	1 Dokumen	1,901,629,600.00	58.85	1 Dokumen	58.85	1,329,505,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	9,658,082,000.00	1 Laporan	9,340,601,950.00	96.71	1 Laporan	96.71	317,480,050.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,002,698,000.00	1 Laporan	2,827,642,809.00	94.17	1 Laporan	94.17	175,055,191.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	999,999,500.00	1 Paket	998,600,000.00	99.86	1 Paket	99.86	1,399,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

			Semua Kel/Kampung								
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT		170,384,313,600.00		153,663,477,733.00	90.19			16,720,835,867.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRPT		21,093,052,000.00		18,446,085,378.00	87.45			2,646,966,622.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,796,000,000.00	10 Dokumen	1,756,173,989.00	97.78	10 Dokumen	97.78	39,826,011.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	879,968,000.00	10 Dokumen	789,788,000.00	89.75	10 Dokumen	89.75	90,180,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	527,100,000.00	10 Dokumen	457,600,000.00	86.81	10 Dokumen	86.81	69,500,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	15,969,510,000.00	10 Dokumen	13,669,510,000.00	85.60	10 Dokumen	85.60	2,300,000,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,214,435,000.00	1 Dokumen	1,174,273,389.00	96.69	1 Dokumen	96.69	40,161,611.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRPT dan Pemerintah Daerah		706,039,000.00	200 Orang	598,740,000.00	84.80	200 Orang	84.80	107,299,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		7,519,165,000.00		7,474,165,000.00	99.40			45,000,000.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	2 Dokumen	1,500,000,000.00	100.00	2 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	2 Dokumen	1,500,000,000.00	100.00	2 Dokumen	100.00	-	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	1 Dokumen	1,500,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	1 Dokumen	1,500,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,100,565,000.00	1 Dokumen	1,055,565,000.00	95.91	1 Dokumen	95.91	45,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	418,600,000.00	1 Dokumen	418,600,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		9,350,211,000.00		9,001,697,800.00	96.27			348,513,200.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Kota/Kab, Semua	1,500,000,000.00	1 Laporan	1,467,350,000.00	97.82	1 Laporan	97.82	32,650,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang

			Distrik, Semua Kel/Kampung								IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	1 Laporan	1,499,910,000.00	99.99	1 Laporan	99.99	90,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	1 Laporan	1,500,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	1 Laporan	1,500,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,500,000,000.00	1 Laporan	1,492,476,800.00	99.50	1 Laporan	99.50	7,523,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	466,545,000.00	1 Dokumen	434,545,000.00	93.14	1 Dokumen	93.14	32,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	508,786,000.00	1 Dokumen	476,786,000.00	93.71	1 Dokumen	93.71	32,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	874,880,000.00	1 Dokumen	630,630,000.00	72.08	1 Dokumen	72.08	244,250,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRPT		15,019,209,800.00		9,424,817,617.00	62.75			5,594,392,183.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,851,340,000.00	1 Dokumen	5,746,523,150.00	73.19	1 Dokumen	73.19	2,104,816,850.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,245,324,000.00	10 Orang	1,909,080,000.00	44.97	10 Orang	44.97	2,336,244,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	600,000,000.00	10 Orang	290,000,000.00	48.33	10 Orang	48.33	310,000,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	419,200,000.00	1 Dokumen	419,200,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,000,000,000.00	1 Dokumen	845,057,467.00	84.51	1 Dokumen	84.51	154,942,533.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	903,345,800.00	1 Dokumen	214,957,000.00	23.80	1 Dokumen	23.80	688,388,800.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		91,949,831,600.00		88,434,416,000.00	96.18			3,515,415,600.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	20,984,174,600.00	8 Laporan	17,730,746,000.00	84.50	8 Laporan	84.50	3,253,428,600.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)

4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,593,260,000.00	1 Dokumen	1,572,812,000.00	98.72	1 Dokumen	98.72	20,448,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	68,894,147,000.00	3 Dokumen	68,673,258,000.00	99.68	3 Dokumen	99.68	220,889,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	478,250,000.00	300 Oramg	457,600,000.00	95.68	300 Oramg	95.68	20,650,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRPT		2,096,788,200.00		1,636,606,000.00	78.05			460,182,200.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,000,000,000.00	1 Dokumen	588,152,000.00	58.82	1 Dokumen	58.82	411,848,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,096,788,200.00	1 Laporan	1,048,454,000.00	95.59	1 Laporan	95.59	48,334,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah		569,090,000.00		515,012,000.00	90.50			54,078,000.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	569,090,000.00	1 Dokumen	515,012,000.00	90.50	1 Dokumen	90.50	54,078,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRPT		22,786,966,000.00		18,730,677,938.00	82.20			4,056,288,062.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	11,976,018,000.00	1 Dokumen	11,622,914,944.00	97.05	1 Dokumen	97.05	353,103,056.00	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRPT	Semua Kota/Kab,	582,600,000.00	1 Laporan	432,300,000.00	74.20	1 Laporan	74.20	150,300,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

			Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	582,600,000.00	1 Dokumen	432,300,000.00	74.20	1 Dokumen	74.20	150,300,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRPT	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,578,250,000.00	1 Dokumen	2,942,614,000.00	82.24	1 Dokumen	82.24	635,636,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	6,067,498,000.00	1 Dokumen	3,300,548,994.00	54.40	1 Dokumen	54.40	2,766,949,006.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.03	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA		24,212,823,000.00		11,864,270,408.00	49.00			12,348,552,592.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.03.3.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		24,212,823,000.00		11,864,270,408.00	49.00			12,348,552,592.00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.03.3.01.0001	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRPT dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	15,659,409,000.00	12 Dokumen	4,204,413,408.00	26.85	12 Dokumen	26.85	11,454,995,592.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.03.3.01.0002	Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,707,170,000.00	1 Dokumen	949,326,000.00	55.61	1 Dokumen	55.61	757,844,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.03.3.01.0003	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Semua Kota/Kab,	4,001,686,000.00	1 Dokumen	3,924,886,000.00	98.08	1 Dokumen	98.08	76,800,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

			Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								
4.02.0.00.0.00.16.0000	4.02.03.3.01.0004	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,844,558,000.00	1 Dokumen	2,785,645,000.00	97.93	1 Dokumen	97.93	58,913,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRPT Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 3 (Tiga) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan, dan 92 (Sembilan Puluh Dua) Sub Kegiatan. Adapun pagu Sekretariat DPRPT Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 300.108,926,102 ,00, dan Terealisasi sebesar Rp. 261.774,838,301,00 dengan persentase realisasi sebesar 87,23%.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.01.5.05.0.00.17.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		43,095,857,633.00		39,839,271,415.00	92.44			3,256,586,218.00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		20,531,986,738.00		19,768,866,224.00	96.28			763,120,514.00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*1,051,910,000.00*		*1,045,757,510.00*	*99.42*			*6,152,490.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	842,455,000.00	20 Dokumen	836,302,510.00	99.27	20 Dokumen	99.27	6,152,490.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	42,455,000.00	1 Dokumen	42,455,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	41,540,000.00	1 Dokumen	41,540,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	42,455,000.00	1 Dokumen	42,455,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	41,960,000.00	1 Dokumen	41,960,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Semua Kota/Kab, Semua	41,045,000.00	1 Laporan	41,045,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)

		Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Distrik, Semua Kel/Kampung								
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*4,462,414,138.00*		*4,342,496,050.00*	*97.31*			*119,918,088.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,094,511,238.00	47 Orang/ Bulan	3,977,239,550.00	97.14	47 Orang/ Bulan	97.14	117,271,688.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	185,464,900.00	1 Dokumen	184,260,000.00	99.35	1 Dokumen	99.35	1,204,900.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	96,688,000.00	1 Laporan	96,055,000.00	99.35	1 Laporan	99.35	633,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	42,380,000.00	1 Laporan	42,380,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	43,370,000.00	1 Dokumen	42,561,500.00	98.14	1 Dokumen	98.14	808,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*3,569,230,000.00*		*3,286,843,228.00*	*92.09*			*282,386,772.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	85,900,000.00	1 Unit	51,400,000.00	59.84	1 Unit	59.84	34,500,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	450,000,000.00	1 Paket	448,440,000.00	99.65	1 Paket	99.65	1,560,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	131,670,000.00	1 Dokumen	99,046,000.00	75.22	1 Dokumen	75.22	32,624,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,901,660,000.00	47 Orang/ Bulan	2,687,957,228.00	92.64	47 Orang/ Bulan	92.64	213,702,772.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*9,983,061,500.00*		*9,776,680,521.00*	*97.93*			*206,380,979.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	50,000,000.00	1 Paket	49,649,200.00	99.30	1 Paket	99.30	350,800.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	970,851,000.00	1 Paket	961,407,519.00	99.03	1 Paket	99.03	9,443,481.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	30,000,000.00	1 Paket	4,050,000.00	13.50	1 Paket	13.50	25,950,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,533,999,000.00	1 Paket	1,533,978,400.00	100.00	1 Paket	100.00	20,600.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi

											Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,911,074,000.00	1 Laporan	2,895,558,000.00	99.47	1 Laporan	99.47	15,516,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,487,137,500.00	1 Laporan	4,332,037,402.00	96.54	1 Laporan	96.54	155,100,098.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*317,891,500.00*		*317,869,257.00*	*99.99*			*22,243.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	317,891,500.00	1 Paket	317,869,257.00	99.99	1 Paket	99.99	22,243.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*1,092,139,600.00*		*957,239,658.00*	*87.65*			*134,899,942.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	173,151,600.00	1 Laporan	138,691,658.00	80.10	1 Laporan	80.10	34,459,942.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	908,988,000.00	1 Laporan	808,548,000.00	88.95	1 Laporan	88.95	100,440,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*55,340,000.00*		*41,980,000.00*	*75.86*			*13,360,000.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	42,530,000.00	1 Unit	41,980,000.00	98.71	1 Unit	98.71	550,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	12,810,000.00	1 Unit	-	-	1 Unit	-	12,810,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		14,256,896,700.00		12,870,245,794.00	90.27			1,386,650,906.00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.02.1.01*	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*		*8,808,849,000.00*		*8,159,248,261.00*	*92.63*			*649,600,739.00*	

5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	517,750,000.00	15 Dokumen	441,462,000.00	85.27	15 Dokumen	85.27	76,288,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	480,010,000.00	1 Dokumen	470,252,000.00	97.97	1 Dokumen	97.97	9,758,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,964,282,000.00	8 Berita Acara	2,785,523,201.00	93.97	8 Berita Acara	93.97	178,758,799.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	647,368,000.00	22 Berita Acara	598,968,000.00	92.52	22 Berita Acara	92.52	48,400,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,886,781,000.00	30 Berita Acara	2,649,164,980.00	91.77	30 Berita Acara	91.77	237,616,020.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	1,312,658,000.00	3 Dokumen	1,213,878,080.00	92.47	3 Dokumen	92.47	98,779,920.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil

		Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kel/Kampung								Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.02.1.02*	*Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*		*2,005,846,300.00*		*1,584,072,237.00*	*78.97*			*421,774,063.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,005,846,300.00	16 Dokumen	1,584,072,237.00	78.97	16 Dokumen	78.97	421,774,063.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.02.1.03*	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*		*1,679,489,000.00*		*1,607,493,010.00*	*95.71*			*71,995,990.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	453,433,000.00	8 Laporan	420,557,396.00	92.75	8 Laporan	92.75	32,875,604.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,068,056,000.00	1 Laporan	1,029,185,614.00	96.36	1 Laporan	96.36	38,870,386.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	158,000,000.00	1 Dokumen	157,750,000.00	99.84	1 Dokumen	99.84	250,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.02.1.04*	*Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*		*1,762,712,400.00*		*1,519,432,286.00*	*86.20*			*243,280,114.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,259,157,400.00	1 Dokumen	1,015,877,286.00	80.68	1 Dokumen	80.68	243,280,114.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	229,955,000.00	1 Dokumen	229,955,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	273,600,000.00		273,600,000.00	100.00			-	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		5,397,488,695.00		4,908,035,371.00	90.93			489,453,324.00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.03.1.01*	*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*		*3,250,834,000.00*		*2,979,079,476.00*	*91.64*			*271,754,524.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	615,920,000.00	1 Laporan	594,870,000.00	96.58	1 Laporan	96.58	21,050,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,634,914,000.00	1 Laporan	2,384,209,476.00	90.49	1 Laporan	90.49	250,704,524.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil

											Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.03.1.02*	*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*		*392,378,000.00*		*344,543,200.00*	*87.81*			*47,834,800.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	392,378,000.00	1 Laporan	344,543,200.00	87.81	1 Laporan	87.81	47,834,800.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.01.03.1.03*	*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*		*1,754,276,695.00*		*1,584,412,695.00*	*90.32*			*169,864,000.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	284,150,695.00	1 Laporan	283,015,695.00	99.60	1 Laporan	99.60	1,135,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	150,475,000.00	1 Laporan	121,563,000.00	80.79	1 Laporan	80.79	28,912,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Semua Kota/Kab, Semua	213,662,000.00	1 Laporan	211,782,000.00	99.12	1 Laporan	99.12	1,880,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang

		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Distrik, Semua Kel/Kampung								IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,105,989,000.00	10 Dokumen	968,052,000.00	87.53	10 Dokumen	87.53	137,937,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan yang terdiri dari 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan, dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Adapun pagu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.43.095.857.633,00, dan Terealisasi sebesar Rp.39.839.271.415,00, dengan persentase realisasi sebesar 92,44%.

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.02.0.00.0.00.18.0000		BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH		1,323,681,662,688.00		1,182,213,443,984.00	89.31			141,468,218,704.00	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		318,413,926,334.00		312,213,617,982.00	98.05			6,200,308,352.00	
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*2,057,779,000.00*		*2,024,626,397.00*	*98.39*			*33,152,603.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	399,000,000.00	4 Dokumen	398,992,000.00	100.00	4 Dokumen	100.00	8,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	492,550,000.00	1 Dokumen	489,256,203.00	99.33	1 Dokumen	99.33	3,293,797.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	453,260,000.00	1 Dokumen	424,637,264.00	93.69	1 Dokumen	93.69	28,622,736.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	213,909,000.00	1 Dokumen	213,898,000.00	99.99	1 Dokumen	99.99	11,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,

											Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	146,110,000.00	1 Dokumen	146,103,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	7,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	352,950,000.00	1 Laporan	351,739,930.00	99.66	1 Laporan	99.66	1,210,070.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*271,915,307,317.00*		*268,448,207,717.00*	*98.72*			*3,467,099,600.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	263,769,061,267.00	100 Orang/ Bulan	260,356,485,446.00	98.71	100 Orang/ Bulan	98.71	3,412,575,821.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Pajak Alat Berat, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan

											Batu Bara, Pajak Rokok.
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	981,627,000.00	30 Dokumen	979,275,000.00	99.76	30 Dokumen	99.76	2,352,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,525,964,450.00	700 Dokumen	1,525,933,960.00	100.00	700 Dokumen	100.00	30,490.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,414,140,000.00	12 Dokumen	1,410,621,925.00	99.75	12 Dokumen	99.75	3,518,075.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,263,450,000.00	1 Laporan	1,259,212,800.00	99.66	1 Laporan	99.66	4,237,200.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,471,950,000.00	20 Laporan	1,467,152,186.00	99.67	20 Laporan	99.67	4,797,814.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,489,114,600.00	1 Dokumen	1,449,526,400.00	97.34	1 Dokumen	97.34	39,588,200.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.03*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada*		*1,273,356,000.00*		*1,255,812,004.00*	*98.62*			*17,543,996.00*	

		Perangkat Daerah									
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,273,356,000.00	1 Laporan	1,255,812,004.00	98.62	1 Laporan	98.62	17,543,996.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.04*	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*		*1,799,109,000.00*		*1,625,890,513.00*	*90.37*			*173,218,487.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	456,182,000.00	5 Dokumen	455,649,516.00	99.88	5 Dokumen	99.88	532,484.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	271,260,000.00	10 Dokumen	205,717,119.00	75.84	10 Dokumen	75.84	65,542,881.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	680,974,000.00	500 Dokumen	676,427,884.00	99.33	500 Dokumen	99.33	4,546,116.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	390,693,000.00	500 Dokumen	288,095,994.00	73.74	500 Dokumen	73.74	102,597,006.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*9,040,869,900.00*		*8,862,546,892.00*	*98.03*			*178,323,008.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan	Semua Kota/Kab,	858,921,500.00	15 Unit	858,913,000.00	100.00	15 Unit	100.00	8,500.00	Sisa Lebih Perhitungan

		Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	793,750,000.00	1 Paket	793,100,000.00	99.92	1 Paket	99.92	650,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	922,505,500.00	20 Dokumen	922,489,000.00	100.00	20 Dokumen	100.00	16,500.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	916,230,000.00	6 Dokumen	916,230,000.00	100.00	6 Dokumen	100.00	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,022,128,600.00	20 Dokumen	940,277,800.00	91.99	20 Dokumen	91.99	81,850,800.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	746,265,500.00	5 Orang	656,570,530.00	87.98	5 Orang	87.98	89,694,970.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,767,297,900.00	200 Orang	1,761,729,113.00	99.68	200 Orang	99.68	5,568,787.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	2,013,770,900.00	250 Orang	2,013,237,449.00	99.97	250 Orang	99.97	533,451.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

		Peraturan Perundang-undangan	Semua Kel/Kampung								Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*15,365,309,150.00*		*15,083,313,301.00*	*98.16*			*281,995,849.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	431,365,350.00	1 Paket	431,360,000.00	100.00	1 Paket	100.00	5,350.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,198,605,500.00	2 Paket	1,198,588,600.00	100.00	2 Paket	100.00	16,900.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	136,000,000.00	1 Paket	134,961,140.00	99.24	1 Paket	99.24	1,038,860.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,819,905,000.00	1 Paket	1,819,477,570.00	99.98	1 Paket	99.98	427,430.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,237,615,400.00	50 Dokumen	1,237,015,000.00	99.95	50 Dokumen	99.95	600,400.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,268,568,900.00	12 Laporan	7,266,240,500.00	99.97	12 Laporan	99.97	2,328,400.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)

5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,086,990,000.00	70 Laporan	963,887,991.00	88.67	70 Laporan	88.67	123,102,009.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,186,259,000.00	1 Dokumen	2,031,782,500.00	92.93	1 Dokumen	92.93	154,476,500.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*9,127,005,000.00*		*8,648,001,599.00*	*94.75*			*479,003,401.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,768,065,000.00	2 Unit	2,743,829,999.00	99.12	2 Unit	99.12	24,235,001.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	16,821,000.00		-	-	-	-	16,821,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	750,000,000.00	1 Unit	749,650,000.00	99.95	1 Unit	99.95	350,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	4,741,500,000.00	1 Unit	4,303,930,000.00	90.77	1 Unit	90.77	437,570,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	850,619,000.00	10 Unit	850,591,600.00	100.00	10 Unit	100.00	27,400.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)

5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*4,225,107,000.00*		*2,742,692,707.00*	*64.91*			*1,482,414,293.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	565,000,000.00	12 Laporan	532,068,650.00	94.17	12 Laporan	94.17	32,931,350.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,355,411,000.00	12 Laporan	1,091,526,057.00	80.53	12 Laporan	80.53	263,884,943.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,304,696,000.00	12 Laporan	1,119,098,000.00	48.56	12 Laporan	48.56	1,185,598,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*3,610,083,967.00*		*3,522,526,852.00*	*97.57*			*87,557,115.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	524,405,500.00	5 Unit	443,010,000.00	84.48	5 Unit	84.48	81,395,500.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	700,000,000.00	3 Paket	699,837,499.00	99.98	3 Paket	99.98	162,501.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	170,000,000.00	1 Unit	164,500,890.00	96.77	1 Unit	96.77	5,499,110.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,215,678,467.00	1 Unit	2,215,178,463.00	99.98	1 Unit	99.98	500,004.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		986,662,210,012.00		852,523,791,892.00	86.40			134,138,418,120.00	
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.02.1.01*	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*		*14,774,483,400.00*		*13,741,225,729.00*	*93.01*			*1,033,257,671.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,526,272,000.00	1 Dokumen	971,830,000.00	63.67	1 Dokumen	63.67	554,442,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	532,805,400.00	1 Dokumen	532,794,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	11,400.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral

											Logam dan Batu Bara
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,116,358,000.00	1 Dokumen	1,116,348,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	10,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,092,720,250.00	1 Dokumen	1,092,720,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	250.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,049,824,500.00	1 Dokumen	1,049,824,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	500.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,064,398,500.00	1 Dokumen	1,064,398,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	500.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,596,885,100.00	1 Dokumen	1,570,493,000.00	98.35	1 Dokumen	98.35	26,392,100.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	571,109,400.00		568,325,000.00	99.51	-	99.51	2,784,400.00	

		Perubahan APBD									
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,152,247,250.00	10 Dokumen	1,152,247,000.00	100.00	10 Dokumen	100.00	250.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,849,584,000.00	10 Dokumen	1,835,544,464.00	99.24	10 Dokumen	99.24	14,039,536.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,106,443,000.00	0 Dokumen	1,106,433,000.00	100.00	0 Dokumen	100.00	10,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,115,836,000.00	200 Orang	1,680,269,265.00	79.41	200 Orang	79.41	435,566,735.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.02.1.02*	*Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota*		*11,893,713,000.00*		*11,674,928,813.00*	*98.16*			*218,784,187.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	822,505,800.00	8 Laporan	801,900,642.00	97.49	8 Laporan	97.49	20,605,158.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan		2,799,362,000.00		2,717,985,000.00	97.09			81,377,000.00	

		Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota									
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		1,707,130,500.00		1,705,370,000.00	99.90			1,760,500.00	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2,331,901,600.00		2,331,901,600.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,759,745,400.00	1 Laporan	1,651,795,712.00	93.87	1 Laporan	93.87	107,949,688.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,

											Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,038,000,000.00	150 Orang	1,038,000,000.00	100.00	150 Orang	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengkonsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		1,435,067,700.00		1,427,975,859.00	99.51			7,091,841.00	
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.02.1.03*	*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*		*3,008,920,400.00*		*2,986,151,252.00*	*99.24*			*22,769,148.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	780,659,800.00	30 Dokumen	777,788,683.00	99.63	30 Dokumen	99.63	2,871,117.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	900,275,000.00	300 Dokumen	900,210,000.00	99.99	300 Dokumen	99.99	65,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran		1,327,985,600.00		1,308,152,569.00	98.51			19,833,031.00	

		Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.02.1.04*	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*		*2,440,085,100.00*		*2,438,695,918.00*	*99.94*			*1,389,182.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	920,859,400.00	12 Laporan	919,700,000.00	99.87	12 Laporan	99.87	1,159,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	790,007,100.00	12 Laporan	789,922,000.00	99.99	12 Laporan	99.99	85,100.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	729,218,600.00		729,073,918.00	99.98			144,682.00	

5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.02.1.05*	*Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*		*952,842,702,112.00*		*819,988,486,998.00*	*86.06*			*132,854,215,114.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	551,125,000,000.00	0 Dokumen	516,125,000,000.00	93.65	0 Dokumen	93.65	35,000,000,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan.
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	133,791,448,544.00	0 Laporan	38,862,755,600.00	29.05	0 Laporan	29.05	94,928,692,944.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Lain-lain PAD Yang Sah, Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, Dana Bagi Hasil (DBH),

											Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	267,926,253,568.00	8 Laporan	265,000,731,398.00	98.91	8 Laporan	98.91	2,925,522,170.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.02.1.06*	*Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*		*1,702,306,000.00*		*1,694,303,182.00*	*99.53*			*8,002,818.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,702,306,000.00	200 Orang	1,694,303,182.00	99.53	200 Orang	99.53	8,002,818.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

		Pemerintah Provinsi									
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		4,878,963,000.00		4,208,005,739.00	86.25			670,957,261.00	
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.03.1.01*	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*		*4,878,963,000.00*		*4,208,005,739.00*	*86.25*			*670,957,261.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	550,092,000.00	3 Dokumen	524,831,000.00	95.41	3 Dokumen	95.41	25,261,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	759,937,000.00	1 Dokumen	754,909,484.00	99.34	1 Dokumen	99.34	5,027,516.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	751,528,000.00	1 Laporan	746,854,555.00	99.38	1 Laporan	99.38	4,673,445.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	810,073,000.00	1 Laporan	719,027,950.00	88.76	1 Laporan	88.76	91,045,050.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,113,757,000.00	1 Laporan	912,114,709.00	81.90	1 Laporan	81.90	201,642,291.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.03.1.01.0011	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	132,495,000.00	1 Laporan	77,106,541.00	58.20	1 Laporan	58.20	55,388,459.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,

											Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		6,656,657,524.00		6,468,769,959.00	97.18			187,887,565.00	
5.02.0.00.0.00.18.0000	*5.02.04.1.01*	*Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*		*6,656,657,524.00*		*6,468,769,959.00*	*97.18*			*187,887,565.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	652,142,000.00	5 Dokumen	644,273,887.00	98.79	5 Dokumen	98.79	7,868,113.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	692,672,000.00	1 Laporan	689,560,931.00	99.55	1 Laporan	99.55	3,111,069.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,789,934,000.00	1 Laporan	1,652,023,264.00	92.30	1 Laporan	92.30	137,910,736.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	485,393,930.00	1 Laporan	478,524,849.00	98.58	1 Laporan	98.58	6,869,081.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	647,929,220.00	100 Laporan	646,416,338.00	99.77	100 Laporan	99.77	1,512,882.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	544,960,300.00	750 Dokumen	537,850,286.00	98.70	750 Dokumen	98.70	7,110,014.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)

5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,215,706,744.00	500 Dokumen SSPD	1,209,016,788.00	99.45	500 Dokumen SSPD	99.45	6,689,956.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0000	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	627,919,330.00	1 Laporan	611,103,616.00	97.32	1 Laporan	97.32	16,815,714.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.0.00.0.00.18.0001		UPT PENDAPATAN NABIRE		2,163,767,518.00		1,984,823,626.00	91.73			178,943,892.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1,468,919,900.00		1,293,427,626.00	88.05			175,492,274.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	*5.02.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*679,474,700.00*		*685,018,467.00*	*100.82*			*- 5,543,767.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5,222,000.00		5,222,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		161,791,100.00		161,675,400.00	99.93			115,700.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		16,517,600.00		15,929,600.00	96.44			588,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		72,380,000.00		72,380,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		423,564,000.00		429,811,467.00	101.47			- 6,247,467.00	

		PERANGKAT DAERAH									
5.02.0.00.0.00.18.0001	*5.02.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*789,445,200.00*		*608,409,159.00*	*77.07*			*181,036,041.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10,440,000.00		10,000,000.00	95.79			440,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		113,575,200.00		76,526,159.00	67.38			37,049,041.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		665,430,000.00		521,883,000.00	78.43			143,547,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		694,847,618.00		691,396,000.00	99.50			3,451,618.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	*5.02.04.1.01*	*Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*		*694,847,618.00*		*691,396,000.00*	*99.50*			*3,451,618.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		16,920,618.00		15,170,000.00	89.65			1,750,618.00	
5.02.0.00.0.00.18.0001	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah		677,927,000.00		676,226,000.00	99.75			1,701,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002		UPT PENDAPATAN PANIAI		1,281,230,000.00		1,277,990,590.00	99.75			3,239,410.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1,032,846,000.00		1,030,006,590.00	99.73			2,839,410.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	*5.02.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*765,438,000.00*		*764,890,578.00*	*99.93*			*547,422.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran		13,547,000.00		13,547,000.00	100.00			-	

		gan Bangunan Kantor									
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		44,506,500.00		44,506,500.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		34,000,000.00		34,000,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		127,100,900.00		127,100,000.00	100.00			900.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		381,483,600.00		381,320,000.00	99.96			163,600.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH		164,800,000.00		164,417,078.00	99.77			382,922.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	*5.02.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*267,408,000.00*		*265,116,012.00*	*99.14*			*2,291,988.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		16,000,000.00		16,000,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36,140,000.00		33,953,012.00	93.95			2,186,988.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		215,268,000.00		215,163,000.00	99.95			105,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		248,384,000.00		247,984,000.00	99.84			400,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	*5.02.04.1.01*	*Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*		*248,384,000.00*		*247,984,000.00*	*99.84*			*400,000.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan		68,984,000.00		68,984,000.00	100.00			-	

		Kebijakan Pajak Daerah									
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		42,700,000.00		42,300,000.00	99.06			400,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		49,500,000.00		49,500,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0002	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah		87,200,000.00		87,200,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0003		UPT PENDAPATAN MULIA		958,750,300.00		930,220,281.00	97.02			28,530,019.00	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		929,140,300.00		900,610,281.00	96.93			28,530,019.00	
5.02.0.00.0.00.18.0003	*5.02.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*478,912,000.00*		*477,937,981.00*	*99.80*			*974,019.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		88,721,000.00		88,721,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8,400,000.00		8,000,000.00	95.24			400,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		67,307,000.00		67,307,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		105,190,000.00		105,190,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH		209,294,000.00		208,719,981.00	99.73			574,019.00	
5.02.0.00.0.00.18.0003	*5.02.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*		*45,856,300.00*		*45,856,300.00*	*100.00*			-	

		Pemerintah Daerah									
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel		45,856,300.00		45,856,300.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0003	*5.02.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*404,372,000.00*		*376,816,000.00*	*93.19*			*27,556,000.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		9,000,000.00		7,300,000.00	81.11			1,700,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		31,836,000.00		11,000,000.00	34.55			20,836,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		363,536,000.00		358,516,000.00	98.62			5,020,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		29,610,000.00		29,610,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0003	*5.02.04.1.01*	*Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*		*29,610,000.00*		*29,610,000.00*	*100.00*			-	
5.02.0.00.0.00.18.0003	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah		29,610,000.00		29,610,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0004		UPT PENDAPATAN TIMIKA		2,666,158,000.00		2,606,223,915.00	97.75			59,934,085.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1,648,387,000.00		1,591,704,915.00	96.56			56,682,085.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	*5.02.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*1,111,732,000.00*		*1,096,987,239.00*	*98.67*			*14,744,761.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		19,287,300.00		19,287,300.00	100.00			-	

5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		240,699,800.00		238,115,000.00	98.93			2,584,800.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		52,020,000.00		51,210,000.00	98.44			810,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		82,380,500.00		76,592,000.00	92.97			5,788,500.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		283,592,400.00		283,328,000.00	99.91			264,400.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH		433,752,000.00		428,454,939.00	98.78			5,297,061.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	*5.02.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*100,000,000.00*		*94,950,000.00*	*94.95*			*5,050,000.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,000,000.00		94,950,000.00	94.95			5,050,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	*5.02.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*381,005,000.00*		*364,207,676.00*	*95.59*			*16,797,324.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		14,300,000.00		14,300,000.00	100.00			-	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		90,465,000.00		88,751,676.00	98.11			1,713,324.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		276,240,000.00		261,156,000.00	94.54			15,084,000.00	

5.02.0.00.0.00.18.0004	*5.02.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*55,650,000.00*		*35,560,000.00*	*63.90*			*20,090,000.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		48,940,000.00		29,105,000.00	59.47			19,835,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6,710,000.00		6,455,000.00	96.20			255,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1,017,771,000.00		1,014,519,000.00	99.68			3,252,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	*5.02.04.1.01*	*Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*		*1,017,771,000.00*		*1,014,519,000.00*	*99.68*			*3,252,000.00*	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		141,000,000.00		140,900,000.00	99.93			100,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		176,400,000.00		175,940,000.00	99.74			460,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		382,225,000.00		380,099,000.00	99.44			2,126,000.00	
5.02.0.00.0.00.18.0004	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah		318,146,000.00		317,580,000.00	99.82			566,000.00	

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang terdiri dari 12 (Dua Belas Program) Program, 32 (Tiga Puluh Dua) Kegiatan, dan 138 (Seratus Tigapuluh Delapan) Sub Kegiatan. Adapun pagu Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.323,681,662,688,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 1.182,213,443,984 ,00, dengan persentase realisasi sebesar 89,31%.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.03.5.04.0.00.19.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		32,724,413,781.00		23,646,253,404.00	72.26			9,078,160,377.00	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		9,098,397,981.00		7,254,121,718.00	79.73			1,844,276,263.00	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		98,217,800.00		84,907,800.00	86.45			13,310,000.00	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	35,364,000.00	1 Dokumen	35,364,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	35,000,000.00	1 Dokumen	21,690,000.00	61.97	1 Dokumen	61.97	13,310,000.00	Pajak Air Permukaan
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	27,853,800.00	1 Laporan	27,853,800.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*3,049,358,181.00*		*2,950,847,518.00*	*96.77*			*98,510,663.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	3,005,844,181.00	40 Orang/ Bulan	2,922,467,518.00	97.23	40 Orang/ Bulan	97.23	83,376,663.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Kel/Kampung								
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	43,514,000.00	100 Dokumen	28,380,000.00	65.22	100 Dokumen	65.22	15,134,000.00	Pajak Air Permukaan
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*623,696,000.00*		*596,990,752.00*	*95.72*			*26,705,248.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	123,696,000.00	1 Paket	123,696,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	500,000,000.00	50 Orang	473,294,752.00	94.66	50 Orang	94.66	26,705,248.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*3,842,107,000.00*		*2,418,913,165.00*	*62.96*			*1,423,193,835.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	29,981,000.00	1 Paket	29,981,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	33,865,000.00	1 Paket	28,295,800.00	83.55	1 Paket	83.55	5,569,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,623,802,000.00	1 Paket	881,539,900.00	54.29	1 Paket	54.29	742,262,100.00	Pajak Air Permukaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya,

											Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	915,233,000.00	1 Paket	659,123,400.00	72.02	1 Paket	72.02	256,109,600.00	Pajak Air Permukaan
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	415,534,000.00	1 Laporan	123,446,519.00	29.71	1 Laporan	29.71	292,087,481.00	Pajak Air Permukaan
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	823,692,000.00	60 Laporan	696,526,546.00	84.56	60 Laporan	84.56	127,165,454.00	Pajak Air Permukaan, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*640,099,000.00*		*600,731,040.00*	*93.85*			*39,367,960.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	149,880,000.00	1 Paket	140,444,640.00	93.70	1 Paket	93.70	9,435,360.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	490,219,000.00	1 Unit	460,286,400.00	93.89	1 Unit	93.89	29,932,600.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*794,922,000.00*		*601,731,443.00*	*75.70*			*193,190,557.00*	

5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	25,116,000.00	1 Laporan	25,116,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	130,224,000.00	1 Laporan	129,209,443.00	99.22	1 Laporan	99.22	1,014,557.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	639,582,000.00	1 Laporan	447,406,000.00	69.95	1 Laporan	69.95	192,176,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*49,998,000.00*		-	-			*49,998,000.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	49,998,000.00	1 Unit	-	-	1 Unit	-	49,998,000.00	Pajak Air Permukaan
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		7,102,318,300.00		3,146,179,318.00	44.30			3,956,138,982.00	
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.02.1.01*	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*		*1,666,393,300.00*		*803,449,528.00*	*48.21*			*862,943,772.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	672,108,000.00	2 Dokumen	263,205,383.00	39.16	2 Dokumen	39.16	408,902,617.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	17,534,000.00	1 Laporan	14,969,540.00	85.37	1 Laporan	85.37	2,564,460.00	Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH)

			Semua Kel/Kampung								
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	198,355,500.00	2 Lembaga	92,295,500.00	46.53	2 Lembaga	46.53	106,060,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	283,824,800.00	1 Dokumen	59,547,998.00	20.98	1 Dokumen	20.98	224,276,802.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	494,571,000.00	1 Dokumen	373,431,107.00	75.51	1 Dokumen	75.51	121,139,893.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.02.1.02*	*Mutasi dan Promosi ASN*		*3,872,505,000.00*		*1,504,433,368.00*	*38.85*			*2,368,071,632.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	772,505,000.00	1 Dokumen	752,230,952.00	97.38	1 Dokumen	97.38	20,274,048.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	600,000,000.00	1 Laporan	507,051,930.00	84.51	1 Laporan	84.51	92,948,070.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,500,000,000.00	1 Dokumen	245,150,486.00	9.81	1 Dokumen	9.81	2,254,849,514.00	Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.03.02.1.04*	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*		*1,563,420,000.00*		*838,296,422.00*	*53.62*			*725,123,578.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	342,892,000.00	1 Dokumen	302,813,600.00	88.31	1 Dokumen	88.31	40,078,400.00	*Dana Bagi Hasil (DBH)*
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	65,711,000.00	2 Laporan	46,223,901.00	70.34	2 Laporan	70.34	19,487,099.00	Pajak Air Permukaan
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	263,828,000.00	200 Orang	124,949,312.00	47.36	200 Orang	47.36	138,878,688.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	607,125,000.00	50 Orang	259,501,191.00	42.74	50 Orang	42.74	347,623,809.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	167,318,000.00	1 Laporan	68,327,518.00	40.84	1 Laporan	40.84	98,990,482.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua	116,546,000.00	1 Dokumen	36,480,900.00	31.30	1 Dokumen	31.30	80,065,100.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

			Distrik, Semua Kel/Kampung								
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		16,523,697,500.00		13,245,952,368.00	80.16			3,277,745,132.00	
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.04.02.1.01*	*Pengembangan Kompetensi Teknis*		*300,000,000.00*		-	-			*300,000,000.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		300,000,000.00		-	-			300,000,000.00	
5.03.5.04.0.00.19.0000	*5.04.02.1.02*	*Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*		*16,223,697,500.00*		*13,245,952,368.00*	*81.65*			*2,977,745,132.00*	
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	247,945,500.00	300 Orang	91,328,283.00	36.83	300 Orang	36.83	156,617,217.00	Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	300,000,000.00	0 Dokumen	174,184,245.00	58.06	0 Dokumen	58.06	125,815,755.00	Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas

											Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
5.03.5.04.0.00.19.0000	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		15,675,752,000.00		12,980,439,840.00	82.81			2,695,312,160.00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		2,909,485,500.00		2,292,124,026.00	78.78			617,361,474.00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.05.02.1.01*	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*		*772,400,000.00*		*461,995,784.00*	*59.81*			*310,404,216.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		772,400,000.00		461,995,784.00	59.81			310,404,216.00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.05.02.1.02*	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*		*503,013,800.00*		*473,363,900.00*	*94.11*			*29,649,900.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		503,013,800.00		473,363,900.00	94.11			29,649,900.00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	*5.05.02.1.03*	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*		*1,634,071,700.00*		*1,356,764,342.00*	*83.03*			*277,307,358.00*	
5.01.5.05.0.00.17.0000	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1,634,071,700.00		1,356,764,342.00	83.03			277,307,358.00	

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan yang terdiri dari 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan, dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan. Adapun pagu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 32.724,413,781,00, dan Terealisasi sebesar Rp. 23,646,253,404. ,00, dengan persentase realisasi sebesar 72,26%

INSPEKTORAT

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.0.00.0.00.20.0000		INSPEKTORAT		41,806,481,336.00		32,491,207,401.00	77.72			9,315,273,935.00	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		23,748,463,536.00		20,168,467,719.00	84.93			3,579,995,817.00	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,000,383,000.00		768,393,000.00	76.81			231,990,000.00	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		347,830,000.00	3 Dokumen	239,590,000.00	68.88	3 Dokumen	68.88	108,240,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH		263,160,000.00	1 Dokumen	188,160,000.00	71.50	1 Dokumen	71.50	75,000,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH		215,431,000.00	1 Dokumen	179,131,000.00	83.15	1 Dokumen	83.15	36,300,000.00	Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH		173,962,000.00	2 Laporan	161,512,000.00	92.84	2 Laporan	92.84	12,450,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*4,156,989,129.00*		*3,844,721,000.00*	*92.49*			*312,268,129.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,556,647,129.00	39 Orang/ Bulan	3,436,734,000.00	96.63	39 Orang/ Bulan	96.63	119,913,129.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH		218,080,000.00	1 Laporan	104,775,000.00	48.04	1 Laporan	48.04	113,305,000.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH		382,262,000.00		303,212,000.00	79.32			79,050,000.00	
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*4,221,341,900.00*		*3,151,327,058.00*	*74.65*			*1,070,014,842.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		282,088,900.00	1 Paket	279,338,900.00	99.03	1 Paket	99.03	2,750,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan

											Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,110,486,000.00	200 Orang	1,603,270,084.00	75.97	200 Orang	75.97	507,215,916.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	968,992,000.00	150 Orang	766,971,000.00	79.15	150 Orang	79.15	202,021,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	859,775,000.00	25 Orang	501,747,074.00	58.36	25 Orang	58.36	358,027,926.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*9,726,946,627.00*		*8,248,219,973.00*	*84.80*			*1,478,726,654.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		185,966,107.00	1 Paket	185,223,910.00	99.60	1 Paket	99.60	742,197.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		736,234,520.00	1 Paket	732,060,320.00	99.43	1 Paket	99.43	4,174,200.00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1,117,000,000.00	1 Paket	1,117,000,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1,600,000,000.00	1 Paket	1,600,000,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		3,175,934,000.00		2,594,310,000.00	81.69			581,624,000.00	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,811,812,000.00	1 Laporan	1,919,625,743.00	68.27	1 Laporan	68.27	892,186,257.00	Pajak Air Permukaan
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*653,228,300.00*		*636,927,900.00*	*97.50*			*16,300,400.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel		79,564,000.00	1 Paket	79,564,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		573,664,300.00	25 Unit	557,363,900.00	97.16	25 Unit	97.16	16,300,400.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*3,688,243,500.00*		*3,220,655,708.00*	*87.32*			*467,587,792.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		300,000,000.00	1 Laporan	300,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		200,147,000.00	1 Laporan	123,953,208.00	61.93	1 Laporan	61.93	76,193,792.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,188,096,500.00	1 Laporan	2,796,702,500.00	87.72	1 Laporan	87.72	391,394,000.00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*301,331,080.00*		*298,223,080.00*	*98.97*			*3,108,000.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	92,260,000.00	1 Unit	89,152,000.00	96.63	1 Unit	96.63	3,108,000.00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		159,200,000.00	15 Unit	159,200,000.00	100.00	15 Unit	100.00	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		49,871,080.00	1 Unit	49,871,080.00	100.00	1 Unit	100.00	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		11,508,817,800.00		7,229,194,682.00	62.81			4,279,623,118.00	
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.02.1.01*	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*		*9,657,540,000.00*		*6,418,592,882.00*	*66.46*			*3,238,947,118.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,355,882,000.00	22 Laporan	1,425,826,000.00	60.52	22 Laporan	60.52	930,056,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan

											Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,732,860,000.00	22 Laporan	1,950,582,582.00	71.38	22 Laporan	71.38	782,277,418.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,253,638,000.00	22 Laporan	902,645,000.00	72.00	22 Laporan	72.00	350,993,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,755,300,000.00	22 Laporan	1,404,880,800.00	80.04	22 Laporan	80.04	350,419,200.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	665,000,000.00	16 Laporan	150,700,000.00	22.66	16 Laporan	22.66	514,300,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal		397,457,000.00	1 Kesepakatan	226,057,000.00	56.88	1 Kesepakatan	56.88	171,400,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		497,403,000.00	3 Dokumen	357,901,500.00	71.95	3 Dokumen	71.95	139,501,500.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.02.1.02*	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*		*1,851,277,800.00*		*810,601,800.00*	*43.79*			*1,040,676,000.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		557,601,000.00	1 Laporan	-	-	1 Laporan	-	557,601,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan

											Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,293,676,800.00	12 Laporan	810,601,800.00	62.66	12 Laporan	62.66	483,075,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		6,549,200,000.00		5,093,545,000.00	77.77			1,455,655,000.00	
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.03.1.01*	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*		*570,280,000.00*		*433,480,000.00*	*76.01*			*136,800,000.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		285,140,000.00	5 Rekomendasi	216,740,000.00	76.01	5 Rekomendasi	76.01	68,400,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		285,140,000.00	5 Rekomendasi	216,740,000.00	76.01	5 Rekomendasi	76.01	68,400,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	*6.01.03.1.02*	*Pendampingan dan Asistensi*		*5,978,920,000.00*		*4,660,065,000.00*	*77.94*			*1,318,855,000.00*	
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,572,330,000.00	22 Perangkat Daerah	1,151,974,000.00	73.27	22 Perangkat Daerah	73.27	420,356,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,525,158,000.00	22 Perangkat Daerah	1,117,766,000.00	73.29	22 Perangkat Daerah	73.29	407,392,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,187,221,000.00	12 Kegiatan	1,827,462,000.00	83.55	12 Kegiatan	83.55	359,759,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
6.01.0.00.0.00.20.0000	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		694,211,000.00	8 Perangkat Daerah	562,863,000.00	81.08	8 Perangkat Daerah	81.08	131,348,000.00	Lain-lain PAD Yang Sah, Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis,

											Pajak Alat Berat, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

Pada Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 3 (Tiga) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan, dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan. Adapun pagu Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 41.806,481,336,00, dan Terealisasi sebesar Rp. 32.491,207,401,00, dengan persentase realisasi sebesar 77,72%

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8.01.0.00.0.00.21.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		145,095,918,987.00		124,731,307,183.00	85.96			20,364,611,804.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		17,167,564,094.00		16,370,136,625.00	95.36			797,427,469.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*1,446,185,600.00*		*1,117,296,000.00*	*77.26*			*328,889,600.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	597,137,000.00	1 Dokumen	593,932,400.00	99.46	1 Dokumen	99.46	3,204,600.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	429,418,600.00	1 Dokumen	135,923,600.00	31.65	1 Dokumen	31.65	293,495,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	419,630,000.00	4 Laporan	387,440,000.00	92.33	4 Laporan	92.33	32,190,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*2,695,051,076.00*		*2,585,018,957.00*	*95.92*			*110,032,119.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	2,487,351,076.00	25 Orang/ Bulan	2,377,318,957.00	95.58	25 Orang/ Bulan	95.58	110,032,119.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

			Semua Kel/Kampung								
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	207,700,000.00	4 Laporan	207,700,000.00	100.00	4 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*1,510,202,000.00*		*1,406,255,732.00*	*93.12*			*103,946,268.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	143,146,000.00	1 Paket	143,146,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	374,000,000.00	1 Dokumen	369,432,000.00	98.78	1 Dokumen	98.78	4,568,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	993,056,000.00	5 Orang	893,677,732.00	89.99	5 Orang	89.99	99,378,268.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*6,640,253,418.00*		*6,504,371,936.00*	*97.95*			*135,881,482.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	238,720,000.00	1 Paket	197,916,800.00	82.91	1 Paket	82.91	40,803,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	100.00	1 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)

			Semua Kel/Kampung								
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	206,312,418.00	1 Paket	206,246,000.00	99.97	1 Paket	99.97	66,418.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	300,000,000.00	2 Paket	300,000,000.00	100.00	2 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,685,457,000.00	2 Laporan	2,642,093,136.00	98.39	2 Laporan	98.39	43,363,864.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*3,888,052,000.00*		*3,882,579,000.00*	*99.86*			*5,473,000.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,473,600,000.00	6 Unit	3,469,889,000.00	99.89	6 Unit	99.89	3,711,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	414,452,000.00	5 Unit	412,690,000.00	99.57	5 Unit	99.57	1,762,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*987,820,000.00*		*874,615,000.00*	*88.54*			*113,205,000.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	100.00	1 Laporan	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	109,380,000.00	1 Laporan	8,730,000.00	7.98	1 Laporan	7.98	100,650,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	778,440,000.00	1 Laporan	765,885,000.00	98.39	1 Laporan	98.39	12,555,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		14,900,179,000.00		11,003,220,258.00	73.85			3,896,958,742.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.02.1.01*	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*		*14,900,179,000.00*		*11,003,220,258.00*	*73.85*			*3,896,958,742.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,000,000,000.00		1,180,408,000.00	39.35	-	39.35	1,819,592,000.00	

		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,265,803,000.00		1,265,729,500.00	99.99	-	99.99	73,500.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,894,027,000.00	1 Dokumen	2,994,520,000.00	76.90	1 Dokumen	76.90	899,507,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,571,384,000.00	2 Dokumen	3,226,314,300.00	90.34	2 Dokumen	90.34	345,069,700.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,168,965,000.00	100 Orang	2,336,248,458.00	73.72	100 Orang	73.72	832,716,542.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		7,074,647,600.00		5,456,062,000.00	77.12			1,618,585,600.00	

8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.03.1.01*	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*		*7,074,647,600.00*		*5,456,062,000.00*	*77.12*			*1,618,585,600.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	254,880,000.00		254,800,000.00	99.97	-	99.97	80,000.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,		2,339,935,000.00		1,173,680,000.00	50.16			1,166,255,000.00	

		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2,586,608,600.00		2,343,067,000.00	90.58			243,541,600.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,		1,893,224,000.00		1,684,515,000.00	88.98			208,709,000.00	

		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		17,930,940,400.00		9,739,937,000.00	54.32			8,191,003,400.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.04.1.01*	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*		*17,930,940,400.00*		*9,739,937,000.00*	*54.32*			*8,191,003,400.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		166,160,000.00		164,150,000.00	98.79			2,010,000.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan		2,339,935,000.00		1,981,780,000.00	84.69			358,155,000.00	

		Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		14,000,000,400.00		6,200,000,000.00	44.29			7,800,000,400.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1,424,845,000.00		1,394,007,000.00	97.84			30,838,000.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		3,993,809,000.00		2,999,432,200.00	75.10			994,376,800.00	

8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.05.1.01*	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*		*3,993,809,000.00*		*2,999,432,200.00*	*75.10*			*994,376,800.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		181,670,000.00		-	-			181,670,000.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1,590,724,000.00		1,365,293,000.00	85.83			225,431,000.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya		2,221,415,000.00		1,634,139,200.00	73.56			587,275,800.00	

		dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		84,028,778,893.00		79,162,519,100.00	94.21			4,866,259,793.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	*8.01.06.1.01*	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*		*84,028,778,893.00*		*79,162,519,100.00*	*94.21*			*4,866,259,793.00*	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan		243,783,000.00		243,783,000.00	100.00			-	

		Konflik di Daerah									
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		15,739,147,000.00		14,799,972,100.00	94.03			939,174,900.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		57,267,236,893.00		56,382,693,000.00	98.46			884,543,893.00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang		8,150,600,000.00		5,522,060,000.00	67.75			2,628,540,000.00	

		Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
8.01.0.00.0.00.21.0000	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,628,012,000.00	1 Dokumen	2,214,011,000.00	84.25	1 Dokumen	84.25	414,001,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari 6 (Enam) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan, dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan. Adapun pagu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 145.095,918,987 ,00, dan Terealisasi sebesar Rp. 124.731,307,183,00, dengan persentase realisasi sebesar 85,96%.

MAJELIS RAKYAT PAPUA – PROVINSI PAPUA TENGAH

KODE		URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp)	TARGET KINERJA	REALIASASI				SISA PAGU (Rp)	SUMBER DANA
						KEUANGAN		HASIL KINERJA	%		
ORGANISASI	PROGRAM					Rp	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
9.02.0.00.0.00.22.0000		MAJELIS RAKYAT PAPUA-PROVINSI PAPUA TENGAH		126,422,487,648.00		100,286,305,718.00	79.33			26,136,181,930.00	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		31,835,398,802.00		30,585,063,285.00	96.07			1,250,335,517.00	
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.01.1.01*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*643,287,300.00*		*642,842,100.00*	*99.93*			*445,200.00*	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	107,929,600.00	4 Dokumen	107,929,600.00	100.00	4 Dokumen	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	156,778,000.00	1 Dokumen	156,778,000.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	72,807,800.00	4 Dokumen	72,362,600.00	99.39	4 Dokumen	99.39	445,200.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	126,875,200.00	1 Dokumen	126,875,200.00	100.00	1 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	74,412,000.00	4 Dokumen	74,412,000.00	100.00	4 Dokumen	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Semua Kota/Kab,	104,484,700.00	4 Laporan	104,484,700.00	100.00	4 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Semua Distrik, Semua Kel/Kampung								
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.01.1.02*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*2,803,719,863.00*		*2,725,763,128.00*	*97.22*			*77,956,735.00*	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,697,980,263.00	20 Orang/ Bulan	2,620,023,528.00	97.11	20 Orang/ Bulan	97.11	77,956,735.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	105,739,600.00	0 Laporan	105,739,600.00	100.00	0 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.01.1.03*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*17,979,000.00*		*17,979,000.00*	*100.00*			-	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	17,979,000.00	0 Dokumen	17,979,000.00	100.00	0 Dokumen	100.00	-	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.01.1.05*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*3,315,497,000.00*		*2,874,814,612.00*	*86.71*			*440,682,388.00*	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,315,497,000.00	0 Orang	2,874,814,612.00	86.71	0 Orang	86.71	440,682,388.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.01.1.06*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*12,711,855,200.00*		*12,423,599,112.00*	*97.73*			*288,256,088.00*	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	80,151,000.00	0 Paket	80,151,000.00	100.00	0 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua	656,679,300.00	0 Paket	656,544,900.00	99.98	0 Paket	99.98	134,400.00	Dana Bagi Hasil (DBH),

			Distrik, Semua Kel/Kampung								Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,238,752,000.00	0 Paket	1,238,748,000.00	100.00	0 Paket	100.00	4,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	192,986,900.00	0 Paket	192,986,900.00	100.00	0 Paket	100.00	-	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	102,600,000.00	0 Dokuimen	21,780,000.00	21.23	0 Dokumen	21.23	80,820,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	6,990,148,000.00	0 Laporan	6,990,117,000.00	100.00	0 Laporan	100.00	31,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	3,450,538,000.00	0 Laporan	3,243,271,312.00	93.99	0 Laporan	93.99	207,266,688.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.01.1.07*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*678,580,000.00*		*670,670,000.00*	*98.83*			*7,910,000.00*	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	448,000,000.00	2 Unit	440,090,000.00	98.23	2 Unit	98.23	7,910,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	230,580,000.00	0 Unit	230,580,000.00	100.00	0 Unit	100.00	-	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan

9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.01.1.08*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*10,798,163,000.00*		*10,682,677,894.00*	*98.93*			*115,485,106.00*	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	73,384,000.00	0 Laporan	73,384,000.00	100.00	0 Laporan	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	212,133,000.00	0 Laporan	103,007,394.00	48.56	0 Laporan	48.56	109,125,606.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	10,512,646,000.00	0 Laporan	10,506,286,500.00	99.94	0 Laporan	99.94	6,359,500.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.01.1.09*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*866,317,439.00*		*546,717,439.00*	*63.11*			*319,600,000.00*	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	352,640,000.00	0 Unit	33,040,000.00	9.37	0 Unit	9.37	319,600,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	513,677,439.00	0 Unit	513,677,439.00	100.00	0 Unit	100.00	-	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA TENGAH		94,587,088,846.00		69,701,242,433.00	73.69			24,885,846,413.00	
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.02.3.01*	*Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP-* Provinsi Papua Tengah		*39,918,359,000.00*		*30,222,056,554.00*	*75.71*			*9,696,302,446.00*	

9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.01.0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,015,635,400.00	6 Dokumen	1,932,949,400.00	95.90	6 Dokumen	95.90	82,686,000.00	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT], Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.01.0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	11,091,634,100.00	8 Dokumen	8,447,714,325.00	76.16	8 Dokumen	76.16	2,643,919,775.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.01.0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya		10,749,222,600.00		6,164,107,763.00	57.34			4,585,114,837.00	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.01.0005	Penyusunan Peraturan MRP - PROVINSI PAPUA TENGAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,104,005,700.00	6 Dokumen	2,044,485,700.00	97.17	6 Dokumen	97.17	59,520,000.00	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT], Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.01.0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	5,724,400,100.00	6 Unit	4,544,762,200.00	79.39	6 Unit	79.39	1,179,637,900.00	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT],

			Semua Kel/Kampung								Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.01.0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP - PROVINSI PAPUA TENGAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	1,050,000,000.00	42 Dokumen	1,050,000,000.00	100.00	42 Dokumen	100.00	-	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT], Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.01.0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP - PROVINSI PAPUA TENGAH	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,183,461,100.00	8 Dokumen	6,038,037,166.00	84.05	8 Dokumen	84.05	1,145,423,934.00	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT], Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
9.02.0.00.0.00.22.0000	*9.02.02.3.02*	*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban*		*54,668,729,846.00*		*39,479,185,879.00*	*72.22*			*15,189,543,967.00*	
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.02.0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	21,210,995,246.00	42 Orang	21,067,214,979.00	99.32	42 Orang	99.32	143,780,267.00	Dana Alokasi Umum (DAU)

9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.02.0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,188,460,000.00	3 Dokumen	2,156,460,000.00	98.54	3 Dokumen	98.54	32,000,000.00	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT], Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.02.0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi, Perdasus dan Pergub	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,188,460,000.00	10 Dokumen	2,156,330,000.00	98.53	10 Dokumen	98.53	32,130,000.00	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT], Dana Bagi Hasil (DBH)
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.02.0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,625,000,000.00	4 Dokumen	2,625,000,000.00	100.00	4 Dokumen	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.02.0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	2,625,000,000.00	3 Dokumen	2,625,000,000.00	100.00	3 Dokumen	100.00	-	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.02.0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	8,210,384,700.00	8 Dokumen	6,282,928,700.00	76.52	8 Dokumen	76.52	1,927,456,000.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan, Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.02.0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Semua Kota/Kab, Semua Distrik,	8,575,737,200.00	8 Dokumen	988,442,200.00	11.53	8 Dokumen	11.53	7,587,295,000.00	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT], Sisa

			Semua Kel/Kampung								Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
9.02.0.00.0.00.22.0000	9.02.02.3.02.0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Semua Kota/Kab, Semua Distrik, Semua Kel/Kampung	7,044,692,700.00	8 Dokumen	1,577,810,000.00	22.40	8 Dokumen	22.40	5,466,882,700.00	Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial

Pada Tahun Anggaran 2025 Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kekhususan Papua yang terdiri dari 2 (Dua) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Adapun pagu Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 126.422,487,648 ,00, dan Terealisasi sebesar Rp. 100.286,305,718,00, dengan presentase realisasi sebesar 79,33%.

Tabel 3.
Evaluasi Capaian Program SPM Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 - 2025
LAPORAN PENERAPAN SPM PROVINSI PAPUA TENGAH DAN 8 KABUPATEN/KOTA PPT TW II TAHUN 2026

Kabupaten Mimika & Nabire

KAB. MIMIKA

NO	BIDANG	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 1)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 2)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 3)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 4)	LIHAT 2026 (TW 1)
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (89.66%)	Sudah Melakukan Input (89.66%)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
2	KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (97.79%)	Sudah Melakukan Input (99.45%)	Sudah Melakukan Input (0.55 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (60.00 %)	Sudah Melakukan Input (70.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (100.00%)	Sudah Melakukan Input (100.00%)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
5	TRANTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input (57.36 %)	Sudah Melakukan Input (61.27 %)	Sudah Melakukan Input (23.12 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	TRANTIBUM	Sudah Melakukan Input (85.71%)	Sudah Melakukan Input (71.43 %)	Sudah Melakukan Input (42.86 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	KEBENCANAAN	Sudah Melakukan Input (39.67 %)	Sudah Melakukan Input (50.67 %)	Sudah Melakukan Input (26.67 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	DAMKAR	Sudah Melakukan Input (85.71%)	Sudah Melakukan Input (85.71%)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
6	SOSIAL	Sudah Melakukan Input (31.67 %)	Sudah Melakukan Input (65.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026

KAB. NABIRE

NO	BIDANG	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 1)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 2)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 3)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 4)	LIHAT 2026 (TW 1)
1	PENDIDIKAN	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (75.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
2	KESEHATAN	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (4.97 %)	Sudah Melakukan Input (0.55 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
3	PEKERJAAN UMUM	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
4	PERUMAHAN RAKYAT	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
5	TRANTIBUMLINMAS	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	TRANTIBUM	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
	KEBENCANAAN	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
	DAMKAR	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
	SOSIAL	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026

Kabupaten Dogiyai & Puncak

KAB. DOGIYAI

NO	BIDANG	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 1)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 2)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 3)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 4)	LIHAT 2026 (TW 1)
1	PENDIDIKAN	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
2	KESEHATAN	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
3	PEKERJAAN UMUM	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
4	PERUMAHAN RAKYAT	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
5	TRANTIBUMLINMAS	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	TRANTIBUM	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
	KEBENCANAAN	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
	DAMKAR	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
6	SOSIAL	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026

KAB. PUNCAK

NO	BIDANG	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 1)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 2)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 3)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 4)	LIHAT 2026 (TW 1)
1	PENDIDIKAN	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (89.86%)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
2	KESEHATAN	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
3	PEKERJAAN UMUM	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
4	PERUMAHAN RAKYAT	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
5	TRANTIBUMLINMAS	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	TRANTIBUM	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
	KEBENCANAAN	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
	DAMKAR	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
	SOSIAL	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026

Kabupaten Deiyai & Intan Jaya

KAB. DEIYAI						
NO	BIDANG	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 1)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 2)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 3)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 4)	LIHAT 2026 (TW 1)
1	PENDIDIKAN	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
2	KESEHATAN	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
3	PEKERJAAN UMUM	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
4	PERUMAHAN RAKYAT	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
5	TRANTIBUMLINMAS	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	TRANTIBUM	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
	KEBENCANAAN	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
	DAMKAR	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
6	SOSIAL	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026

KAB. INTAN JAYA						
NO	BIDANG	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 1)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 2)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 3)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 4)	LIHAT 2026 (TW 1)
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (51.72 %)	Sudah Melakukan Input (51.72 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
2	KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (85.08%)	Sudah Melakukan Input (68.40%)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (10.00 %)	Sudah Melakukan Input (50.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
4	PERUMAHAN RAKYAT	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
5	TRANTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input (11.77 %)	Sudah Melakukan Input (16.47 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	TRANTIBUM	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	KEBENCANAAN	Sudah Melakukan Input (23.53 %)	Sudah Melakukan Input (32.94 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	DAMKAR	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	Belum Melakukan Upload Format-3	2026
	SOSIAL	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (8.33 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026

Kabupaten Puncak Jaya & Paniai

KAB. PUNCAK JAYA

NO	BIDANG	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 1)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 2)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 3)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 4)	LIHAT 2026 (TW 1)
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (96.55%)	Sudah Melakukan Input (86.21%)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
2	KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (29.28 %)	Sudah Melakukan Input (26.18 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (50.00 %)	Sudah Melakukan Input (70.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (30.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
5	TRANTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input (18.48 %)	Sudah Melakukan Input (34.86 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	TRANTIBUM	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (28.57 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	KEBENCANAAN	Sudah Melakukan Input (36.36 %)	Sudah Melakukan Input (78.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	DAMKAR	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	Belum Melakukan Upload Format-5	2026
6	SOSIAL	Sudah Melakukan Input (100.00%)	Sudah Melakukan Input (13.33 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026

KAB. PANIAI

NO	BIDANG	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 1)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 2)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 3)	KETERISIAN INPUTING 2026 (TW 4)	LIHAT 2026 (TW 1)
1	PENDIDIKAN	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (44.83 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
2	KESEHATAN	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (86.69%)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (30.00 %)	Sudah Melakukan Input (80.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (30.00 %)	Sudah Melakukan Input (33.33 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
5	TRANTIBUMLINMAS	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (48.48 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	TRANTIBUM	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (42.86 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	KEBENCANAAN	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (45.33 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	DAMKAR	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (57.14 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026
	SOSIAL	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (53.33 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	2026

2.4 . Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRPT

Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Pokok-pokok pikiran DPRPT merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPRPT yang kemudian dihimpun dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta keselarasan dengan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.

Pokok-pokok pikiran DPRPT yang diakomodasi dalam RKPD Tahun 2027 telah melalui proses verifikasi dan penelaahan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa usulan yang disampaikan:

- sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029;
- selaras dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan Standar Pelayanan Minimal;
- memiliki indikator kinerja yang terukur;
- mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Secara umum, pokok-pokok pikiran DPRPT Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan pada beberapa bidang prioritas, antara lain:

1 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
2 Percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan konektivitas antarwilayah;
3 Penguatan ketahanan pangan, pengembangan pertanian, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat;
4 Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5 Penguatan pelayanan kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus;
6 Peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintahan;
7 Penguatan keamanan, ketenteraman, ketahanan sosial masyarakat, dan mitigasi bencana.

Hasil telaah menunjukkan bahwa sebagian besar Pokok-Pokok Pikiran DPRPT memiliki keterkaitan langsung dengan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Papua Tengah sebagaimana telah diidentifikasi dalam Bab II RKPD, yaitu:

- peningkatan kualitas pelayanan dasar;
- penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah;
- peningkatan daya saing ekonomi daerah;
- penguatan konektivitas wilayah;
- peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, Pokok-Pokok Pikiran DPRPT yang telah memenuhi kriteria teknis dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi diintegrasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah pada RKPD Tahun 2027 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Tabel 4.
Laporan Popok Pokok Pikiran Tahun 2026 Provinsi Papua Tengah

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
Energi dan Sumber Daya Mineral			
	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perkampungan	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
	Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	DINAS TENAGA KERJA,	PROGRAM PENGELOLAAN

	konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	ENERGI BARU TERBARUKAN
Inspektorat			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Reviu Laporan Kinerja	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Reviu Laporan Keuangan	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Kerja sama Pengawasan Internal	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kehutanan			
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kelautan dan Perikanan			
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kepegawaian			
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengelolaan Data Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengelolaan Mutasi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengelolaan Promosi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pengembangan Kompetensi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN

	Pegawai	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	DAERAH
	Pembinaan Disiplin ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kepemudaan dan Olahraga			
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,	DINAS KEPEMUDAAN,	PROGRAM PENGEMBANGAN

	Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	OLAHRAGA DAN PERIWISATA	KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN

	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		BUDAYA
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Pembentukan Paskibraka	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan	BADAN KESATUAN BANGSA	PROGRAM PENINGKATAN

	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	DAN POLITIK	PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN

	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		KONFLIK SOSIAL
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Kesehatan			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

	Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN

	Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Kerja sama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Pembentukan Sekretariat PPNS	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan Trantibum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Koordinasi Penanganan Pasca bencana Provinsi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN

			DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Keuangan			
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penyusunan Standar Harga	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-PERANGKAT DAERAH	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-PERANGKAT DAERAH	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

	Daerah tentang Penjabaran APBD	ASET DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	BADAN PENGELOLA	PROGRAM PENGELOLAAN

	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Konsolidasi Laporan Keuangan PERANGKAT DAERAH, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	ASET DAERAH	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Penilaian Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	BADAN PENGELOLA	PROGRAM PENGELOLAAN

	Pajak Daerah	PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PENDAPATAN DAERAH
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Penagihan Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

		ASET DAERAH	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Komunikasi dan Informatika			
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Penyediaan Akses Internet	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Relasi Media	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Penyusunan Konten	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Pelayanan Informasi Publik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	Pemulihan usaha-usaha Kecil	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

		PERDAGANGAN	
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO

		PERDAGANGAN	(UMKM)
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Lingkungan Hidup			
	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Penyusunan RPPLH Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pelaksanaan pemantauan kualitas	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,	PROGRAM PENGENDALIAN

	Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Pengelolaan sampah Regional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pangan			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung	DINAS TANAMAN PANGAN,	PROGRAM PENGELOLAAN

	Kemandirian Pangan Lainnya	HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Pariwisata			
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	Fasilitasi pembentukan badan promosi	DINAS KEPEMUDAAN,	PROGRAM PEMASARAN

	pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PARIWISATA
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

	Rehabilitasi Tanggul Sungai	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Rehabilitasi Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Revitalisasi Danau	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS di	DINAS PEKERJAAN UMUM,	PROGRAM PENGEMBANGAN

	Kawasan Strategis Provinsi	PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERMUKIMAN
	Normalisasi/Restorasi Sungai	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pembangunan Tanggul Sungai	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Rehabilitasi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM,	PROGRAM

		PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Rekonstruksi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	Pembangunan Bendungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pembangunan Bangunan Sabo	DINAS PEKERJAAN UMUM,	PROGRAM PENGELOLAAN

		PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Rehabilitasi Bangunan Sabo	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Rehabilitasi *Check* Dam	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Operasi dan Pemeliharaan Situ	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Revitalisasi Situ	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Rehabilitasi Bendungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Peningkatan *Breakwater*	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Rehabilitasi *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Peningkatan Kanal Banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Operasi dan Pemeliharaan *Breakwater/ Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Peningkatan Bangunan Sabo	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pembangunan Bendung Irigasi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

		KAWASAN PERMUKIMAN	
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Peningkatan TPA/TPST/SPA	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

		KAWASAN PERMUKIMAN	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

		KAWASAN PERMUKIMAN	
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung			
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Kampung	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PROGRAM PENATAAN KAMPUNG
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

	Kekerasan Kewenangan Provinsi		
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Penanaman Modal			
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian	DINAS PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN

	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	IKLIM PENANAMAN MODAL
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	Pengawasan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN

	merealisasikan Kegiatan Usahanya	SATU PINTU	MODAL
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pendidikan			
	Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama (Khusus OAP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pendidikan Khusus	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas	DINAS PENDIDIKAN DAN	PROGRAM PENGELOLAAN

	Sekolah (Pendidikan Khusus)	KEBUDAYAAN	PENDIDIKAN
	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD (Khusus OAP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar (Khusus OAP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi (Khusus OAP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan Asrama Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pengadaan Mebel Sekolah (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pemeliharaan Mebel (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan infrastruktur TIK (Pendidikan Khusus)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan (Khusus OAP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (Khusus OAP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

	(Khusus OAP)		
	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pendidikan dan Pelatihan			
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Penelitian dan Pengembangan			
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Perdagangan			
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG

		PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Perencanaan			
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	BADAN PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN

		PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi	BADAN PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN

	Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN

	Infrastruktur	INOVASI DAERAH	PEMBANGUNAN DAERAH
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perhubungan			
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM

	Jalan		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	Pembangunan Bandar Udara	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN

	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perkampungan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
Perindustrian			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Persandian			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Pertanahan			
	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK

			PEMBANGUNAN
	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	Penetapan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,	PROGRAM PENETAPAN TANAH

	atas bidang tanah adat/Ulayat	KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	ULAYAT
	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Kerja sama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	Pemanfaatan tanah adat daerah kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	Pemanfaatan Tanah Kosong	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Pertanian			
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan	DINAS TANAMAN PANGAN,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN

	Berbentuk Anakan	HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA

		KETAHANAN PANGAN	PERTANIAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

		KAWASAN PERMUKIMAN	
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

		KAWASAN PERMUKIMAN	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sekretariat Daerah			
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

	dan Kampung, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
	Penataan Analisis Jabatan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN

			DAN OTONOMI DAERAH
	Fasilitasi Penataan Wilayah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRPT	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM FASILITASI DAN

			KOORDINASI HUKUM
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Sekretariat DPRPT			

	Pengawasan Penggunaan Anggaran	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pembahasan Rancangan Perda	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyusunan Tata Tertib DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRPT dan Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pembahasan KUA dan PPAS	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pembahasan APBD	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pembahasan Perubahan APBD	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN

			PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pembahasan Laporan Semester	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Orientasi DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN

			FUNGSI DPRPT
	Pendalaman Tugas DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyusunan Program Kerja DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Publikasi dan Dokumentasi DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pelaksanaan Reses	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyusunan Kode Etik DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN

			PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Pengawasan Kode Etik DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRPT	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	SEKRETARIAT DPRPT	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT
Sosial			
	Penyediaan Alat Bantu	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	Penyediaan Permakanan	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Penyediaan Sandang	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Pengasuhan	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI

			SOSIAL
	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	Penyediaan Permakanan	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Statistik			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Tenaga Kerja			
	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	OPD Tujuan	Program
	Perluasan Kesempatan Kerja	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2027 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh indikator pembangunan berupa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi ketenagakerjaan, dan derajat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Gini. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi ini, digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi di tahun 2027. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2027.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja Pembangunan ekonomi pada Tahun 2025 dan Kondisi ekonomi pada awal tahun 2026. Selain itu arah kebijakan ekonomi Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan ekonomi makro yang ada.

Kebijakan perekonomian Provinsi Papua Tengah di pengaruhi dinamika perkembangan nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2025. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi Pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2027.

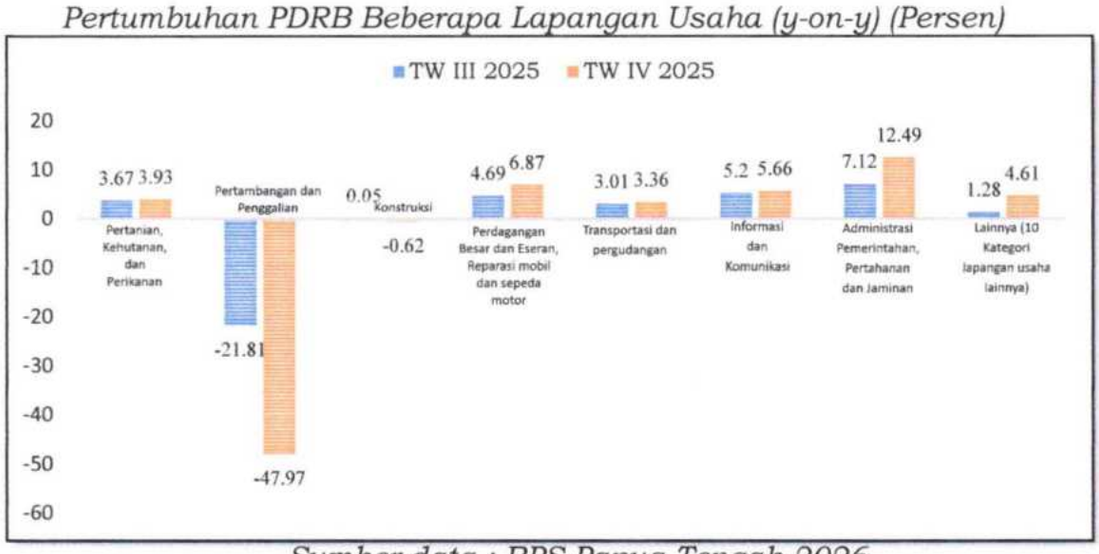
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I Tahun 2026

a. Ekonomi Makro Regional

Kinerja perekonomian Provinsi Papua Tengah pada triwulan IV 2025 dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh negatif dan mengalami kontraksi sebesar 35,59 % *(y-on-y)*, sedangkan kinerja perekonomian dengan tanpa lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh positif sebesar 4,68 % *(y-on-y)*. Dari 7 (tujuh belas) lapangan usaha, hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan, kecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar -47,97 % dan lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar -0,62%. Terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu:

1. lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib sebesar 12,49%;
2. lapangan usaha perdagangan besar dan eceran;
3. reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,87 %; dan
4. lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6,83%.

Gambar 3.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)



Sumber data : BPS Papua Tengah 2026

b. Perkembangan Inflasi

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Tengah pada November 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 2,53 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,18. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di kabupaten Nabire sebesar 4,05 % dengan IHK sebesar 115,23 dan terendah terjadi di Timika sebesar 1,77 % dengan IHK sebesar 112,16. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada:

a. kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,22 persen;
b. kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,36 persen;
c. kelompok kesehatan sebesar 2,97 persen;
d. kelompok transportasi sebesar 0,38 persen;
e. kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,77 persen;
f. kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,88 persen; dan
g. kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,57 persen.

Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu:

a. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen;
b. kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; dan
c. kelompok pendidikan sebesar 2,28 persen.

Adapun kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Adapun Perkembangan Inflasi Papua Tengah 2024-2025 *y-on-y* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 3.2
Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2024-2025



Sumber data: BPS Papua 2025

Adapun Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Papua Tengah di dua kabupaten/kota, pada November 2025 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 2,53 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,39 pada November 2024 menjadi 113,18 pada November 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,78 persen dan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 2,30 persen. Adapun IHK Papua Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

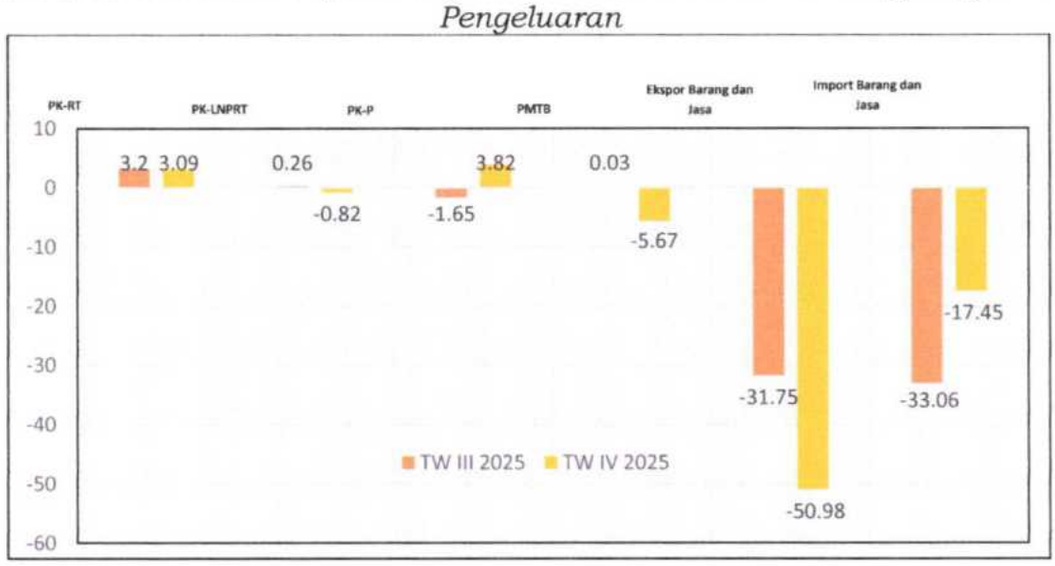
Tabel 3. 1 Perkembangan IKH dan Tingkat Inflasi Papua Tengah 2024-2025 (y-on-y)

Kelompok Pengeluaran	IHK November 2024	IHK Desember 2024	IHK November 2025	Tingkat Inflasi *m-to-m* November 2025[1] (%)	Tingkat Inflasi *y-to-d* November 2025[2] (%)	Tingkat Inflasi *y-on-y* November 2025[3] (%)	Andil Inflasi *m-to-m* November 2025 (%)	Andil Inflasi *y-on-y* November 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	110,39	110,64	113,18	0,78	2,30	2,53	0,78	2,53
Makanan, Minuman, dan Tembakau	114,43	114,82	118,11	1,20	2,87	3,22	0,54	1,43
Pakaian dan Alas Kaki	101,31	100,95	101,02	0,24	0,07	-0,29	0,01	-0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,90	104,90	105,28	-0	0,36	0,36	-0	0,05
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,55	107,51	107,27	-0,10	-0,22	-0,26	-0	-0,01
Kesehatan	105,63	106,18	108,77	0,36	2,44	2,97	0,01	0,10
Transportasi	111,22	112,47	111,64	1,67	-0,74	0,38	0,16	0,04
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,98	100,98	100,98	-0	-0	-0	-0	-0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	105,81	105,83	107,68	0,12	1,75	1,77	-0	0,02
Pendidikan	102,46	102,46	100,12	-0	-2,28	-2,28	-0	-0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,87	114,19	117,15	0,07	2,59	2,88	-0	0,12
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	118,11	117,13	134,14	0,90	14,52	13,57	0,06	0,87

3.1.1.1. PDRB/Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan Nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar nilai tambah dari *output* barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Tengah pada triwulan IV 2025 mengalami Kontraksi sebesar -35,59% dibandingkan dengan triwulan IV 2024 *(y-on-y)*. Kontraksi sangat dalam ini disebabkan oleh kontraksi pada komponen ekspor barang dan jasa yang mencapai -50,98 %. Selain komponen ekspor barang dan jasa, beberapa komponen PMTB sebesar -5,67 % dan PK-LNPRT sebesar -0,82%. Berbanding terbalik, komponen PK-P mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 3,82 % dan Komponen PK-RT Tumbuh sebesar 3,09 %. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami Kontraksi sebesar -17,45%. Adapun Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Triwulan IV Tahun 2025 menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Triwulan IV Tahun 2025 (y-to-y) menurut Pengeluaran



Sumber Data: BPS Papua Tengah 2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan memedomani Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership (PPP)*, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2027 Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Papua Tengah ditetapkan berdasarkan *mandatory spending* untuk alokasi Pendidikan 20%, Kesehatan 15%, dan Infrastruktur 25%. Penetapan ini dilakukan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan program kegiatan pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk

menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah; dan
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah.

Pada tahun anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah yang mencakup perubahan pada komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah pada tahun 2025

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Realisasi		
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	2.722.314.216.947,82	4.206.324.912.971,52	4.125.903.885.053,88
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	535.666.746.146,82	644.437.600.762,80	601.701.085.583,88
4.1.01	Pajak Daerah	525.237.697.578,00	609.116.185.732,00	543.381.687.062,40
4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	0	3.540.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.426.548.568,82	35.321.415.030,80	58.315.858.521,48
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.830.679.615.000,00	2.720.974.213.562,00	2.361.794.444.381,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.830.679.615.000,00	2.720.974.213.562,00	2.361.794.444.381,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	386.634.134.688,00	840.913.098.646,72	1.162.402.267.089,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	386.634.134.688,00	840.913.098.646,72	1.081.088.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			1.161.327.267.089,00

Sumber Data: BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2026

Mendasari pada kondisi realisasi Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana transfer ke daerah, maka diproyeksikan pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026-2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan Provinsi Papua Tengah
Tahun 2026-2027

No.	Uraian	Proyeksi	
		2026	2027
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	2.430.674.427.061,00	2.334.095.052.441,50
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	543.070.387.742,00	564.672.615.031,50
4.1.01	Pajak Daerah	527.244.037.742,00	548.846.265.031,50
4.1.02	Retribusi Daerah	76.350.000,00	76.350.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.750.000.000,00	15.750.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.047.833.162.000,00	1.047.833.162.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.047.833.162.000,00	1.047.833.162.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	839.770.877.319,00	721.589.275.410,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	838.695.877.319,00	720.514.275.410,00

Sumber Data : BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2026

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan ke depan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja Provinsi Papua Tengah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Realisasi		
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
5	BELANJA	2.144.154.911.867,84	3.725.583.867.579,43	3.780.716.535.424,56
5.1	Belanja Operasi	1.283.302.415.487,84	2.358.755.366.706,24	2.497.808.873.212,07
5.1.01	Belanja Pegawai	145.799.279.700,00	290.399.100.094,00	404.779.585.348,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.734.737.251,84	1.600.400.671.607,24	1.712.948.635.598,07
5.1.04	Belanja Subsidi	0	787.181.115,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	132.329.969.336,00	269.618.393.800,00	372.730.652.266,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	111.438.429.200,00	197.550.020.090,00	7.350.000.000,00
5.2	Belanja Modal	620.259.400.072,00	914.393.133.865,19	462.914.175.214,49
5.2.01	Belanja Modal Tanah	154.830.858.865,00	15.550.590.000,00	2.052.632.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.215.173.953,00	261.060.482.102,00	75.162.135.861,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.364.077.398,00	148.479.525.834,00	75.663.270.418,82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	260.700.606.847,00	481.889.243.504,19	305.450.854.171,67
5.2.05	Belanja Modal	632.325.157,00	1.747.717.420,00	129.315.000,00

	Aset Tetap lainnya			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.516.357.852,00	5.665.575.005,00	4.455.967.763,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.808.933.700,00	22.230.464.433,00	38.867.755.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.808.933.700,00	22.230.464.433,00	38.867.755.600,00
5.4	Belanja Transfer	231.784.162.608,00	430.204.902.575,00	781.125.731.398,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	196.784.162.608,00	336.812.585.794,00	265.000.731.398,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	35.000.000.000,00	93.392.316.781,00	516.125.000.000,00
Jumlah Belanja		2.144.154.911.867,84	3.725.583.867.579,43	3.780.716.535.424,56

Sumber Data: BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2026

Belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2023-2025 Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk:

a. pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
b. membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat; dan
c. membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun *restocking* aset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD. Proyeksi belanja tahun 2026-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Proyeksi Belanja Provinsi Papua Tengah 2026-2027

No.	Uraian	Proyeksi	
		2026	2027
1	2	3	4
5	BELANJA	2.902.320.608.072,45	2.334.095.052.441,50
5.1	Belanja Operasi	1.998.174.645.091,05	1.429.949.089.460,10
5.1.01	Belanja Pegawai	521.514.078.624,05	521.514.078.624,05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.365.327.035,00	775.139.771.404,05
5.1.04	Belanja Subsidi	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	221.085.239.432,00	101.085.239.432,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.410.000.000,00	22.410.000.000,00

5.2	Belanja Modal	580.933.678.647,00	580.933.678.647,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.109.000.000,00	20.109.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.575.078.922,00	20.575.078.922,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	445.691.768.925,00	445.691.768.925,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.598.236.800,00	92.598.236.800,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	259.594.000,00	259.594.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	48.500.000.000,00	48.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	48.500.000.000,00	48.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	274.712.284.334,40	274.712.284.334,40
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	244.006.034.334,40	244.006.034.334,40
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	30.706.250.000,00	30.706.250.000,00
Jumlah Belanja		2.144.154.911.867,84	2.334.095.052.441,50

*Sumber Data: BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2026 (data diolah)***

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan sering kali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Dalam perencanaan dokumen rencana jangka menengah, tidak diperkenankan untuk merencanakan apalagi memproyeksi SiLPA. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang.

Adapun realisasi pembiayaan Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2025

Kode	Uraian	Realisasi		
		2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.392.267.957,00	603.491.573.036,98	1.084.232.618.429,07
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.392.267.957,00	603.491.573.036,98	1.084.232.618.429,07
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah;	-	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan	-		

	ketentuan peraturan perundang-undangan.			

*Sumber Data: BPPKAD Prov Papua Tengah, 2026 (data diolah)***

Mendasari pada kondisi realisasi Tahun 2025 dan kebijakan pemerintah, maka diproyeksikan pembiayaan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026-2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Pembiayaan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023-2025

Kode	Uraian	Proyeksi	
		2026	2027
1	2	3	4
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	471.646.181.011,45	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	471.646.181.011,45	0
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah;	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	-	

*Sumber Data: BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2026 (data diolah)***

3.2.4. Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber pada Dana Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi dasar untuk percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua. Untuk itu, dukungan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah perlu dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta dialokasikan untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua Tengah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat.

Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dibangun dengan konstruksi yang bersumber dari dua dasar hukum, yaitu:

1. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
2. Kristalisasi penggalian aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.

Adapun kebijakan Otsus menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua Tengah, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT);
2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
3. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT).

Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat (3) huruf e dan f, yaitu:

1. Dana Otsus *Block Grant* (setara 1% dari DAU Nasional) yang digunakan untuk:
   a. pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;
   b. peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat;
   c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Otsus *Specific Grant* (setara 1,25% dari DAU Nasional) digunakan untuk:
   a. belanja pendidikan paling sedikit 30%;
   b. belanja kesehatan paling sedikit 20%; dan
   c. belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Dana Tambahan Insfrastruktur Papua Tengah ditujukan untuk:
   a. pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan;
   b. insfrastruktur energi listrik;
   c. insfrastruktur air bersih;
   d. insfrastruktur telekomunikasi; dan
   e. insfrastruktur sanitasi lingkungan.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Adapun Alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah di bagi ke beberapa Perangkat Daerah dapat di lihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Alokasi Belanja Daerah yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 dan 2027

No.	Uraian	Alokasi 2026	Alokasi 2027
1	2	3	4
A	Total Dana Otsus	305.239.491.000,00	305.239.491.000,00
1	Provinsi		305.239.491.000,00
B	OTSUS Penerimaan Umum (1%)	92,903.936.000,00	92,903.936.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	29.973.458.400,00	29.973.458.400,00
2	Dinas Sosial	16.800.000.000,00	16.800.000.000,00
3	Inspektorat	600.000.000,00	600.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	44.930.936.000,00	44.930.936.000,00
5	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,	600.000.000,00	600.000.000,00
C	OTSUS Berbasis Kinerja (1,25 %)	119.907.122.000,00	119.907.122.000,00
1	Dinas Pendidikan	65.972.136.600,00	65.972.136.600,00
2	Dinas Kesehatan	23.981.424.400,00	23.981.424.400,00
3	Dinas Peternakan dan Perkebunan	9.984.520.334,00	9.984.520.334,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan	9.984.520.333,00	9.984.520.333,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.984.520.333,00	9.984.520.333,00
D	Dana Tambahan Infrastruktur	92.428.433.000,00	92.428.433.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	55.457.059.800,00	55.457.059.800,00
2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	36.971.373.200,00	36.971.373.200,00

Sumber Data: Data diolah Bapperida Provinsi Papua Tengah 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2027 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target tujuan, sasaran dan isu strategis Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2027. Adapun Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan sasaran prioritas sesuai kebutuhan perencanaan dalam lingkup DOB, meskipun perlu tetap mempertimbangkan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029.

RKPD Provinsi Papua Tengah merupakan bagian tahapan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2026 dan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 - 2045, dengan tujuan untuk memperkuat Papua Tengah yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Meskipun sudah berdiri sebagai daerah otonom yang berbeda, namun arahan provinsi induk dapat dipertimbangkan untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bila memiliki kesamaan muatan dengan upaya penyelenggaraan urusan di Provinsi Papua Tengah. Pada dasarnya, prioritas pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2027.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan, sedangkan sasaran merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan. Rumusan terhadap tujuan dan sasaran Daerah telah tertuang di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 di mana dokumen tersebut merupakan dokumen transisi, yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen tahunan Provinsi Papua Tengah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sejalan dengan memperhatikan Arah Kebijakan Tahunan atau Tema Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 yaitu Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah. Berkenaan dengan perwujudan tema pembangunan Provinsi Papua Tengah maka telah menghasilkan dan menetapkan 9 (sembilan) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. T1 mewujudkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan yang berpotensi dan kompeten:
   - S1 Papua Tengah Cerdas;
2. T2 mewujudkan inisiatif kesehatan yang inovatif:
   - S2 Papua Tengah Sehat;
3. T3 meningkatkan potensi sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan:
   - S3 perlindungan sosial yang adaptif ketahanan energi;
   - S4 perwujudan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi Papua Tengah;
4. T4 penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistim administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi:
   - S5 terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif di Papua Tengah;
   - S6 terwujudnya transformasi digital Papua Tengah;
   - S7 terwujudnya ketangguhan kepemimpinan Daerah.

5. T5 memantapkan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib:
   - S8 terwujudnya hukum berkeadilan, keamanan Daerah tangguh, dan demokrasi;
6. T6 meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap;
   - S9 terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju;
   - S10 terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif;
7. T7 meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
   - S11 terwujudnya integritas ekonomi domestik dan global di Papua Tengah;
   - S12 terwujudnya stabilitas ekonomi daerah Papua Tengah;
8. Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata;
   - S13 perkotaan dan perkampungan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah;
9. Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.
   - S14 terwujudnya penerapan ekonomi hijau di Papua Tengah;
   - S15 terwujudnya lingkungan hidup berkualitas;
   - S16 terwujudnya berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan;
   - S17 terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua Tengah sudah menjadi prioritas dan tetap akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2027, dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Provinsi Papua Tengah perlu memiliki fokus pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin SDM menerima layanan yang prima.

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Papua Tengah, maka dapat dirumuskan tujuan, sasaran, program, indikator serta target kinerja pembangunan sebagai upaya pembangunan Provinsi Papua Tengah seperti pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja RPJMD Papua Tengah pada Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan Indikator	Target 2027
Tujuan 1: Mewujudkan Potensi Individu dan komunitas melalui pendidikan yang berpotensi dan kompeten.		Indeks Pembangunan manusia	(%)	61,98
	Sasaran 1: Papua Tengah Cerdas	Hasil Pembelajaran: Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada	Persen (%) Persen (%)	12,50-12,50 0,00-12,50

		Asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi		
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi	Persen (%) Persen (%)	21,24-23,74 15,68-18,18
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	(%)	7,2
		Harapan Lama Sekolah	(%)	9,81
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	(%)	9,64
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	(%)	78,78
Tujuan 2: Mewujudkan inisiatif kesehatan yang inovatif		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,53
	Sasaran 2: Papua Tengah sehat	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tahun	69,3
		Kesehatan Ibu dan Anak: Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jiwa	371
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen (%)	28,25
		Penanganan Tuberkulosis:	Persen (%)	85

		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)* (%)		
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen (%)	85
		Eliminasi Malaria Per Kabupaten	Persen (%)	67
		Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk di daerah terinfeksi	Jiwa	3200
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	Persen (%)	99
Tujuan 3: Meningkatkan potensi sumber daya alam dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan		Laju pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	8,1
		Pendapatan per kapita (juta Rupiah)	(juta rupiah)	154
	Sasaran 3: Perlindungan sosial yang adaptif ketahanan energi	Tingkat kemiskinan (%)	Persen (%)	26,50 -27,00
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persen (%)	31,21
		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persen (%)	17
		Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang	orang	300

		ketenagakerjaan		
		Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di tingkat Kab/Kota/Provinsi	unit	5
	Sasaran 4: Terwujudnya iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi Papua Tengah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Rasio	3,52
		Pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen (%)	4,85
		Pengembangan pariwisata : rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)*	Rasio	0,225
		Persentase jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (orang)*	Rasio	4,9
		Proporsi PDRB ekonomi kreatif (%)	Persen (%)	0,1
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD: Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	Persen (%)	0,375
		Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	Persen (%)	1,75
		Rasio kewirausahaan Daerah (%)	Persen (%)	0,52
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persen (%)	1,175
		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Persen (%)	2,11
		Penciptaan lapangan kerja yang baik: Tingkat pengangguran terbuka (%)	Persen (%)	2,65 – 3,12
		Proporsi	Persen	23

		penciptaan lapangan kerja Formal (%)	(%)	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	Persen (%)	53,45 – 65,00
		Tingkat penguasaan iptek (%)	Persen (%)	25
Tujuan 4: Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan mengimplementasikan sistim administrasi publik berbasis digitalisasi teknologi		Indeks reformasi birokrasi	Persen (%)	60
	Sasaran 5: Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif di Papua Tengah	Indeks reformasi hukum	Persen (%)	70,7
		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persen (%)	2,24
		Indeks pelayanan publik	Indeks	1,13
		Indeks integritas nasional	Indeks	64,32
	Sasaran 6: Terwujudnya transformasi digital Papua Tengah	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks	4
		Rasio elektrifikasi RT (%)	Rasio	47,80
	Sasaran 7: Terwujudnya Ketangguhan Kepemimpinan Daerah Papua Tengah	Indeks Kepemimpinan Daerah	Indeks	Tinggi
		Persentase Penurunan Konflik Sara	Persen (%)	43
Tujuan 5: Memantapkan lingkungan yang aman, tenteram, damai dan tertib		Penurunan angka kriminalitas	Persen (%)	9,58
	Sasaran 8: Terwujudnya hukum berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan demokrasi substansi pada Provinsi Papua Tengah	Usulan Proksi : Persentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen (%)	72,8
		Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	Persen (%)	65
		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya (%)	Persen (%)	75,5
		Indeks Demokrasi Daerah	Indeks	60,00-63,25

Tujuan 6: Meningkatkan kelestarian kekayaan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap		Indeks kohesi sosial	Skor	3,5
	Sasaran 9: Terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	49,54-49,61
		Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	81,18-81,22
	Sasaran 10: Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks pembangunan kualitas keluarga	Indeks	54,07
		Indeks ketimpangan gender	Indeks	82,17-82,32
Tujuan 7: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan		Persentase luas hutan yang dikelola masyarakat	Persen (%)	7
	Sasaran 11: Terwujudnya integritas ekonomi domestik dan global di Papua Tengah	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi	Indeks	19,4
		Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	Persen (%)	24,64-25,48
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen (%)	48,82-49,14
	Sasaran 12 : Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah Papua Tengah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen (%)	0,51
		Tingkat Inflasi (%)	Persen (%)	3,6-5,3
		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan: Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	Persen (%)	18,45
		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Persen (%)	0,32
		Nilai Transaksi saham per Provinsi berupa nilai rata-rata tahunan	Nilai	1.111.897
		Total Kredit/PDRB	Persen	13,35

		(%)	(%)	
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Persen (%)	2,81
		Inklusi Keuangan (%)	Persen (%)	87,79
Tujuan 8: Tercapainya peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Indeks	2,3
	Sasaran 13 : Perkotaan dan perkampungan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah	Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan: Proporsi kontribusi PDRB wilayah provinsi terhadap nasional	Persen	0,76
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persen	23,98
		Persentase Kampung mandiri	Persen	2,82
		persentase mantap jalan	Persen	36
Tujuan 9: Tercapainya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir		Persentase Penurunan jumlah Kampung berstatus tertinggal	Persen (%)	0,87
	Sasaran 14: Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau : Indeks ekonomi hijau Daerah	Indeks	63,4
		Indeks ekonomi biru	Indeks	24,40
		Porsi EBT dalam	Persen	26,9

		bauran energi primer (%)	(%)	
	Sasaran 15: Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,394
		Kualitas Lingkungan Hidup: Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks	82,65
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen (%)	7,86
		A. Pengelolaan Sampah - Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	Persen (%)	20,25
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	Persen (%)	40
	Sasaran 16: Terwujudnya berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Ketahanan energi, air, dan pangan: ketahanan energi		
		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	(Kwh)	353
		Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	Persen (%)	87
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen (%)	31,2
		Ketahanan Air		
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	Persen (%)	1,5
		Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Persen (%)	25
	SASARAN 17:	Indeks Risiko	Indeks	191,94-185,88

	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Bencana		
		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
		Kumulatif	Persen (%)	12,87
		Tahunan	Persen (%)	30,53

Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2029

Perumusan Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja mengacu pada hasil rumusan RPJMD Papua Tengah Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan pembangunan di Provinsi Papua Tengah dengan Dokrenda jangka menengah, sehingga penyelenggaraan urusan tetap dilakukan dalam koridor yang sama.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Tema pembangunan tahunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD. Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP 2027, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (RIPPP) yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021. Adapun tema RKPD Provinsi Papua Tengah adalah: Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah. Yang merupakan akselerasi atau perpaduan arah kebijakan tahunan antara RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua Tengah.

4.2.1. Penyelarasan dengan Ranwal RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari dokumen RPJPD, RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua Tengah. Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan tema pembangunan tahap I (tahun 2025-2029) yang memiliki fokus di dalam Provinsi Papua Tengah. Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Visi RPJP: Terwujudnya Papua Tengah yang adil, berdaya saing, maju dan berkelanjutan.

Misi RPJP:

a. mewujudkan transformasi sosial dengan memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
b. mewujudkan transformasi ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi lokal;
c. mewujudkan transformasi tata kelola dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik;
d. memantapkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas daerah;
e. memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan;
f. mewujudkan pembangunan wilayah yang adil dan merata dengan meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah;
g. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan terutama pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu;
h. mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Pada periode pembangunan tahap I, visi pembangunan Papua Tengah yaitu pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, efektif, dan efisien serta peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Tahapan ini menjadi landasan Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang perlu melakukan pemenuhan pada setiap aspek urusan pemerintahan daerah.

Pada tahap I ini, Provinsi Papua Tengah diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapanan ekonomi lokal yang berdaya saing, serta dari sisi infrastruktur Provinsi Papua Tengah perlu menyiapkan infrastruktur Pemerintahan dan infrastruktur dasar yang memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah. Selain itu, Provinsi Papua Tengah juga diarahkan untuk menangani penurunan persentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapanan pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektivitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

4.2.2. Penyelarasan dengan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 - 2029

Adapun Tema pembangunan Tahun 2027 Papua Tengah pada RPJMD yaitu "Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah".

Dengan fokus utama pembangunan adalah memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing daerah dengan memberdayakan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat Papua Tengah.

Adapun beberapa arah kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Tengah sesuai RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2029 yang harus diperhatikan dalam perumusan RKPD yaitu:

a. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Wilayah
   - Fokus: Optimalisasi potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal berbasis keunggulan daerah.
   - Arah Kebijakan:
     1) pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti kopi, kakao, sagu, dan hortikultura;
     2) revitalisasi sektor perikanan dan kelautan dengan meningkatkan akses nelayan terhadap sarana produksi, teknologi budidaya, dan pemasaran hasil laut;
     3) Pengembangan sektor kehutanan dan hasil hutan non-kayu seperti gaharu, rotan, dan minyak atsiri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi;
     4) Mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, seperti industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan;;
     5) Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekowisata, termasuk pelestarian wisata alam, cagar budaya, serta peningkatan daya tarik destinasi wisata.

b. Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif
   - Fokus: meningkatkan peran UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
   - Arah Kebijakan:
     1) mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM dan koperasi, termasuk pemanfaatan dana Otsus dan kemitraan dengan perbankan;
     2) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai kabupaten/kota untuk mendukung hilirisasi produk lokal;

3) mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan e-*commerce* dan pemasaran berbasis teknologi;;
4) peningkatan daya saing produk lokal melalui standardisasi, sertifikasi, dan *branding* produk Papua Tengah;
5) penguatan inkubator bisnis dan ruang kreatif bagi anak muda Papua Tengah untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan berbasis teknologi.

c. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
- Fokus: memperkuat konektivitas antarwilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
- Arah kebijakan:
  1) pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar kabupaten/kota untuk mempercepat arus barang dan jasa;
  2) peningkatan kapasitas dan modernisasi pasar tradisional sebagai pusat perdagangan lokal yang lebih efisien dan berdaya saing;
  3) penguatan infrastruktur logistik dan transportasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk lokal dan pasar nasional/internasional;
  4) mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan industri lokal di Papua Tengah.

d. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif
- Fokus: menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di sektor unggulan daerah.
- Arah Kebijakan:
  1) peningkatan pelatihan keterampilan berbasis industri dan kewirausahaan untuk mendukung transformasi ekonomi masyarakat;
  2) pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis kebutuhan daerah, seperti agribisnis, kelautan, pariwisata, dan teknologi informasi;
  3) penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk membuka akses pekerjaan bagi tenaga kerja Papua Tengah;
  4) mendorong program beasiswa bagi OAP untuk studi di bidang ekonomi, teknologi, dan industri kreatif;
  5) peningkatan kapasitas perempuan dan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi produktif.

e. Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Ekonomi
- Fokus: meningkatkan daya saing daerah melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengusaha lokal dan investasi yang berkelanjutan.
- Arah kebijakan:
  1) penyederhanaan regulasi investasi dan perizinan usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi;
  2) peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah;
  3) penguatan kebijakan insentif bagi investor yang memberdayakan masyarakat lokal dan mendukung ekonomi hijau;
  4) optimalisasi peran BUMD dalam pengelolaan sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
  5) peningkatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan tahun ketiga (2027) akan menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan daya saing daerah, dengan fokus pada:

1. optimalisasi potensi sumber daya alam daerah (pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata);

2. pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi masyarakat;
3. peningkatan konektivitas infrastruktur untuk mendukung ekonomi daerah;
4. peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industri dan kewirausahaan lokal;
5. reformasi regulasi ekonomi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.

Tabel 4.2
Arah Kebijakan Provinsi Papua Tengah dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
M1	T1	S1	Papua Tengah Cerdas	S1	Meningkatkan Capaian Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Nasional: 1. penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis *Teaching at The Right Level (TaRL)* dan Merdeka Belajar; 2. implementasi model pembelajaran berbasis teknologi dan digitalisasi sekolah; 3. penyediaan dan distribusi buku bacaan berkualitas serta bahan ajar berbasis budaya lokal; 4. peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, termasuk akses listrik dan internet di daerah terpencil; 5. mendorong kolaborasi dengan mitra pendidikan seperti universitas, NGO, dan lembaga internasional.	1. meningkatkan kualitas asesmen dan evaluasi pendidikan berbasis data; 2. memperkuat supervisi dan pendampingan kepada sekolah yang belum mencapai standar minimum; 3. memberikan insentif bagi guru yang berprestasi dalam meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa. 4. meningkatkan kualitas Infrastruktur layanan umum dalam mendukung pendidikan
				S2	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas: 1. program wajib belajar 12 tahun dengan insentif bagi siswa dari keluarga kurang mampu; 2. beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi, khususnya dari daerah terpencil; 3. program pendidikan kejar paket untuk masyarakat putus sekolah; 4. penyediaan sekolah berbasis asrama di daerah sulit akses (pembangunan pendidikan berpola asrama).	1. menjamin akses pendidikan yang inklusif dan merata; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka; 3. memperluas akses pendidikan berbasis vokasi untuk menarik minat anak-anak melanjutkan sekolah.
				S3	Meningkatkan Harapan Lama Sekolah: 1. perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi di seluruh kabupaten/kota;	1. mendorong program afirmasi bagi daerah dengan angka putus sekolah tinggi;

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		2. penguatan program pendidikan vokasi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja; 3. meningkatkan peran sekolah dan komunitas dalam mencegah putus sekolah; 4. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.	2. meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi dengan membuka program studi yang relevan dengan kebutuhan daerah; 3. penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. 4. SD yang mendapatkan pembinaan program afirmasi
	S4	Meningkatkan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi: 1. penyediaan beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah; 2. mendorong pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Negeri Papua Tengah) akan menjadi Pusat Pengembangan SDM berkualitas di Papua Tengah; 3. peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri; 4. peningkatan kualitas dosen dan tenaga pengajar melalui program *capacity building*.	1. mengembangkan kebijakan afirmatif bagi lulusan SMA/SMK agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi; 2. memberikan insentif bagi mahasiswa Papua Tengah yang berkuliah dan kembali mengabdi di daerah; 3. meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi berbasis digital untuk menjangkau daerah terpencil; 4. membangun Fakultas yang sesuai dengan potensi daerah; 5. afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
						6. menciptakan SDM unggul dan meningkatkan daya saing Papua Tengah.
M1	T2	S2	Papua Tengah Sehat	S5	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak: 1. peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan bidan di daerah terpencil; 2. penguatan program *ANC (Antenatal Care)* dan layanan persalinan aman dengan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan; 3. penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi ibu hamil di daerah sulit akses; 4. pemberian suplemen gizi dan tablet tambah darah bagi ibu hamil serta imunisasi lengkap bagi bayi; 5. program edukasi bagi ibu hamil dan keluarga terkait gizi, ASI eksklusif, serta pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif; 6. pembangunan Rumah Sakit Provinsi .	1. memastikan layanan kesehatan ibu dan anak dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Papua Tengah, terutama di daerah pedalaman; 2. memperkuat sistem rujukan ibu hamil berisiko tinggi ke rumah sakit dengan fasilitas yang memadai; 3. integrasi program pengentasan stunting dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga agar anak mendapatkan asupan gizi yang cukup; 4. memastikan Layanan Kesehatan bisa di nikmati oleh seluruh masyarakat Papua Tengah.
				S6	Penanganan Tuberkulosis (TBC): 1. memperluas layanan deteksi dini TBC di puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan; 2. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis dan pengobatan TBC; 3. mendorong kepatuhan pengobatan pasien TBC dengan sistem pemantauan berbasis teknologi (*digital adherence monitoring*); 4. program pendampingan bagi pasien TBC untuk mencegah putus obat dan resistensi obat (TBC	1. mewajibkan skrining TBC secara berkala di daerah dengan angka kejadian tinggi; 2. penyediaan obat TBC yang gratis dan memastikan ketersediaannya di seluruh fasilitas kesehatan; 3. mendorong kerja sama dengan komunitas dan NGO untuk

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		RO); 5. penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan TBC.	mendukung program eliminasi TBC.
	S7	Eliminasi Malaria di Seluruh Kabupaten: 1. penyediaan kelambu berinsektisida dan obat anti-malaria di daerah endemis; 2. penguatan surveilans malaria dengan skrining rutin di daerah rawan; 3. peningkatan cakupan dan kualitas pengobatan malaria sesuai standar WHO; 4. program pemberantasan nyamuk melalui penyemprotan rumah dan pengelolaan lingkungan; 5. edukasi masyarakat mengenai pencegahan malaria, terutama di daerah pedalaman.	1. memastikan setiap kabupaten memiliki program eliminasi malaria yang berkelanjutan; 2. menjalin kerja sama dengan sektor swasta, universitas, dan organisasi internasional dalam penelitian dan penanganan malaria; 3. mengintegrasikan program eliminasi malaria dengan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan posyandu.
	S8	Penanggulangan HIV/AIDS: 1. meningkatkan akses terhadap layanan tes dan konseling HIV (VCT) secara gratis; 2. menyediaan obat ARV (Antiretroviral) secara berkelanjutan bagi ODHA; 3. edukasi tentang pencegahan HIV/AIDS melalui kampanye yang melibatkan pemuda, kelompok masyarakat, dan gereja; 4. peningkatan layanan kesehatan bagi ibu hamil dengan HIV untuk mencegah penularan ke bayi.	1. memperkuat layanan kesehatan khusus HIV/AIDS di puskesmas dan rumah sakit; 2. mendorong kebijakan nol stigma bagi ODHA di lingkungan kerja dan sosial; 3. integrasi program penanggulangan HIV/AIDS dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
	S9	Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi (%): 1. optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan;	1. mewajibkan perusahaan dan institusi untuk mendaftarkan pekerjanya dalam JKN; 2. mengembangkan program subsidi bagi masyarakat yang

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					2. mempermudah akses administrasi bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan; 3. meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembiayaan premi JKN bagi masyarakat tidak mampu; 4. penyediaan layanan kesehatan berbasis digital untuk mempercepat klaim dan layanan JKN.	belum memiliki jaminan kesehatan; 3. memastikan fasilitas kesehatan daerah terintegrasi dengan sistem JKN untuk memberikan pelayanan maksimal bagi peserta.
M2	T3	S3	Perlindungan Sosial yang Adaptif Ketahanan energi	S10	Menurunkan Tingkat Kemiskinan (%): 1. penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal, seperti pengembangan pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis komoditas unggulan Papua Tengah; 2. bantuan sosial yang tepat sasaran, termasuk program perlindungan sosial berbasis keluarga seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai); 3. peningkatan akses pendidikan dan keterampilan melalui program pelatihan kerja dan sekolah vokasi bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah; 4. meningkatkan akses ke layanan keuangan dan permodalan, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) dan koperasi berbasis komunitas; 5. penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses air bersih, listrik, dan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin.	1. mempercepat penyediaan data kemiskinan berbasis digital untuk penyaluran bantuan yang lebih akurat; 2. mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam program pengentasan kemiskinan; 3. mengembangkan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. 4. Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)
				S11	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%): 1. sosialisasi dan edukasi kepada pekerja formal dan informal tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan (bpjs ketenagakerjaan);	1. mewajibkan perusahaan skala menengah dan besar untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan;

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		2. memperluas cakupan kepesertaan bpjs ketenagakerjaan dengan mendorong perusahaan dan pekerja sektor informal untuk mendaftar; 3. penyediaan subsidi bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat terdaftar dalam bpjs ketenagakerjaan; 4. peningkatan kerja sama dengan perusahaan, koperasi, dan BUMDes untuk menjamin pekerja sektor informal mendapatkan perlindungan sosial; 5. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan agar perusahaan mematuhi regulasi terkait jaminan sosial tenaga kerja.	2. mengembangkan regulasi daerah yang mempermudah akses pekerja informal ke jaminan sosial; 3. meningkatkan insentif bagi perusahaan yang menerapkan standar perlindungan tenaga kerja.
	S12	Meningkatkan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%): 1. peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasi, keterampilan digital, dan wirausaha; 2. mendorong kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen di sektor formal, termasuk kuota khusus di instansi pemerintah dan BUMN/BUMD; 3. penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang inklusif, seperti aksesibilitas fisik di tempat kerja dan kebijakan kerja fleksibel bagi disabilitas; 4. memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan sektor swasta untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi penyandang disabilitas; 5. meningkatkan insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja disabilitas, seperti potongan pajak dan subsidi pelatihan kerja.	1. mengembangkan regulasi daerah yang mengharuskan perusahaan dan instansi pemerintah menyediakan minimal 2% tenaga kerja dari kelompok disabilitas; 2. mendorong kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif; 3. mengoptimalkan peran balai latihan kerja (BLK) untuk menyediakan program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. 4. revitaslisasi Fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK)

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
						5. peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti Upskilling dab Reskillin berstandar Industri
M2	T4	S4	Terwujudnya Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi Papua Tengah	S13	Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB: 1. pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan Papua Tengah (seperti pengolahan kayu, perikanan, pertanian, dan hasil hutan non-kayu); 2. mendorong investasi dalam industri hilir agar produk lokal memiliki nilai tambah; 3. penyediaan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan; 4. pelatihan tenaga kerja industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing; 5. peningkatan infrastruktur pendukung industri seperti listrik, jalan, dan konektivitas logistik.	1. mengembangkan regulasi yang mendukung kemudahan investasi industri pengolahan; 2. meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dalam pengembangan teknologi pengolahan; 3. memastikan industri kecil dan menengah memiliki akses terhadap bahan baku, pasar, dan pendanaan.
				S14	Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: 1. penguatan branding dan promosi destinasi wisata unggulan Papua Tengah, termasuk ekowisata dan wisata budaya; 2. pengembangan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, bandara, dan fasilitas akomodasi; 3. meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pelaku usaha hotel dan restoran; 4. mendorong investasi di sektor perhotelan, restoran, dan atraksi wisata berbasis komunitas; 5. digitalisasi layanan wisata, termasuk pemasaran online dan sistem reservasi berbasis teknologi.	1. penyusunan regulasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal; 2. mendorong kemitraan antara masyarakat lokal dan investor dalam pengembangan pariwisata; 3. mengembangkan program insentif bagi UMKM yang terlibat dalam sektor pariwisata.

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
	S15	Meningkatkan Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif: 1. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis seni budaya, kuliner, dan kriya khas Papua Tengah; 2. mendorong digitalisasi ekonomi kreatif melalui *e-commerce*, pemasaran digital, dan teknologi finansial; 3. pemberdayaan komunitas kreatif lokal melalui pelatihan dan pendampingan usaha; 4. peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif melalui kredit usaha kreatif dan hibah modal.	1. penguatan regulasi yang mendukung hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif; 2. peningkatan promosi dan event ekonomi kreatif, seperti festival seni dan budaya; 3. penguatan jejaring dan kolaborasi antara ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.
	S16	Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD: 1. penguatan program inkubasi bisnis dan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi; 2. digitalisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional; 3. peningkatan peran BUMD dalam mendukung sektor strategis daerah, seperti distribusi pangan dan energi; 4. optimalisasi kemitraan antara UMKM dan industri besar dalam rantai pasok lokal; 5. penyederhanaan perizinan bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha baru.	1. penyusunan regulasi daerah yang memudahkan UMKM dan koperasi berkembang; 2. meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD untuk mendukung ekonomi daerah; 3. mengembangkan program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan baru. 4. fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis
	S17	Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkualitas: 1. peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri;	1. menyusun kebijakan afirmatif untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas dalam rekrutmen; 2. meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					2. mendorong industri padat karya dan sektor kreatif untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal; 3. penguatan sistem informasi pasar kerja agar tenaga kerja dapat terhubung dengan peluang kerja yang sesuai; 4. penyediaan insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.	agar sesuai dengan kebutuhan industri; 3. mempermudah regulasi ketenagakerjaan agar mendukung pertumbuhan sektor formal.
				S18	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: 1. meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi; 2. mendorong kebijakan ramah keluarga di tempat kerja, seperti fleksibilitas jam kerja dan cuti melahirkan yang lebih baik; 3. penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak di tempat kerja; 4. program kewirausahaan perempuan berbasis komunitas dan UMKM.	1. penyusunan regulasi daerah yang mendukung kesetaraan gender di dunia kerja; 2. memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak perempuan; 3. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi.
				S19	Meningkatkan Tingkat Penguasaan Iptek: 1. penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri; 2. penyediaan pusat riset dan teknologi untuk mendukung industri lokal; 3. mendorong adopsi teknologi digital di sektor UMKM, pertanian, dan industri; 4. peningkatan investasi dalam pendidikan dan riset berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).	1. mengembangkan kebijakan daerah yang mendorong inovasi dan riset berbasis lokal; 2. meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam riset dan pengembangan teknologi; 3. menyediakan insentif bagi perusahaan dan startup yang berinvestasi dalam inovasi.
M3	T5	S5	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Yang	S20	Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum:	1. mendorong percepatan revisi dan harmonisasi regulasi yang

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
			Berintegritas dan Adaptif di papua Tengah		1. penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan kepastian hukum yang mendukung investasi dan pelayanan publik; 2. penguatan kapasitas aparatur hukum dan peradilan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di tingkat daerah; 3. peningkatan transparansi dan aksesibilitas regulasi daerah dengan digitalisasi dokumen hukum dan kebijakan; 4. optimalisasi peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui konsultasi publik dan partisipasi masyarakat sipil; 5. sinergi antara regulasi nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan keselarasan hukum.	belum sesuai dengan kebutuhan daerah; 2. meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan hukum daerah guna mencegah; penyalahgunaan wewenang. 3. memperkuat lembaga bantuan hukum bagi masyarakat untuk memastikan akses keadilan yang merata.
				S21	Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): 1. digitalisasi administrasi pemerintahan dengan mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh; 2. pengembangan layanan publik berbasis digital, seperti *e-government, e-budgeting*, dan *e-procurement* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 3. peningkatan keamanan data dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital pemerintahan; 4. pelatihan ASN dalam penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap sistem digital;	1. mewajibkan setiap OPD mengimplementasikan SPBE secara bertahap sesuai dengan *roadmap* digitalisasi daerah; 2. meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pusat dan swasta dalam pengembangan infrastruktur digital daerah; 3. menyediakan kebijakan perlindungan data yang ketat untuk menjamin keamanan informasi pemerintahan dan masyarakat. 4. pengembangan Platform digital Manajemen ASN

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		5. integrasi layanan digital antarinstansi pemerintah guna menciptakan sistem pelayanan terpadu yang lebih efisien.	
	S22	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik: 1. peningkatan kapasitas SDM aparatur pelayanan publik melalui pelatihan berorientasi pada pelayanan prima; 2. penerapan standar pelayanan publik yang jelas, cepat, dan transparan sesuai dengan prinsip *good governance*; 3. penguatan mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif, seperti layanan *hotline*, aplikasi pengaduan digital, dan kanal media sosial resmi; 4. mendorong inovasi dalam pelayanan publik, seperti layanan keliling, sistem layanan berbasis aplikasi, dan *one-stop service center*; 5. penyediaan fasilitas layanan publik yang ramah disabilitas dan inklusif, untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan akses yang setara.	1. menyusun regulasi daerah yang mengatur standar pelayanan publik dan mekanisme evaluasi kinerja pelayanan; 2. menyediakan sistem pemantauan dan penilaian layanan publik berbasis data; 3. mewajibkan setiap instansi pemerintah daerah memiliki *customer service* yang aktif untuk menangani keluhan masyarakat.
	S23	Meningkatkan Indeks Integritas Nasional: 1. peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran; 2. penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti *e-audit* dan *e-monitoring* terhadap anggaran dan proyek pemerintah; 3. penguatan sistem meritokrasi dalam rekrutmen ASN untuk memastikan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas;	1. mewajibkan pejabat daerah untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara berkala; 2. mendorong sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi ASN berdasarkan kinerja dan tingkat integritasnya; 3. membangun sistem *whistleblower* yang aman bagi masyarakat dan pegawai

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					4. mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, melalui sistem pelaporan yang mudah diakses; 5. peningkatan edukasi anti-korupsi bagi aparatur negara dan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan etika birokrasi.	pemerintah yang ingin melaporkan praktik korupsi.
M3	T5	S6	Terwujudnya Transformasi Digital Papua Tengah	S24	Meningkatkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): 1. pembangunan infrastruktur digital yang merata, termasuk penyediaan jaringan internet hingga ke daerah terpencil; 2. penguatan literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah guna meningkatkan adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari; 3. mendorong digitalisasi sektor publik dan ekonomi, seperti layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), *e-commerce* untuk UMKM, dan digitalisasi layanan kesehatan serta pendidikan; 4. peningkatan kerja sama dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet untuk memperluas cakupan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan; 5. pengembangan pusat inovasi digital dan *startup* teknologi lokal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital.	1. menyusun regulasi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur TIK, termasuk kebijakan insentif bagi penyedia layanan internet; 2. mewajibkan instansi pemerintah daerah mengadopsi sistem digital dalam layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi; 3. menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi digital; 4. meningkatkan investasi daerah dalam pengembangan pusat data dan keamanan siber guna mendukung transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. 5. perluasan Layanan Penyiaran digital
				S25	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (RT) (%):	1. menyusun kebijakan insentif bagi investasi energi terbarukan

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					1. percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro, dan biomassa untuk menjangkau daerah terpencil; 2. peningkatan investasi dalam jaringan distribusi listrik guna memastikan stabilitas pasokan listrik bagi rumah tangga dan industri; 3. mendorong pemanfaatan teknologi *smart grid* dan digitalisasi manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik; 4. program subsidi listrik untuk masyarakat kurang mampu agar seluruh rumah tangga memiliki akses listrik yang terjangkau; 5. Pengembangan Kampung mandiri energi dengan pemanfaatan teknologi mikrogrid untuk daerah dengan akses listrik terbatas.	guna mendukung elektrifikasi daerah terpencil; 2. mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan energi berkelanjutan guna memastikan pemerataan akses listrik; 3. meningkatkan kolaborasi dengan PLN dan sektor swasta untuk percepatan penyediaan listrik berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; 4. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan program elektrifikasi berjalan sesuai target yang ditetapkan.
M3	T5	S7		S26	Meningkatkan Indeks Kepemimpinan Daerah: 1. peningkatan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan kepala daerah serta ASN melalui pelatihan kepemimpinan yang berbasis inovasi, tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada masyarakat; 2. penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah; 3. peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah;	1. menetapkan standar kompetensi kepemimpinan daerah yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang lebih baik; 2. mewajibkan pemimpin daerah dan ASN mengikuti program kepemimpinan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas; 3. memperkuat mekanisme evaluasi kinerja kepemimpinan daerah berbasis indikator yang jelas dan terukur.

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					4. pemberdayaan kepemimpinan berbasis data dan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan; 5. mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan daerah agar kebijakan lebih partisipatif dan inklusif.	
				S27	Menurunkan Persentase Konflik SARA : 1. penguatan dialog antaragama dan antarsuku melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda guna membangun kesepahaman dan solidaritas sosial; 2. peningkatan peran pemerintah daerah dalam mediasi dan resolusi konflik dengan menyediakan mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan berbasis kearifan lokal; 3. pendidikan multikultural dan toleransi sejak dini di sekolah dan komunitas untuk menanamkan nilai keberagaman dan persatuan; 4. penerapan sistem deteksi dini konflik sosial dengan membentuk tim khusus yang memantau potensi konflik dan melakukan intervensi sebelum terjadi eskalasi; 5. optimalisasi peran media dalam menyebarkan narasi damai dan mengurangi provokasi berbasis SARA melalui regulasi dan kampanye anti-hoaks.	1. mengembangkan kebijakan daerah yang berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik berbasis kearifan lokal; 2. mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan kohesi sosial dan toleransi di masyarakat; 3. meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di Papua Tengah.
M4	T6	S8	Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah	S28	Meningkatkan Penegakan Hukum Peraturan Daerah:	1. memperkuat regulasi dan peraturan daerah yang berpihak pada kesejahteraan

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
			Tangguh, dan Demokrasi Substansi pada Provinsi Papua Tengah		1. penguatan kapasitas aparatur penegak hukum dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menegakkan Perda; 2. sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami dan mematuhi Perda yang berlaku; 3. optimalisasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perda dengan membentuk sistem pemantauan dan mekanisme pelaporan masyarakat; 4. Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adat untuk memastikan Perda diterapkan secara efektif dan berkeadilan.	masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan; 2. meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan implementasi Perda guna mencegah penyalahgunaan kewenangan; 3. menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa hukum yang cepat dan berbasis digital untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat.
				S29	Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM: 1. memastikan kebijakan daerah selaras dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam perlindungan hak-hak kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat); 2. mendorong edukasi HAM kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat melalui sosialisasi dan program pelatihan; 3. memperkuat peran Komisi Nasional HAM atau lembaga HAM daerah dalam memantau, mengevaluasi, dan menangani pelanggaran HAM; 4. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan, termasuk penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.	1. menetapkan program aksi daerah yang mengedepankan prinsip HAM dalam pelayanan publik dan kebijakan daerah; 2. mengembangkan sistem pelaporan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara transparan dan akuntabel; 3. menyusun kebijakan afirmatif untuk meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan kelompok rentan.

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
	S30	Meningkatkan Proporsi Penduduk yang Merasa Aman di Tempat Tinggalnya: 1. meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui optimalisasi peran kepolisian, TNI, dan satuan keamanan masyarakat (Satkamling); 2. penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah; 3. pemanfaatan teknologi dalam pemantauan keamanan daerah, seperti pemasangan CCTV di area publik dan penggunaan sistem laporan kejadian berbasis digital; 4. meningkatkan program patroli keamanan di daerah rawan kejahatan dan konflik; 5. membangun mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.	1. menyediakan sistem pengaduan keamanan yang mudah diakses oleh masyarakat; 2. memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan dari ancaman kekerasan dan kriminalitas; 3. meningkatkan kehadiran aparat keamanan di daerah rawan konflik guna memberikan rasa aman bagi masyarakat.
	S31	Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua Tengah: 1. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kebijakan daerah melalui keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan; 2. mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu serta pemilihan kepala daerah guna memastikan demokrasi yang jujur dan adil; 3. menguatkan peran media dan kebebasan pers untuk mendukung kebebasan berekspresi serta mengawasi jalannya pemerintahan;	1. memastikan keterbukaan informasi publik melalui regulasi yang mendukung akses masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; 2. mendorong dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih substansial; 3. menyediakan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi masyarakat yang menghadapi diskriminasi politik atau intimidasi.

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					4. meningkatkan kapasitas partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan peran demokrasi yang sehat; 5. membangun budaya politik yang inklusif dan bebas dari praktik politik uang, diskriminasi, serta tekanan politik.	
M5	T7	S9	Terwujudnya Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	S32	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan mencerminkan kemajuan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di suatu daerah: 1. pelestarian dan revitalisasi budaya lokal Papua Tengah melalui dukungan terhadap seni, bahasa, tradisi, dan kearifan lokal; 2. peningkatan akses dan kualitas pendidikan budaya dengan memasukkan muatan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah; 3. penguatan lembaga budaya, sanggar seni, dan komunitas kreatif guna memperluas ruang ekspresi dan inovasi budaya; 4. pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri kreatif, pariwisata budaya, dan produk berbasis kearifan lokal; 5. peningkatan infrastruktur kebudayaan seperti museum, galeri seni, rumah adat, dan pusat kebudayaan guna mendukung kegiatan budaya; 6. mendorong digitalisasi dan dokumentasi budaya untuk menjaga warisan budaya agar dapat diakses oleh generasi mendatang.	1. menetapkan kebijakan daerah untuk melindungi warisan budaya tak benda dan benda di Papua Tengah; 2. menyediakan dana hibah atau insentif bagi komunitas budaya dan pelaku seni untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya lokal; 3. menyelenggarakan festival budaya dan seni secara rutin guna memperkuat identitas budaya Papua Tengah dan menarik wisatawan; 4. mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi dan peneliti untuk mendokumentasikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal.
				S33	Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama	1. Menyusun regulasi daerah yang melindungi kebebasan

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					mengukur harmoni antar umat beragama, toleransi, dan kerja sama dalam kehidupan sosial: 1. memperkuat dialog antar agama melalui forum komunikasi yang melibatkan tokoh agama, pemuda lintas agama, dan pemerintah daerah; 2. mengembangkan program pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah dan masyarakat guna menanamkan nilai-nilai persaudaraan dan harmoni sosial; 3. mendorong peran aktif tokoh agama dalam membangun narasi damai dan menangkal penyebaran ujaran kebencian serta ekstremisme; 4. optimalisasi peran media dalam menyebarkan pesan-pesan kerukunan dan mencegah hoaks yang berpotensi memicu konflik keagamaan; 5. meningkatkan kerja sama antar umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan untuk memperkuat solidaritas sosial; 6. Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam mediasi konflik keagamaan.	beragama dan mencegah diskriminasi berbasis agama; 2. menyediakan insentif dan fasilitas bagi kegiatan yang mendorong toleransi dan kerja sama antar umat beragama; 3. mengintegrasikan program pembangunan sosial dan ekonomi berbasis lintas agama untuk memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat; 4. meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menangani isu-isu sensitif terkait keberagaman agama melalui pendekatan yang inklusif dan humanis.
M5	T7	S10	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	S34	Meningkatkan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPK). Indeks ini mencerminkan kesejahteraan keluarga dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial: 1. peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk layanan gizi, imunisasi, dan kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak;	1. menyediakan program bantuan sosial dan layanan konsultasi keluarga berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; 2. mengembangkan kebijakan ketahanan keluarga yang mengintegrasikan aspek

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		2. peningkatan literasi dan pendidikan keluarga dalam pola asuh anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kesejahteraan psikososial keluarga; 3. penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peningkatan keterampilan kerja, akses permodalan bagi usaha mikro, dan pelatihan kewirausahaan berbasis keluarga; 4. mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna menciptakan keseimbangan peran dalam keluarga; 5. meningkatkan akses terhadap perumahan layak huni dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga; 6. memperkuat peran lembaga sosial dan komunitas dalam mendampingi keluarga rentan, seperti keluarga miskin, keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, dan keluarga yang terdampak konflik.	kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial; 3. mengalokasikan anggaran khusus untuk program penguatan ketahanan keluarga, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan keluarga; 4. mengembangkan pusat layanan keluarga dan rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
	S35	Mengurangi Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik: 1. mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk beasiswa dan program afirmatif untuk kelompok rentan; 2. meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, terutama di sektor formal, serta memberikan pelatihan keterampilan untuk memperkuat kapasitas perempuan;	1. mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan kesetaraan akses dan peluang bagi semua warga; 2. mengalokasikan anggaran khusus untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dari kekerasan; 3. mendorong keterlibatan laki-laki dalam upaya kesetaraan gender, termasuk dalam peran

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					3. meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di sektor pemerintahan, politik, dan ekonomi; 4. memastikan akses layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan terhadap perempuan, termasuk pencegahan pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender; 5. mendorong kesetaraan dalam kebijakan ketenagakerjaan, seperti upah yang adil, cuti melahirkan, serta fasilitas penitipan anak di tempat kerja; 6. membangun mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi atau kekerasan.	domestik dan pengasuhan anak; 4. memastikan kebijakan daerah terkait layanan publik, pendidikan, dan ketenagakerjaan berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.
M5	T8	S11	Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global di Papua Tengah	S36	Menjaga Stabilitas Harga Antarwilayah (Koefisien Variasi Harga). Variasi harga antarwilayah menunjukkan tingkat kesenjangan harga di berbagai daerah di Papua Tengah. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi akibat infrastruktur yang belum merata, biaya distribusi yang tinggi, atau keterbatasan pasokan barang dan jasa: 1. penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik, termasuk peningkatan akses jalan, pelabuhan, dan bandara guna mempercepat distribusi barang antarwilayah; 2. pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien, seperti pemanfaatan rantai pasok berbasis teknologi dan gudang logistik terpadu; 3. penguatan peran BUMD dan koperasi dalam distribusi bahan pokok dan kebutuhan strategis untuk mengurangi fluktuasi harga;	1. mengembangkan kebijakan pengendalian harga barang pokok dan memantau disparitas harga antarwilayah; 2. menyediakan subsidi transportasi bagi daerah terpencil agar harga barang tetap terjangkau; 3. mengalokasikan investasi dalam infrastruktur logistik untuk mempercepat arus barang dan mengurangi biaya distribusi.

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		4. mendorong peningkatan produksi dan stok pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada barang dari luar daerah; 5. memperkuat kerja sama antarwilayah dalam perdagangan dan distribusi barang untuk memastikan pasokan merata di seluruh Papua Tengah.	
	S37	Meningkatkan Investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB). PMTB menggambarkan tingkat investasi yang masuk ke dalam pembangunan infrastruktur, peralatan, dan modal usaha di Papua Tengah: 1. meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum bagi investor; 2. peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan koperasi, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; 3. mendorong kemitraan antara swasta dan pemerintah (public-private partnership/ppp) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis; 4. memperkuat insentif bagi investasi hijau dan berkelanjutan, terutama di sektor energi terbarukan dan industri ramah lingkungan.	1. menyusun regulasi daerah yang mendukung iklim investasi yang kondusif dan transparan; 2. memberikan insentif pajak dan kemudahan administrasi bagi investor yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah; 3. meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah dan lembaga keuangan mikro dalam mendukung investasi sektor produktif.
	S38	Memperkuat Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB). Ekspor barang dan jasa menjadi indikator integrasi ekonomi Papua Tengah dengan pasar nasional dan global : 1. pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, hasil hutan, kopi,	1. menyediakan kebijakan insentif bagi industri yang berorientasi ekspor; 2. meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait guna

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					kakao, dan produk pertambangan, untuk meningkatkan daya saing ekspor; 2. meningkatkan kualitas dan standar produk ekspor, termasuk sertifikasi produk yang sesuai dengan standar internasional; 3. mendorong hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sebelum produk diekspor; 4. memperluas akses pasar ekspor dengan kerja sama perdagangan antar provinsi dan internasional; 5. memanfaatkan teknologi digital dan platform *e-commerce* untuk mempromosikan produk Papua Tengah ke pasar global.	memperluas pasar ekspor dan memperkuat diplomasi ekonomi; 3. mengembangkan pusat logistik ekspor untuk mempercepat pengiriman dan menekan biaya ekspor. 4. pengembangan kawasan kopi
M5	T8	S12	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah Papua Tengah	S39	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Pendapatan daerah yang kuat akan mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program ekonomi yang berkelanjutan: 1. optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 2. ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya dengan memperluas basis pajak dari sektor-sektor potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital; 3. peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang taat pajak; 4. menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi baru sambil tetap menjaga keseimbangan pendapatan daerah.	1. penguatan regulasi pajak daerah yang lebih adil dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi; 2. digitalisasi layanan pajak untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kemudahan pembayaran pajak; 3. pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerimaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
	S40	Menjaga Tingkat Inflasi (%) Tetap Stabil. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah: 1. memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan bank Indonesia dalam mengelola kebijakan harga dan ketersediaan barang pokok; 2. penguatan ketahanan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga harga tetap stabil; 3. peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, termasuk pembangunan pasar induk dan gudang logistik untuk mengurangi biaya distribusi; 4. intervensi harga secara selektif melalui kebijakan subsidi atau operasi pasar untuk komoditas strategis.	1. menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok; 2. penguatan infrastruktur logistik untuk mengurangi hambatan distribusi; 3. meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dalam menjaga stabilitas harga.
	S41	Memperkuat Pendalaman Sektor Keuangan dan Intermediasi. Pendalaman sektor keuangan menunjukkan seberapa besar sektor keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah: 1. meningkatkan jumlah simpanan masyarakat dalam sistem keuangan formal dengan mendorong inklusi keuangan; 2. mendorong investasi jangka panjang, termasuk penguatan dana pensiun dan instrumen investasi lainnya; 3. meningkatkan akses kredit produktif bagi UMKM dan industri lokal melalui skema pembiayaan berbunga rendah;	1. memperkuat regulasi keuangan daerah untuk mendukung stabilitas perbankan dan lembaga keuangan mikro; 2. meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah; 3. mendorong digitalisasi sektor keuangan guna memperluas jangkauan layanan keuangan.

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		4. mendorong pasar modal daerah agar lebih aktif dengan memperkenalkan berbagai instrumen investasi seperti obligasi daerah.	
	S42	Meningkatkan Inklusi Keuangan (%). Inklusi keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan: 1. meningkatkan akses layanan keuangan digital melalui pengembangan *fintech* dan bank digital di daerah terpencil; 2. memperkuat peran koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM; 3. mendorong program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda; 4. memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk masyarakat tidak terlayani *(unbanked population)* guna meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal.	1. mendorong kebijakan bank inklusif yang mewajibkan bank untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah; 2. meningkatkan kerja sama dengan *fintech* untuk mempercepat akses keuangan digital di daerah terpencil; 3. mengembangkan skema kredit mikro berbunga rendah untuk mendukung UMKM dan wirausaha lokal.
	S43	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%). Pendapatan daerah yang kuat akan mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program ekonomi yang berkelanjutan: 1. optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi; 2. ekstensifikasi sumber pajak daerah, misalnya dengan memperluas basis pajak dari sektor-	1. menyediakan kebijakan insentif bagi investasi di sektor unggulan yang dapat mendorong PDRB daerah; 2. meningkatkan efisiensi tata kelola ekonomi daerah untuk mempercepat pertumbuhan usaha lokal; 3. memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					sektor potensial seperti industri, pariwisata, dan ekonomi digital; 3. peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan insentif bagi pelaku usaha yang taat pajak; 4. menerapkan kebijakan insentif fiskal untuk menarik investasi baru sambil tetap menjaga keseimbangan pendapatan daerah.	dalam mengelola potensi ekonomi wilayah.
M6	T9	S13	Perkotaan dan Perkampungan sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi di Papua Tengah	S43	Meningkatkan Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Provinsi terhadap Nasional. Papua Tengah harus mendorong sektor unggulan di perkotaan dan Perkampungan agar berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional: 1. pengembangan sektor industri berbasis sumber daya lokal, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan, dengan pendekatan hilirisasi; 2. peningkatan daya saing sektor jasa dan pariwisata di kota dan Kampung untuk menarik lebih banyak investasi; 3. pembangunan infrastruktur ekonomi seperti kawasan industri, pusat logistik, dan pasar modern di kota dan kampung; 4. peningkatan konektivitas antara kota dan Kampung melalui jalur transportasi yang lebih efisien guna memperlancar distribusi hasil produksi.	1. mengalokasikan dana APBD dan kerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan hunian terjangkau; 2. meningkatkan regulasi tata ruang agar pembangunan perumahan sesuai dengan prinsip keberlanjutan; 3. memfasilitasi program CSR perusahaan untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
				S44	Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%). Hunian yang layak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong produktivitas ekonomi:	1. mengalokasikan dana APBD dan kerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan hunian terjangkau;

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		1. program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah; 2. penguatan skema kredit perumahan terjangkau, seperti KPR subsidi bagi masyarakat kurang mampu; 3. peningkatan infrastruktur permukiman, termasuk penyediaan air bersih, listrik, dan sanitasi; 4. pengembangan kota hijau dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang yang ramah penduduk.	2. meningkatkan regulasi tata ruang agar pembangunan perumahan sesuai dengan prinsip keberlanjutan; 3. memfasilitasi program CSR perusahaan untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu. 4. pembangunan rumah swadaya
	S45	Meningkatkan Persentase Kampung Mandiri. Kampung mandiri adalah Kampung yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan: 1. penguatan ekonomi Kampung berbasis komoditas unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan ekowisata; 2. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) untuk menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kemandirian Kampung; 3. pengembangan infrastruktur Kampung, termasuk jalan Kampung, listrik, jaringan internet, dan air bersih untuk mendukung aktivitas ekonomi; 4. peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kampung.	1. memberikan insentif bagi Kampung yang berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya; 2. meningkatkan alokasi Dana Kampung untuk program-program yang bersifat produktif; 3. mendorong transformasi digital di Kampung untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. 4. pengembangan Kampung wisata 5. pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara
	S46	Meningkatkan Persentase Mantap Jalan. Kondisi jalan yang baik akan mempercepat mobilitas	1. menyediakan regulasi yang mendukung pembangunan

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					penduduk dan distribusi barang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah: 1. percepatan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, kabupaten, dan Kampung untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik; 2. penggunaan teknologi jalan yang lebih tahan lama guna mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kualitas infrastruktur; 3. peningkatan anggaran pembangunan jalan dari APBD, Dana Kampung, dan kerja sama dengan swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP); 4. integrasi perencanaan infrastruktur jalan dengan pengembangan kawasan ekonomi untuk memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.	infrastruktur transportasi yang berkelanjutan; 2. mempercepat implementasi program pembangunan jalan di daerah terpencil dan perkampungan; 3. memastikan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan agar lebih berkelanjutan. 4. pembangunan jalan trans Papua Merauke-Sorong ruas jalan Wagete-Timika, Mulia–Sinak, Ilu–Mulia–Enarotali, Karubaga–Ilu–Mulia
M7	T10	S14	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau di Papua Tengah	S47	Meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana praktik ekonomi di daerah telah memperhitungkan keberlanjutan lingkungan: 1. pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang lestari, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan pertanian organik; 2. penguatan kebijakan konservasi hutan dan ekosistem, dengan memanfaatkan skema karbon kredit dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan; 3. meningkatkan peran UMKM hijau yang berfokus pada produk ramah lingkungan dan ekonomi sirkular (*reduce, reuse, recycle*);	1. mengembangkan kebijakan fiskal hijau, seperti insentif pajak untuk industri hijau dan denda bagi perusahaan yang mencemari lingkungan; 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam menerapkan ekonomi hijau melalui perencanaan pembangunan berkelanjutan; 3. mendorong kerja sama dengan lembaga internasional dan swasta dalam program investasi hijau.

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		4. implementasi regulasi pembangunan rendah karbon, termasuk pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali; 5. meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi.	4. penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan 5. penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat 6. peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 7. pengembangan kampung nelayan dan Kampungperikanan cerdas (*smart fisheries village*) 8. penguatan kelembagaan ekonomi nelayan 9. Hilirisasi Produk akuakultur 10. Produk hilirisasi pangan hasil laut 11. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan
	S48	Meningkatkan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer (%). Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah kunci utama dalam menurunkan emisi karbon dan menciptakan ketahanan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan: 1. pengembangan energi surya, *hidro*, dan biomassa sebagai sumber energi utama di Papua Tengah, terutama untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional;	1. menyusun regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan energi hijau dalam proyek-proyek pembangunan besar; 2. memberikan insentif pajak dan subsidi bagi investasi di sektor energi terbarukan; 3. mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi hijau melalui kebijakan energi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang;

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					2. mendorong penggunaan biodiesel dan *bioetanol* sebagai bahan bakar alternatif bagi sektor transportasi dan industri; 3. meningkatkan investasi dalam teknologi energi terbarukan, termasuk penelitian dan pengembangan (R&D) energi bersih; 4. membangun infrastruktur energi hijau, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga *Mikrohidro* (PLTMH) untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah perkampungan; 5. mendorong program konversi energi di sektor rumah tangga dan industri dari energi fosil ke energi hijau.	4. mendorong BUMD dan swasta untuk berinvestasi dalam proyek energi hijau melalui skema *Public-Private Partnership (PPP).*
M7	T10	S15	Terwujudnya Lingkungan hidup berkualitas	S49	Meningkatkan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah. Keanekaragaman hayati Papua Tengah yang kaya harus dikelola dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan: 1. penguatan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem melalui penegakan hukum dan patroli hutan; 2. pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan ekowisata; 3. pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui skema karbon kredit dan perhutanan sosial; 4. kolaborasi dengan lembaga riset dan NGO dalam upaya pelestarian flora dan fauna khas Papua.	1. Menetapkan zonasi perlindungan dan restorasi ekosistem hutan serta perairan; 2. memberikan insentif bagi industri yang menerapkan praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan; 3. memperkuat peran pemerintah daerah dalam pemantauan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal.

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
	S50	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat pencemaran air, udara, dan tanah di suatu wilayah: 1. peningkatan pengawasan industri dan pertambangan untuk mengurangi pencemaran air dan tanah; 2. penghijauan perkotaan dan restorasi ekosistem kritis, seperti hutan mangrove dan daerah aliran sungai (das); 3. peningkatan program pengendalian polusi udara, termasuk regulasi terhadap emisi kendaraan dan industri; 4. penyediaan sistem peringatan dini bencana lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor.	1. menyusun regulasi daerah yang lebih ketat terhadap pencemaran lingkungan; 2. mewajibkan industri untuk memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang transparan dan dapat dipantau masyarakat; 3. mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas industri dan perkotaan. 4. reklamasi pasca tambang
	S51	Meningkatkan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%). Sanitasi yang baik berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan: 1. pembangunan sistem sanitasi terpadu di permukiman dan perkampungan, seperti *septic tank* komunal dan pengolahan limbah domestik; 2. program penyediaan air bersih dan sanitasi aman di sekolah serta fasilitas umum; 3. edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan dan lingkungan.	1. mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan fasilitas sanitasi di daerah yang belum memiliki akses memadai; 2. mengintegrasikan program sanitasi dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 3. menyediakan insentif bagi rumah tangga yang menerapkan sanitasi berbasis ekologi *(eco-sanitation)*. 4. pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik
	S52	Meningkatkan Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%). Pengelolaan	1. mewajibkan setiap kabupaten/kota memiliki

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					Sampah yang Berkelanjutan. Sampah yang tidak terkelola dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga harus dikelola dengan sistem yang baik: 1. pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, termasuk daur ulang dan pemanfaatan limbah organik; 2. mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah, seperti *refuse-derived fuel (RDF)* dan biogas; 3. kolaborasi dengan sektor swasta dalam investasi fasilitas pengolahan sampah.	fasilitas pengolahan sampah skala regional; 2. memberikan insentif bagi industri yang menggunakan bahan baku dari limbah daur ulang.
				S53	Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%): 1. perluasan layanan pengumpulan sampah berbasis komunitas, terutama di daerah terpencil; 2. penerapan sistem retribusi sampah berbasis jumlah produksi limbah untuk mendorong masyarakat mengurangi sampah; 3. penyediaan fasilitas Drop Box sampah di titik-titik strategis perkotaan dan perkampungan.	1. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pengumpulan sampah; 2. mengembangkan regulasi daerah tentang pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga; 3. mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.
M7	T10	S16	Terwujudnya berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	S54	Ketahanan Energi: 1. peningkatan akses listrik ke seluruh wilayah Papua Tengah, termasuk daerah pedalaman dan terpencil melalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan solusi energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Mikrohidro; 2. diversifikasi sumber energi dengan	1. memperluas jaringan listrik ke daerah terpencil dengan memanfaatkan energi terbarukan; 2. menerapkan regulasi efisiensi energi untuk sektor industri dan transportasi; 3. memberikan insentif bagi

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti bioenergi, tenaga air, dan tenaga surya; 3. peningkatan efisiensi energi dalam industri, rumah tangga, dan transportasi melalui penerapan teknologi hemat energi; 4. mendorong investasi swasta dalam sektor energi hijau untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil; 5. edukasi dan insentif penggunaan peralatan hemat energi di sektor industri dan rumah tangga.	investor dan masyarakat yang menggunakan energi bersih dan hemat energi.
	S55	Ketahanan Pangan: 1. peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dengan modernisasi alat pertanian dan pendampingan petani/peternak; 2. diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan konsumsi pangan bergizi berbasis komoditas lokal seperti sagu, ubi-ubian, dan pisang; 3. pengembangan rantai pasok pangan yang efisien dengan memperkuat infrastruktur logistik dan penyimpanan hasil pertanian; 4. meningkatkan ketahanan pangan berbasis komunitas dengan membangun lumbung pangan Kampung dan meningkatkan peran koperasi pangan; 5. penyediaan subsidi dan insentif bagi petani dan nelayan untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka.	1. mewujudkan Papua Tengah sebagai daerah mandiri pangan dengan optimalisasi potensi pertanian dan perikanan lokal; 2. menyediakan program bantuan pangan bagi kelompok rentan serta edukasi gizi bagi masyarakat; 3. meningkatkan infrastruktur distribusi pangan agar harga tetap stabil dan terjangkau. 4. optimalisasi Lahan Termasuk Revitalisasi Lahan rusak Menjadi Produktif 5. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman 6. fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perkampungan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
						7. penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 8. pengembangan model percontohan pertanian modern 9. peningkatan mekanisasi pertanian 10. percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming*
				S56	Ketahanan Air: 1. penguatan infrastruktur air baku dan air bersih melalui pembangunan waduk, embung, dan sistem perpipaan yang efisien; 2. pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan konservasi daerah aliran sungai (das) dan reboisasi kawasan hulu; 3. peningkatan layanan akses air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perkampungan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM); 4. penerapan teknologi pengolahan air modern seperti sistem filtrasi dan desalinasi untuk daerah pesisir; 5. edukasi dan sosialisasi efisiensi penggunaan air di sektor rumah tangga dan industri.	1. mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih di daerah yang masih memiliki akses terbatas; 2. mewajibkan industri dan pertambangan untuk memiliki sistem pengolahan limbah air agar tidak mencemari sumber air bersih; 3. mendorong partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air dan pemanfaatan teknologi hemat air.
M7	T10	S17	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	S57	Mitigasi Perubahan Iklim dan Penurunan Emisi GRK : 1. pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui perlindungan kawasan hutan serta penguatan regulasi terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan alih fungsi lahan; 2. Pengembangan energi bersih dan rendah	1. implementasi kebijakan nol deforestasi dan peningkatan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan; 2. penyusunan regulasi yang mendorong industri di Papua

Tujuan / Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		karbon, seperti penggunaan energi surya, bioenergi, dan tenaga air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; 3. penerapan pertanian dan peternakan berkelanjutan dengan teknik agroforestri, pertanian rendah emisi, serta efisiensi dalam penggunaan pupuk dan pestisida; 4. pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah plastik, peningkatan daur ulang, dan pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi terbarukan; 5. mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan sistem transportasi berbasis energi hijau.	Tengah untuk menerapkan produksi rendah karbon; 3. meningkatkan investasi dalam sektor energi terbarukan dan transportasi rendah emisi; 4. penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam aksi mitigasi perubahan iklim.
	S58	Adaptasi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim: 1. penguatan sistem peringatan dini terhadap bencana alam dengan membangun pusat informasi bencana dan memperkuat sistem pemantauan cuaca dan iklim; 2. pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, waduk pengendali banjir, dan rumah tahan gempa di daerah rawan bencana; 3. peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk pelatihan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan darurat berbasis komunitas; 4. pengelolaan tata ruang berbasis risiko bencana, memastikan pembangunan tidak dilakukan di zona rentan bencana seperti daerah rawan banjir dan longsor; 5. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan	1. memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan lembaga kebencanaan nasional dalam penanggulangan bencana; 2. mewajibkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan standar ketahanan bencana dan adaptasi iklim; 3. meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim; 4. mendorong investasi dalam penelitian dan teknologi adaptasi iklim untuk sektor pertanian, perkebunan, dan

Tujuan / Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan
					anggaran untuk penanganan bencana, termasuk dana cadangan bencana yang memadai.	perikanan.

Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 – 2029 diolah

4.2.3. Penyelarasan dengan RKP 2027

Tema RKP Tahun 2027 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. Adapun fokus pembangunan provinsi dapat dilihat dari arah kebijakan RKP, yaitu :

4.2.1. Produktivitas:

1. Fokus Pembangunan : Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
   - penataan Kelembagaan dan Peningkatan efektivitas birokrasi;
   - penguatan kerangka regulasi bagi aktivitas ekonomi;
   - keselarasan regulasi lintas sektor dan Tingkat pemerintahan;
   - Penyesuaian kebijakan dengan standar tata Kelola.
2. Fokus Pembangunan: Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja Produktif
   - peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat (penyelenggaraan MBG);
   - penguatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan (pembangunan sekolah rakyat dan unggulan serta revitalisasi sekolah);
   - peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan (penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis).
   - penguatan kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan (pembangunan rumah sakit berkualitas);
   - penguatan produktivitas UMKM dan koperasi termasuk ekonomi perkampungan (koperasi Kampung/kelurahan merah putih).
3. Fokus Pembangunan: Belanja Negara untuk Peningkatan Produktivitas dan Menjaga Daya beli
   - penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan (kartu kesejahteraan);
   - peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat (kartu usaha afirmatif);
   - peningkatan akses terhadap hunian yang layak.
   - penguatan sistem jaminan sosial nasional;
4. Fokus Pembangunan: Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola
   - perluasan penerapan digitalisasi layanan publik dan sektor strategis;
   - penguatan pemanfaatan data sosial ekonomi nasional;
   - peningkatan kualitas sistem pencatatan, basis data, dan interoperabilitas.

4.2.2. Investasi:

1. Fokus Pembangunan: Penguatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha
   - penyempurnaan ekosistem perizinan dan layanan usaha;
   - penguatan kepastian dan konsistensi kebijakan investasi;
   - peningkatan daya tarik investasi nasional dan daerah.
2. Fokus Pembangunan: Penguatan Pembiayaan Pembangunan
   - penguatan fungsi intermediasi sektor keuangan;
   - optimalisasi kebijakan fiskal untuk belanja produktif;
   - penguatan peran investasi strategis nasional.
3. Fokus Pembangunan: FDI Berorientasi Industri dan Ekspor sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
   - penguatan peran kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus;
   - optimalisasi proyek strategis sebagai penggerak pertumbuhan;
   - pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
4. Fokus pembangunan: infrastruktur dan konektivitas ekonomi
   - penguatan infrastruktur dasar dan logistik;
   - peningkatan konektivitas antarwilayah dan pusat produksi;

- integrasi infrastruktur dengan kawasan industri dan sentra ekonomi.

4.2.3. Industri:

1. Fokus Pembangunan: Hilirisasi SDA Strategis
   - penguatan nilai tambah sumber daya alam berorientasi pasar global;
   - pengembangan industri berbasis sumber daya hayati;
   - pengembangan industri berbasis kelautan;
   - pengembangan industri berbasis mineral kritis.
2. Fokus Pembangunan: Ekonomi Sirkular dan Industri Berbasis Teknologi Tinggi
   - penguatan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan (reformasi pengelolaan sampah terintegrasi);
   - Pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan;
   - Penguatan industri hijau dan berkelanjutan;
   - Pengembangan industri berbasis teknologi maju;
   - Penguatan kapasitas industri manufaktur strategis (pengembangan industri alutsista dan pengembangan mobil nasional).
3. Fokus Pembangunan: Swasembada Pangan, Energi, dan Air
   - Penguatan ketahanan pangan nasional;
   - Penguatan ketahanan energi nasional;
   - Penguatan ketahanan sumber daya air.

Selanjutnya, target indikator sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 dapat diacu sesuai dengan indikator berikut.

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

No.	Indikator Sasaran Pembangunan	Target Tahun 2026	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,7-7,2	(%)
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	138,2 – 143,6	(%)
3	Kontribusi PDRB provinsi (%)	0,8	(%)
4	Tingkat Kemiskinan (%)	24,50 – 25,50	Nilai
5	Gini Rasio	0,343-0,350	Rasio
6	Indeks Modal manusia	0,43	Indeks
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,28	(%)
8	IKLH Daerah	82,72	(%)
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,31-2,36	(%)

Sumber : RKP Nasional Tahun 2027

4.2.4. Penyelarasan dengan RIPP Tahun 2022 - 2041

Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022 – 2041 perlu diperhatikan dalam penyelarasan arah pembangunan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2027, sebagai salah satu acuan dokumen rencana pembangunan dalam skala yang lebih makro. Adapun visi pembangunan Papua tahun 2041 adalah Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera, yang menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas SDM. Upaya perwujudan visi Papua di atas ditempuh melalui 3 misi dan sasaran indikator, yaitu:

1. Misi 1: memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
2. Misi 2: memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerja sama,

menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

3. Misi 3: meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan realisasi investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri).

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Tengah sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tengah tahap I (RAPPP I) tahun 2023-2025 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah Papua Tengah di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan wilayah Papua Tengah dapat dijabarkan menjadi :

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan yang diarahkan pada:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi:
   a. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan akreditasi.
   b. peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan orang asli Papua (OAP).
2. Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan strategi :
   a. peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan kabupaten/kota dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
   b. peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
3. Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahraga, dengan strategi:
   a. peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat.
   b. peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
   c. peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan yang diarahkan pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan Papua Tengah secara merata dengan strategi:

1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
2. peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Pembangunan ekonomi yang diarahkan pada:
   a. Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi:
      1) peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
      2) peningkatan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*).
3. Penataan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan strategi:
   a. peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program

bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP.

b. peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

4.2.5. Hasil Penyelarasan terhadap Dokumen Perencanaan

Melalui hasil telaah dokumen-dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, dan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan antara lain:

1. Prioritas pembangunan tahap I (pertama) RPJP Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;
2. Fokus pembangunan tahun III (periode ketiga) RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;
3. Isu aktual Pembangunan Provinsi Papua Tengah saat ini;
4. Tema, arah kebijakan dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2027;
5. Visi, Misi dan Fokus Pembangunan Papua dalam dokumen RIPPP;

Maka dapat dirumuskan beberapa fokus pembangunan yang selaras dengan masing-masing dokumen rujukan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Fokus Pembangunan Setiap Dokumen Rujukan RKPD Tahun 2027

No.	Dokumen Perencanaan Rujukan	Fokus Pembangunan Tahun 2027
1	*2*	*3*
1	Ranwal RPJP Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045	Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Responsif, Efektif, dan Efisien serta peningkatan akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat.
2	RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029	Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah
3	RKP Tahun 2027	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri
4	RIPPP	Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera

Sumber : RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045, dan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

Berdasarkan keterkaitan tema arahan pembangunan 2027 dari beberapa dokumen rujukan, dirumuskan tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 yaitu: Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah

Tema tersebut mengandung makna bahwa di tahun 2027 pembangunan Provinsi Papua Tengah fokus pembangunan adalah memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing daerah dengan memberdayakan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat Papua Tengah.. Dengan demikian, dapat dijabarkan beberapa poin penting dalam kalimat tema RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2027, yaitu :

1. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Wilayah.

   Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi potensi unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan sektor lainnya yang memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan dilakukan melalui peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, serta perluasan akses pasar guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif

   Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi melalui dukungan

permodalan, peningkatan keterampilan, inovasi produk, serta penguatan akses pasar. Pengembangan ekonomi kreatif juga didorong untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi

   Dengan memprioritaskan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti jalan, jembatan, transportasi, serta infrastruktur pendukung lainnya. Peningkatan konektivitas wilayah diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah.

4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif

   Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan SDM yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

5. Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Ekonomi

   Prioritas ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Reformasi regulasi diharapkan dapat mendorong investasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan ekonomi daerah.

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 yang telah dirumuskan di atas yaitu Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah, maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2027 yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Wilayah
2. Prioritas 2 : Penguatan UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif
3. Prioritas 3 : Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
4. Prioritas 4 : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif
5. Prioritas 5 : Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Ekonomi

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Tengah. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma *Money Follow Program Priority* atau dalam terjemahan "Uang Mengikuti Program Prioritas". Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kabupaten/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut mengubah paradigma sebelumnya yaitu *Money Follow Function* yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau PERANGKAT DAERAH/OPD Provinsi.

Dengan dirumuskannya prioritas pembangunan tahun 2027, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2027. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi menetapkan Program Super Prioritas Tahun 2025–2030 yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Program super prioritas tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Program super prioritas dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tabel 4.5 Program Prioritas KDH/ WKDH Tahun 2027

No.	Perangkat Daerah	Program Prioritas
1	*2*	*3*
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1) Sekolah Sepanjang Hari (SSH) 2) Pendidikan Gratis (BOSDA) 3) Pembangunan Asrama Sekolah di setiap kabupaten 4) Pengembangan Kapasitas Guru 5) Program MAPEGA 6) Program PPG 7) *Boarding School* / Kerja sama Lembaga 8) Pendidikan/ Pendirian Universitas *9)* Pembangunan *Community College*
2.	DINAS KESEHATAN	1) Pembangunan Rumah Sakit Provinsi 2) Program KO HARUS SEHAT 3) Pembinaan & Penguatan RSUD dan Puskesmas di 8 Kabupaten 4) Pendidikan Dokter Spesialis OAP 5) Pembangunan Klinik Bersalin dan Bayi Tabung
3.	DINAS PUPR & KAWASAN PEMUKIMAN	1) Pembangunan dan Penataan Perkantoran Puspem + Air Bersih 2) Review Ulang Master Plan/Basic Desain (Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah) 3) Pembangunan Sumber Air Baku/ PDAM di Nabire 4) Pembangunan Jalan dan Jembatan di 8 Kabupaten 5) Pembangunan Air Bersih di 8 Kabupaten 6) Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat (OAP)
4.	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	1) Pembangunan (UPTD Balai Pembibitan Peternakan) = Tim Percepatan 2) Pembinaan Petani Kopi (Penanaman Sejuta Pohon Kopi) = Tim Koperasi Kopi
5.	DINAS TANAMAN PANGAN, BHOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN	. Pembukaan Lahan Pertanian Percontohan
6.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Waharia Nabire 2) Pembangunan UPTD BBI (Balai Benih Ikan) Budidaya Ikan Air Tawar 3) *Aktivasi Cold Storage* dan PPI di Nabire dan Timika
7.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM	1) Listrik Menyala 24 Jam di Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya 2) Pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro 3) Pembangunan Pusat Panel Surya

		4) Survei Potensi Pertambangan 5) Pengembangan Pertambangan Rakyat beserta Regulasinya 6) Pembangunan BLK
8.	DINAS SOSIAL	1) Pembangunan Panti Asuhan Papua Tengah 2) Program Bangkit Papua Tengah 3) Bantuan Sepeda Motor untuk usaha ojek di 8 Kabupaten
9.	DINAS PERHUBUNGAN	1) Pengembangan Bandara Nabire 2) Pembangunan Jembatan Timbang 3) Subsidi Penerbangan Perintis dari Ibu Kota Kabupaten – Timika/Nabire (PP)
10.	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1) Peningkatan Bandwith 5G (Kerja sama dengan Telkomsel) 2) Pengadaan Dan Pemasangan CCTV di Kabupaten Nabire
11.	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	. Pendirian dan Pembinaan Koperasi di 8 Kabupaten
12.	SATPOL PP	1) Pelatihan PPNS 2) Pelatihan Bina Mental dan Fisik 3) Pengadaan Seragam dan Atribut
13.	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1) Pembangunan Gudang *Buffer Stock*
14.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1) Penguatan Peran Perempuan 2) Pelatihan Usaha Kecil Untuk Perempuan
15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTAHANAN	1) Pembentukan Satgas Merah
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
17.	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUMAS	1) Pembuatan Media Center (Cetak, Elektronik & *Cyber*)
	- BIRO TAPEM, KESRA, & OTSUS	1) Penyusunan LPPD 2) Pemetaan Hak Ulayat Tanah Adat 3) Persekutuan Gereja Se-Tanah Papua (Konferensi)
	- BIRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1) Pembentukan Pusat Analisis Perekonomian Daerah (Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Statistik, & BUMD)
	- BIRO HUKUM	1) Semiloka Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi 2) Pendampingan Hukum
	- BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1) Pelatihan & Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

	- BIRO ORGANISASI	1) Penyusunan Dokumen LKPD, SAKIP, LAKIP, & TPP
18.	DINAS KEPEMUDAHAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1) Pembangunan Sport Centre
19.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	1) Sensus OAP Papua Tengah (Berdasarkan Agama)
20.	SEKRETARIAT DPRPT	1) Pelatihan Penyusunan LPJ Kepada Pendamping Anggota DPRPT
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1) Pelatihan Peningkatan SDM Perencanaan 2) Tim Pendamping Peningkatan Bidang Riset & Inovasi Daerah 3) Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1) Pembangunan Balai Diklat 2) Pelatihan Manajemen ASN *3)* Sosialisasi Pendidikan Sekolah Kedinasan & *Try Out*
23.	INSPEKTORAT	1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Kemendagri 2) Pemantauan, *Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)* KPK 3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 4) Penyusunan Register Risiko 5) Pemantauan Audit & Review
24.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	1) Pelatihan Penganggaran 2) Pelatihan Penatausahaan & Pelaporan 3) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Di Bidang Barang Milik Daerah (BMD) 4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas di Bidang Pendapatan 5) BKK (Paniai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya)
25.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1) Pembentukan Satgas PengAwal Pembangunan
26.	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	1) Sosialisasi Undang-Undang Otsus & Perdasus Otsus

4.4. Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Prioritas Pembangunan tahun 2027 sebagaimana tersebut di atas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2027 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Adapun Sasaran Makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2027 sebagai perwujudan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029, adalah:

Tabel 4.6
Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi		
			2024	2025	2026	2027
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,36	5,2	6,05	6,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	%	27,60	26,50-27,00	26,50 - 27,00	26,50 - 27,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,75	2,65 - 3,12	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12
4	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah per kapita)	Rp/Juta	1119,5	128,7	141,7	154
5	Indeks Modal Manusia (indeks)	Indeks	0,42	0,42	0,427	0,435
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Rasio	0,383	0,380 – 0,383	0,380 – 0,383	0,380 – 0,383
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	%	59,28	59,28	61,22	63,15
8	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks	82,56	82,56	82,72	82,88
9	Kontribusi PDRB PROVINSI (%)	%	0,8	0,8	0,8	0,8

*Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 data diolah ***

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TENGAH

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Paniai

Pada tahun 2027, arah pembangunan difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah dan optimalisasi potensi lokal sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini dijabarkan ke dalam tiga pilar utama pembangunan kewilayahan:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan dan SDM

Pemerintah daerah memprioritaskan perluasan Kawasan Pengembangan Kopi yang tersebar di wilayah bagian utara dan tengah (seperti Distrik Siriwo dan sekitarnya) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Sekolah Sepanjang Hari dan perluasan Program Pelayanan Kesehatan yang dipusatkan pada titik-titik pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan angka IPM yang ditargetkan mencapai 61,00 pada tahun ini.

2. Penguatan Konektivitas dan Transportasi

Untuk mendukung mobilitas barang dan jasa, kebijakan tahun 2027 diarahkan pada pemantapan jaringan Jalan Arteri dan Kolektor Primer yang menghubungkan Paniai dengan kabupaten tetangga seperti Nabire dan Deiyai. Optimalisasi infrastruktur transportasi juga mencakup pengembangan Bandar Udara Pengumpul, Pelabuhan Sungai dan Danau, serta operasional Terminal Penumpang Tipe B guna menurunkan biaya logistik dan mendukung aksesibilitas wilayah terisolir.

3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Energi

Penyediaan layanan dasar menjadi prioritas untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan standar hidup layak, yang meliputi:

- Energi: Optimalisasi daya dukung listrik melalui PLTD Enarotali Unit 1 dan 2 di Kampung Aikai untuk menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi dan perkantoran.
- Sanitasi dan Air Bersih: Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan sampah di TPA Ipakiye, serta perluasan layanan air bersih melalui SPAM Regional Kali Weya.

Arah kebijakan kewilayahan tahun 2027 secara spasial menekankan pada integrasi antara pusat produksi (Kopi) dengan pusat distribusi (Pelabuhan/Bandara) melalui jaringan jalan yang mantap. Hal ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh distrik serta mendukung target capaian indikator makro yang telah ditetapkan. Adapun target indikator Pembangunan makro yang ditetapkan untuk Kabupaten Paniai pada Tahun rencana 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Paniai

No.	Indikator Makro	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,05
2	PDRB Perkapita (Rp juta)	24,226
3	Tingkat Kemiskinan (%)	32,19
4	Rasio Gini	0,243-0,238
5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	61
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,95

Sumber data: Bapperida Prov Papua Tengah dari RPJMD Prov Papua Tengah 2025-2029, (Data Diolah)

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Paniai menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,05%. Capaian ini diupayakan melalui optimalisasi sektor-sektor basis daerah, utamanya agrikultur dan perikanan darat, yang diharapkan mampu mengakselerasi produktivitas wilayah secara berkelanjutan. Sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, PDRB Perkapita ditargetkan mencapai Rp24,226 juta pada tahun 2027. Peningkatan nilai ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pendapatan riil rata-rata masyarakat Kabupaten Paniai. Tantangan struktural dalam pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dengan target Tingkat Kemiskinan sebesar 32,19% pada tahun 2027. Upaya penurunan ini ditempuh melalui penguatan program jaring pengaman sosial yang diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi di tingkat distrik dan kampung. Untuk mengukur pemerataan hasil pembangunan, target Rasio Gini dikendalikan pada rentang angka 0,243 - 0,238. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkecil kesenjangan pendapatan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat sehingga kue pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata. Kualitas sumber daya manusia ditargetkan mengalami peningkatan yang konsisten dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 61 poin. Target pemenuhan ini didorong melalui perluasan akses terhadap layanan kesehatan dasar yang bermutu, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemenuhan standar hidup yang layak. Seiring dengan perluasan kesempatan kerja di daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan mampu ditekan hingga menyentuh angka 0,95%. Rendahnya angka TPT ini mengindikasikan efektivitas penyerapan angkatan kerja lokal, khususnya pada pemantapan sektor informal dan padat karya infrastruktur.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nabire

Pada tahun 2027, kebijakan pembangunan Kabupaten Nabire diarahkan pada penguatan fungsi wilayah sebagai Hub Transportasi Utama dan Pusat Pemerintahan di Papua Tengah. Strategi kewilayahan ini diwujudkan melalui beberapa sektor prioritas:

1. Optimalisasi Hub Transportasi dan Konektivitas Regional

Sebagai pintu gerbang provinsi, kebijakan tahun 2027 fokus pada integrasi moda transportasi darat, laut, dan udara. Hal ini mencakup operasional Bandar Udara Pengumpul, penguatan peran Pelabuhan Perikanan Nusantara, serta Pelabuhan Pengumpul/Pengumpan. Di sektor darat, pemeliharaan dan pengembangan Jalan Arteri Primer serta Lintas Penyeberangan Antar kabupaten diprioritaskan untuk memperlancar arus logistik menuju wilayah pegunungan (seperti Paniai dan Dogiyai).

2. Pengembangan Pusat Pemerintahan dan Kawasan Strategis

Tahun 2027 menjadi momentum penguatan Pusat Pemerintahan Provinsi di Nabire. Pengembangan ini dibarengi dengan penyediaan sarana pendidikan melalui Program Sekolah Sepanjang Hari guna menciptakan SDM yang siap mengisi kebutuhan birokrasi dan industri jasa. Selain itu, sektor pariwisata dikembangkan melalui Kawasan Pengembangan Wisata di sepanjang pesisir dan kepulauan untuk meningkatkan daya tarik daerah.

3. Ketahanan Air, Energi, dan Infrastruktur Lingkungan

Untuk mendukung pertumbuhan populasi urban di Nabire, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang masif:

- Sumber Daya Air: Pembangunan dan optimalisasi bendungan strategis (seperti Bendungan Biha, Maidey, Nuhoa, dan Wanggar) serta Sabodam untuk pengendalian banjir dan pemenuhan air baku.
- Energi & Migas: Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta Pembangkit Tenaga Listrik guna memastikan kemandirian energi bagi industri dan rumah tangga.

- Sanitasi: Penguatan sistem pengolahan limbah melalui IPLT Kabupaten Nabire serta optimalisasi TPA Samabusa dan TPA Wanggar Makmur untuk menjaga daya dukung lingkungan perkotaan.

4. Diversifikasi Ekonomi Berbasis Komoditas

Meskipun dominan di sektor jasa, Nabire tetap mendorong sektor agrikultur melalui Kawasan Pengembangan Kopi di wilayah pedalaman/perbatasan, guna memastikan inklusivitas ekonomi bagi masyarakat di wilayah non-pesisir.

Arah kebijakan tahun 2027 menempatkan Nabire sebagai simpul utama layanan publik dan distribusi barang di Papua Tengah. Integrasi antara infrastruktur transportasi yang modern dengan ketahanan sumber daya air dan energi menjadi kunci untuk mencapai target IPM sebesar 73,40 dan menekan angka pengangguran terbuka di wilayah perkotaan. Target makro Pembangunan daerah untuk Kabupaten Nabire pada Tahun rencana 2027 adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Nabire Tahun 2027

No.	Indikator Makro	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,09
2	PDRB Perkapita (Rp Juta)	14,885
3	Tingkat Kemiskinan (%)	24,14
4	Rasio Gini	0,331-0,298
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,40
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,58

Sumber data: Bapperida Prov Papua Tengah dari RPJMD Prov Papua Tengah 2025-2029, (Data Diolah)

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Nabire menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,09%. Capaian ini didorong oleh penguatan sektor perdagangan, jasa, dan logistik seiring dengan peran strategis Nabire sebagai pusat pertumbuhan dan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah yang memacu aktivitas ekonomi regional. Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang positif, PDRB Perkapita ditargetkan mencapai Rp14,885 juta pada tahun 2027. Kenaikan nilai ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas serta tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Dalam upaya penanggulangan masalah sosial, Tingkat Kemiskinan ditargetkan berada pada angka 24,14% pada tahun 2027. Penurunan beban kemiskinan urban dan perkampungan ini diupayakan melalui program perlindungan sosial yang terintegrasi dengan peningkatan akses terhadap layanan kebutuhan dasar. Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan, target Rasio Gini dikendalikan pada rentang angka 0,331 - 0,298. Pengendalian ini menunjukkan fokus kebijakan daerah untuk meminimalkan ketimpangan dan memastikan distribusi hasil-hasil pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nabire diarahkan untuk tetap berada pada kategori tinggi dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,40 poin. Target pemenuhan ini didasarkan pada keberlanjutan peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, standar pendidikan, serta standar hidup layak. Seiring dengan upaya perluasan kesempatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan mampu ditekan ke level 3,58% pada tahun 2027. Capaian ini akan diakselerasi melalui optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor jasa formal maupun penguatan ekosistem usaha mikro.

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Intan Jaya

Pada tahun 2027, arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Intan Jaya difokuskan pada upaya "Membuka Isu Strategis Wilayah" melalui penguatan infrastruktur dasar dan optimalisasi potensi lokal di sepanjang koridor utama. Strategi ini dijabarkan ke dalam beberapa poin kebijakan:

1. Pengembangan Konektivitas dan Aksesibilitas Udara

Mengingat topografi wilayah yang ekstrem, kebijakan tahun 2027 memberikan prioritas tinggi pada operasional dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul yang tersebar di titik-titik strategis (seperti Sugapa dan sekitarnya). Infrastruktur udara ini terintegrasi dengan jaringan Jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer yang membelah wilayah dari arah barat ke timur, guna memastikan kelancaran distribusi logistik dan mobilitas penduduk antar-distrik.

2. Kemandirian Energi dan Penyediaan Air Bersih

Untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, pemerintah daerah memfokuskan pembangunan infrastruktur energi berbasis potensi lokal, yang meliputi:

- Energi Terbarukan: Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di wilayah-wilayah potensial.
- Energi Konvensional: Penguatan daya melalui PLTD Sugapa sebagai penyokong utama kelistrikan di pusat pemerintahan.
- Layanan Air Bersih: Percepatan Pembangunan SPAM IKK Distrik Sugapa guna menjamin ketersediaan air bersih yang layak bagi masyarakat perkotaan.

3. Penguatan Potensi Ekonomi Lokal dan Kualitas SDM

Kebijakan tahun 2027 mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kawasan Pengembangan Kopi yang dipetakan di bagian timur dan tengah wilayah. Secara paralel, kualitas hidup masyarakat ditingkatkan melalui program layanan dasar yang menyentuh langsung akar rumput, yaitu:

- Pendidikan: Implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari untuk meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa.
- Kesehatan: Perluasan cakupan Program Pelayanan Kesehatan guna menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan angka harapan hidup (sebagai penunjang IPM target 52,71).

Tabel 5. 3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027

No.	Indikator makro	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,73
2	PDRB Perkapita (Rp Juta)	11,187
3	Tingkat Kemiskinan (%)	39,82
4	Rasio Gini	0,346-0,273
5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	52,71
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,10

Sumber data: Bapperida Prov Papua Tengah dari RPJMD Prov Papua Tengah 2025-2029, (Data diolah)

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,73%. Target ini mencerminkan upaya optimalisasi sektor pertanian komoditas lokal dan percepatan pembangunan infrastruktur fisik strategis guna menggerakkan kembali roda perekonomian wilayah. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi daerah, PDRB Perkapita ditargetkan mencapai Rp11,187 juta pada tahun 2027. Kenaikan nilai ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk secara bertahap. Tantangan struktural dalam penanggulangan masalah sosial diupayakan melalui pemantapan target Tingkat Kemiskinan sebesar 39,82% pada tahun 2027. Strategi penurunan ini ditempuh melalui penguatan program

perlindungan sosial yang diintegrasikan dengan upaya pembukaan aksesibilitas ke wilayah-wilayah distrik terisolir. Untuk memastikan pemerataan pendapatan masyarakat, target Rasio Gini dikendalikan pada rentang angka 0,346 - 0,273. Batasan ini menunjukkan fokus kebijakan daerah agar distribusi hasil-hasil pembangunan tetap terjaga dan merata, sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah. Kualitas sumber daya manusia ditargetkan mengalami perbaikan yang konsisten dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 52,71 poin. Target peningkatan ini diakselerasi melalui penguatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, perluasan partisipasi pendidikan, serta perbaikan standar hidup layak di tingkat akar rumput. Dalam sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan mampu dikendalikan pada angka 2,10% pada tahun 2027. Rendahnya angka pengangguran terbuka ini mengindikasikan dominasi sektor informal dan efektivitas penyerapan tenaga kerja lokal pada program padat karya infrastruktur daerah.

5.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Puncak

Pada tahun 2027, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Puncak difokuskan pada strategi "Transformasi Ekonomi Berbasis Agropolitan dan Kemandirian Layanan Dasar". Kebijakan kewilayahan ini mencakup beberapa prioritas strategis:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Agropolitan)

Pemerintah daerah memfokuskan pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Wisata Agropolitan dan Kawasan Pengembangan Kopi yang dipetakan secara intensif di wilayah bagian timur dan tengah (Distrik Ilaga, Beoga, dan Sinak). Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan sektor pertanian dengan pariwisata guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan pendapatan masyarakat, sekaligus mendukung target LPE sebesar 5,45%.

2. Penguatan Konektivitas Udara dan Darat

Mengingat ketergantungan wilayah pada transportasi udara, kebijakan tahun 2027 memprioritaskan optimalisasi Bandar Udara Pengumpul di Ilaga, Sinak, dan Beoga. Infrastruktur ini disinergikan dengan pembangunan Jalan Arteri Primer yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan (Ilaga–Sinak) untuk menjamin kelancaran distribusi logistik dan menekan kemahalan harga barang.

3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Sanitasi

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan angka kemiskinan menuju 35,89%, pemerintah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur vital:

- Air Minum: Percepatan Pembangunan SPAM IKK di tiga wilayah kunci, yaitu Distrik Ilaga, Distrik Beoga, dan Distrik Sinak guna menjamin akses air bersih perpipaan.
- Sanitasi dan Lingkungan: Optimalisasi pengelolaan sampah melalui TPA Ilaga untuk menjaga daya dukung lingkungan perkotaan.
- Energi: Pemanfaatan potensi energi terbarukan melalui operasional PLTMH Omukia untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat dan perkantoran.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara spasial, program penguatan SDM diletakkan pada pusat-pusat distrik melalui Program Sekolah Sepanjang Hari dan perluasan cakupan Program Pelayanan Kesehatan. Hal ini menjadi faktor kunci untuk mendorong IPM Puncak menuju target 49 poin pada tahun 2027.

Tabel 5. 4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Puncak Tahun 2027

No.	Indikator Makro	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,45
2	PDRB Perkapita (Rp Juta)	15,51
3	Tingkat Kemiskinan (%)	35,89
4	Rasio Gini	0,282-0,241

5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	49
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,86

Sumber data: Bapperida Provinsi Papua Tengah dari RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2029, (Data diolah)

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,45%. Target yang relatif tinggi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan memacu produktivitas sektor-sektor unggulan domestik, khususnya agropolitan dan perdagangan komoditas bernilai tambah, guna menggerakkan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Sejalan dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB Perkapita ditargetkan mencapai Rp15,51 juta pada tahun 2027. Peningkatan nilai ini menunjukkan upaya terstruktur dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi wilayah serta mendorong kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat secara bertahap. Tantangan penyelesaian masalah sosial diupayakan melalui penetapan target Tingkat Kemiskinan sebesar 35,89% pada tahun 2027. Penurunan ini diakselerasi melalui strategi integrasi program jaring pengaman sosial dengan pemantapan konektivitas wilayah (koridor Ilaga–Beoga–Sinak) guna menekan kemahalan harga barang kebutuhan pokok. Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat, target Rasio Gini dikendalikan pada rentang angka 0,282 - 0,241. Batasan yang cukup rendah ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Puncak berfokus pada pemerataan (*growth with equity*), memastikan agar hasil-hasil pembangunan dapat menjangkau distrik-distrik pedalaman secara proporsional. Kualitas sumber daya manusia ditargetkan mengalami perbaikan yang konsisten dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 49 poin. Target penguatan ini difokuskan pada peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar serta optimalisasi program pendidikan (seperti Sekolah Sepanjang Hari) untuk mendongkrak derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Dalam sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan mampu ditekan hingga menyentuh angka 0,86% pada tahun 2027. Sangat rendahnya angka pengangguran terbuka ini mengindikasikan efektivitas penyerapan angkatan kerja lokal pada sektor informal pertanian serta optimalisasi proyek-proyek padat karya prasarana dasar.

5.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mimika

Pada tahun 2027, arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Mimika difokuskan pada "Penguatan Hilirisasi Industri dan Integrasi Logistik Maritim-Udara". Strategi ini dijabarkan ke dalam beberapa prioritas kewilayahan utama:

1. Transformasi Konektivitas dan Hub Logistik Internasional

Sebagai pintu gerbang utama di pesisir selatan, kebijakan tahun 2027 memprioritaskan optimalisasi simpul transportasi makro. Hal ini mencakup pengembangan Bandar Udara Pengumpul (Mozes Kilangin) yang didukung oleh DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara), serta penguatan infrastruktur pelabuhan yang meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Pengumpul, dan Pelabuhan Sungai dan Danau. Integrasi ini disinergikan dengan jaringan Jalan Arteri Primer yang menghubungkan pesisir dengan wilayah pegunungan (Nabire-Dogiyai-Deiyai-Paniai) serta lintas penyeberangan antar provinsi.

2. Ketahanan Energi dan Infrastruktur Pendukung Industri

Untuk menjamin keberlangsungan aktivitas industri dan domestik, pemerintah fokus pada diversifikasi sumber energi dan infrastruktur dasar:

- Energi Multimoda: Optimalisasi PLTU Freeport Indonesia, PLTMG MPP Timika, serta pemanfaatan energi terbarukan melalui jaringan PLTS di wilayah pesisir (Aikawapuka, Faka-Fuku, Keakwa, dan Terpusat Kawe).
- Fasilitas Migas: Penguatan distribusi melalui Fuel Terminal Timika guna mendukung mobilitas ekonomi regional.

- Layanan Dasar: Percepatan Optimalisasi SPAM Distrik Mimika Timur dan pengelolaan sanitasi di TPA Kabupaten Mimika untuk menjaga kualitas hidup masyarakat urban.

3. Pengembangan Potensi Ekonomi Inklusif dan Budaya

Kebijakan tahun 2027 tidak hanya fokus pada sektor pertambangan, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi berbasis kerakyatan:

- Agrikultur dan Budaya: Pengembangan Kawasan Pengembangan Kopi di wilayah pedalaman serta pembentukan Kawasan Pelestarian Budaya untuk menjaga identitas lokal di tengah arus modernisasi.
- Pengendalian Dampak Lingkungan: Pembangunan Sabodam Wapoga Mimika di wilayah Mimika Baru sebagai langkah mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya air.

4. Akselerasi Kualitas SDM Terintegrasi

Secara spasial, peningkatan kualitas SDM dipusatkan pada koridor pemukiman melalui Program Sekolah Sepanjang Hari dan perluasan cakupan Program Pelayanan Kesehatan. Strategi ini diharapkan mampu mendorong IPM Mimika mencapai target 78,84 pada tahun 2027 dan menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompetitif.

Tabel 5. 5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Mimika Tahun 2027

No.	Indikator Makro	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95
2	PDRB Perkapita (Rp Juta)	496,000
3	Tingkat Kemiskinan (%)	11,63
4	Rasio Gini	0,334-0,310
5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	78,84
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,73

Sumber data: Bapperida Provinsi Papua Tengah dari RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2029, (Data diolah)

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,95%. Target ini didorong oleh upaya menjaga stabilitas sektor ekstraktif pertambangan dan merangsang pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, serta jasa penunjang industri guna mewujudkan struktur ekonomi daerah yang tangguh. Sebagai motor penggerak ekonomi utama dengan kapasitas fiskal yang besar, PDRB Perkapita Kabupaten Mimika ditargetkan mencapai Rp496,000 juta pada tahun 2027. Angka yang sangat tinggi ini mencerminkan tingginya intensitas *output* perekonomian wilayah dan kapasitas produktivitas per kapita masyarakat di daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, Tingkat Kemiskinan ditargetkan mampu ditekan hingga ke angka 11,63% pada tahun 2027. Strategi penurunan kemiskinan ini difokuskan pada perluasan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal di wilayah pesisir dan pedalaman guna mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Untuk mengukur pemerataan pendapatan di tengah struktur ekonomi industri, target Rasio Gini dikendalikan pada rentang angka 0,334 - 0,310. Pengendalian ini menunjukkan fokus kebijakan jangka menengah daerah untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi perkotaan-perkampungan dan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih adil. Kualitas sumber daya manusia menjadi target unggulan Kabupaten Mimika dengan sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,84 poin. Pencapaian IPM kategori tinggi ini didorong oleh konsistensi investasi daerah dalam penyediaan layanan kesehatan berkualitas, perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, serta perbaikan standar hidup layak. Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan mampu ditekan ke level 5,73% pada tahun 2027. Upaya ini ditempuh melalui strategi penguatan kerja sama keterkaitan ketenagakerjaan (*link and match*) antara dunia

industri dengan lembaga pelatihan kerja lokal, serta optimalisasi sektor UMKM perkotaan.

5.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya

Pada tahun 2027, arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Puncak Jaya difokuskan pada "Percepatan Konektivitas Pegunungan, Kemandirian Energi Lokal, dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat". Strategi spasial ini dijabarkan ke dalam beberapa klaster prioritas pembangunan:

1. Pemantapan Jaringan Transportasi dan Konektivitas Wilayah

Untuk mengatasi hambatan geografis yang ekstrem di wilayah pegunungan tengah, kebijakan tahun 2027 memprioritaskan pemeliharaan dan peningkatan Jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer yang membentang dari arah barat ke timur, menghubungkan Puncak Jaya dengan kabupaten tetangga (Puncak dan Tolikara). Pembangunan darat ini disinergikan dengan optimalisasi peran Bandar Udara Pengumpul serta operasional Terminal Penumpang Tipe B guna menjamin kelancaran arus logistik, menekan disparitas harga barang, dan membuka keterisolasian distrik-distrik pedalaman.

2. Diversifikasi Kemandirian Energi dan Penyediaan Air Bersih

Pemerintah daerah mengarahkan pemenuhan infrastruktur energi dan layanan dasar berbasis potensi wilayah dan energi terbarukan, yang meliputi:

- Sistem Kelistrikan: Pembangunan dan pemantapan Gardu Induk Mulia Tegangan 150/20 kV Kapasitas 10 MVA sebagai jangkar energi utama di pusat pemerintahan.
- Energi Alternatif: Optimalisasi potensi energi ramah lingkungan melalui PLTA, PLTMH, PLTS, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga *Bio-Ethanol* Fawi di wilayah utara.
- Air Bersih: Perluasan distribusi air minum perpipaan melalui program SPAM Puncak Jaya guna meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak.

3. Pemantapan Sanitasi dan Infrastruktur Lingkungan Hidup

Seiring pertumbuhan kawasan perkotaan di Distrik Mulia dan sekitarnya, pengelolaan dampak lingkungan hidup diakselerasi melalui:

- Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
- Optimalisasi Sistem Jaringan Persampahan.
- Penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) guna menjaga daya dukung lingkungan pegunungan secara berkelanjutan.

4. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Penguatan Kualitas SDM

- Ekonomi Berbasis Komoditas: Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat lokal melalui perluasan Kawasan Pengembangan Kopi yang dipetakan di distrik-distrik bagian selatan dan tengah.
- Sosial dan Keagamaan: Penguatan kapasitas sumber daya manusia secara spasial diintegrasikan melalui penataan kawasan pemukiman yang didukung oleh Program Sekolah Sepanjang Hari dan perluasan akses Program Pelayanan Kesehatan.

Tabel 5. 6 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2027

No.	Indikator Makro	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40
2	PDRB Perkapita (Rp Juta)	12,25
3	Tingkat Kemiskinan (%)	34,94
4	Rasio Gini	0,371-0,364
5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	54
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,67

Sumber data: Bapperida Provinsi Papua Tengah dari RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2029, (Data diolah)

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,40%. Target ini mencerminkan komitmen daerah dalam mempertahankan stabilitas produksi pada sektor-sektor basis serta mendorong produktivitas komoditas unggulan lokal (seperti sektor agrikultur kopi) guna menjaga momentum tren pertumbuhan yang positif. Seiring dengan terjaganya kinerja perekonomian daerah, PDRB Perkapita ditargetkan mencapai Rp12,25 juta pada tahun 2027. Kenaikan nilai ini menunjukkan upaya terstruktur dari pemerintah daerah untuk meningkatkan *output* riil wilayah sekaligus mendorong peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat secara bertahap. Penurunan beban sosial kemiskinan menjadi fokus utama dengan menetapkan target Tingkat Kemiskinan sebesar 34,94% pada tahun 2027. Strategi pencapaian target ini ditempuh melalui integrasi program perlindungan sosial dengan pemantapan konektivitas darat dan udara guna memperlancar arus logistik dan menekan kemahalan harga kebutuhan pokok di tingkat distrik. Untuk mengukur pemerataan pendapatan masyarakat, target Rasio Gini dikendalikan pada rentang angka 0,371-0,364. Batasan ini menunjukkan fokus kebijakan daerah agar distribusi hasil-hasil pembangunan tetap merata, menekan ketimpangan antarwilayah, serta memastikan kue pembangunan dapat menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman. Kualitas sumber daya manusia ditargetkan mengalami perbaikan yang signifikan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 54 *point*. Langkah akselerasi ini didorong melalui perluasan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan dasar di setiap puskesmas, peningkatan mutu pendidikan lewat program sekolah berpola asrama, serta pemenuhan standar hidup layak. Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan mampu ditekan pada level yang rendah, yaitu sebesar 0,67% pada tahun 2027. Rendahnya angka pengangguran ini mengindikasikan tingginya penyerapan angkatan kerja lokal pada sektor informal pertanian mandiri serta optimalisasi program padat karya infrastruktur daerah.

5.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Deiyai

Pada tahun 2027, arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Deiyai difokuskan pada strategi "Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Lokal, Penguatan Infrastruktur Dasar Perkotaan, dan Konektivitas Lintas Pegunungan". Kebijakan spasial ini dijabarkan ke dalam beberapa klaster prioritas pembangunan:

1. Pengembangan Sektor Unggulan Terintegrasi (Agropolitan, Minapolitan, dan Wisata)

Pemerintah daerah mengarahkan pemanfaatan potensi ruang untuk mendiversifikasi ekonomi kemasyarakatan melalui tiga pilar komoditas utama:

- Kawasan Minapolitan & Wisata Danau Tigi: Berpusat di sekitar wilayah Tigi dan Tigi Timur untuk mengoptimalkan potensi perikanan air tawar serta meningkatkan daya tarik wisata alam berbasis kearifan lokal.
- Kawasan Agropolitan: Dikembangkan di wilayah bagian selatan (Distrik Kapiraya) guna memperkuat ketahanan pangan dan penyediaan komoditas pertanian bernilai tambah tinggi.

2. Pemantapan Konektivitas Transportasi Regional

Guna mendukung mobilisasi hasil bumi dan menurunkan biaya logistik antarwilayah pegunungan, kebijakan tahun 2027 memprioritaskan pemeliharaan Jalan Arteri Primer (koridor utama yang menghubungkan Dogiyai–Deiyai–Paniai) serta perluasan jaringan Jalan Kolektor Primer ke pusat-pusat distrik seperti Bowobado dan Kapiraya. Infrastruktur darat ini diperkuat dengan fungsi layanan transito melalui Terminal Penumpang Tipe B, Pelabuhan Sungai dan Danau, serta optimalisasi Bandar Udara Pengumpul di Waghete.

3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Air Bersih, dan Sanitasi

Seiring dengan pemusatan aktivitas penduduk di ibu kota kabupaten (Waghete/Tigi), penyediaan sarana prasarana dasar diakselerasi melalui:

- Sistem Air Bersih: Percepatan operasional pembangunan tiga sistem penyediaan air minum strategis, yaitu SPAM Regional Kali Aiya, SPAM Regional Kali Gakokebo, dan SPAM Regional Kali Okomo.
- Sanitasi Lingkungan: Pemantapan pengelolaan persampahan wilayah perkotaan melalui optimalisasi TPA Watiyai di bagian utara guna menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup pegunungan.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyediaan jangkauan pelayanan sosial dasar diletakkan secara terintegrasi pada koridor permukiman utama melalui pemantapan Program Sekolah Sepanjang Hari di sektor pendidikan dan perluasan jangkauan Program Pelayanan Kesehatan di sektor kesehatan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM).

Tabel 5. 7 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Deiyai Tahun 2027

No	Indikator Makro	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75
2	PDRB Perkapita (Rp Juta)	19,500
3	Tingkat Kemiskinan (%)	37,66
4	Rasio Gini	0,292-0,266
5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	63,51
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,13

Sumber data: Bapperida Prov Papua Tengah dari RPJMD Prov Papua Tengah 2025-2029, (Data diolah)

Pada tahun rencana 2027, Pemerintah Kabupaten Deiyai menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,75%. Capaian ini akan diakselerasi melalui optimalisasi sektor-sektor basis kerakyatan, terutama sektor agrikultur (pertanian pangan), perikanan air tawar (minapolitan), serta penataan potensi wisata alam guna mendorong produktivitas wilayah yang berkelanjutan. Sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang positif, nilai PDRB Perkapita ditargetkan mencapai Rp19,500 juta pada tahun 2027. Kenaikan nilai ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan *output* perekonomian daerah yang berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat. Tantangan struktural dalam penanggulangan masalah sosial tetap menjadi prioritas utama dengan menetapkan target Tingkat Kemiskinan sebesar 37,66% pada tahun 2027. Penurunan beban kemiskinan ini akan ditempuh melalui program perlindungan sosial yang terintegrasi dengan pemenuhan layanan dasar pemukiman, seperti penyediaan sarana air bersih (SPAM Regional). Untuk memastikan aspek pemerataan hasil pembangunan, target Rasio Gini dikendalikan pada rentang angka 0,292 - 0,266. Angka yang relatif rendah ini menunjukkan fokus kebijakan jangka menengah Kabupaten Deiyai yang mengedepankan prinsip pertumbuhan inklusif (*growth with equity*) guna meminimalkan ketimpangan pendapatan antarwilayah. Kualitas sumber daya manusia ditargetkan mengalami perbaikan yang signifikan dengan sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 63,51 poin. Target capaian ini didorong oleh prioritas investasi daerah pada penguatan mutu pelayanan kesehatan dasar di setiap distrik serta keberlanjutan program penguatan literasi pendidikan (seperti Program Sekolah Sepanjang Hari). Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan mampu ditekan hingga ke level 1,13% pada tahun 2027. Rendahnya persentase pengangguran terbuka ini mengindikasikan efektivitas penyerapan angkatan kerja lokal pada sektor informal agribisnis mandiri serta pelaksanaan proyek-proyek padat karya infrastruktur daerah.

5.8. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dogiyai

Pada tahun rencana 2027, arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Dogiyai difokuskan pada strategi "Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi Moanemani, Pemantapan Konektivitas Trans-Papua, dan Penguatan Pusat Layanan Sosial Budaya". Langkah spasial ini dijabarkan ke dalam beberapa prioritas pembangunan sektoral:

1. Pengembangan Sektor Unggulan Berbasis Perkebunan dan Pariwisata

Pemerintah daerah mengarahkan pemanfaatan ruang untuk mengakselerasi kemandirian ekonomi masyarakat melalui optimalisasi dua sektor utama:

- Komoditas Kopi: Memperkuat produksi dan hilirisasi pada Kawasan Pengembangan Kopi yang berpusat di sekitar wilayah Distrik Kamu (Moanemani) dan sekitarnya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
- Pariwisata: Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya Kawasan Lembah Kamu guna membuka alternatif pendapatan daerah berbasis kearifan lokal.

2. Pemantapan Konektivitas Transportasi dan Simpul Logistik

Guna mendukung pergerakan logistik inter regional pesisir-pegunungan (Nabire–Dogiyai–Deiyai–Paniai), kebijakan tahun 2027 memprioritaskan pemeliharaan kualitas Jalan Arteri Primer (Jalur Trans-Papua) yang memotong wilayah Sukikai Selatan hingga Kamu. Infrastruktur darat ini disinergikan dengan pemantapan jaringan Jalan Kolektor Primer ke pusat-pusat pertumbuhan baru di Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, serta optimalisasi fungsi Bandar Udara Pengumpul yang tersebar secara spasial di wilayah tengah dan barat.

3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Air Bersih, dan Sanitasi

Untuk mendukung penataan kawasan ibu kota (Kamu) dan distrik sekitarnya agar menjadi pusat pelayanan yang layak, pemenuhan prasarana dasar dipercepat melalui:

- Sistem Air Bersih: Percepatan pembangunan dan perluasan distribusi jaringan pipa melalui SPAM Regional Kali Okeiya dan SPAM Regional Kali Tugou.
- Sanitasi Lingkungan: Optimalisasi sistem jaringan persampahan domestik melalui pemantapan operasional TPA Dogiyai guna menjaga daya dukung lingkungan perkotaan.

4. Penataan Kawasan Strategis Sosial Budaya dan SDM

- Klaster Sosial Budaya: Kebijakan tata ruang diarahkan pada pengembangan tiga kawasan komunal utama, yaitu Kawasan Strategis Sosial Budaya Egebutu, Moanemani, dan Pugatadi. Penataan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas sosial dan kelestarian adat terintegrasi.
- Akselerasi Kualitas SDM: Penguatan mutu pelayanan kemasyarakatan diwadahi melalui implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari di bidang pendidikan dan perluasan jangkauan Program Pelayanan Kesehatan di tingkat Puskesmas/Pustu pembantu.

Tabel 5. 8

Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Dogiyai Tahun 2027

No.	Indikator Makro	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,42
2	PDRB Perkapita (Rp Juta)	12,45
3	Tingkat Kemiskinan (%)	29,01
4	Rasio Gini	0,344-0,301
5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	61
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,03

Sumber data: Bapperida Prov Papua Tengah dari RPJMD Prov Papua Tengah 2025-2029, (Data diolah)

Pada tahun rencana 2027, Pemerintah Kabupaten Dogiyai menetapkan target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,42%. Peningkatan secara bertahap ini difokuskan pada optimalisasi produktivitas komoditas perkebunan unggulan daerah, khususnya Kopi Moanemani, serta pengembangan potensi pariwisata alam di Kawasan Lembah Kamu sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan kenaikan kinerja produktivitas daerah, nilai PDRB Perkapita ditargetkan mencapai Rp12,45 juta pada tahun 2027. Capaian target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong penguatan nilai tambah produk lokal yang diharapkan mampu meningkatkan standar pendapatan riil masyarakat secara berkala. Penurunan beban sosial kemiskinan diupayakan secara terukur dengan menetapkan target Tingkat Kemiskinan sebesar 29,01% pada tahun 2027. Upaya pencapaian target ini diakselerasi melalui keterpaduan program jaring pengaman sosial dengan pemenuhan infrastruktur dasar perkampungan, seperti sarana air bersih melalui SPAM Regional (Kali Okeiya dan Kali Tugou). Untuk menjamin hasil-hasil pembangunan dapat terdistribusi secara adil, target Rasio Gini dikendalikan pada rentang angka 0,344-0,301. Pengendalian angka kesenjangan ini sejalan dengan prinsip pertumbuhan inklusif (*growth with equity*) untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan antara wilayah pusat pemerintahan distrik dengan perkampungan. Kualitas pembangunan sumber daya manusia ditargetkan mengalami tren peningkatan yang positif dengan sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 61 poin. Target pemenuhan standar pelayanan dasar ini didorong melalui perluasan akses layanan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas serta keberlanjutan implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari. Pada sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan mampu ditekan hingga ke level 2,03% pada tahun 2027. Terjaganya angka pengangguran terbuka yang relatif rendah ini mengindikasikan efektivitas penyerapan angkatan kerja lokal pada sektor informal pertanian perkebunan mandiri dan program padat karya daerah.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2027

Pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terbentuknya Provinsi Papua Tengah membuat pemerintah daerah perlu membuat proyeksi pendanaan daerah demi keberlangsungan pemerintahan daerah. Untuk lebih jelas mengenai pendanaan daerah dapat dilihat pada:

Tabel 6. 1 Estimasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 (rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Pagu
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366,375,869,150.00
2	Dinas Kesehatan	158,334,914,303.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	265,078,607,939.00
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	8,535,289,261.00
5	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran Dan Penyelamatan	7,710,691,214.00
6	Dinas Sosial	38,415,075,526.00
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	46,537,269,035.00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Keluarga Berencana	10,265,427,619.00
9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Ketahanan Pangan	19,279,281,839.00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	22,805,946,955.00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	10,904,155,287.00
12	Dinas Perhubungan	16,401,111,096.00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	15,531,677,352.00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	13,115,605,856.00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13,660,640,390.00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14,423,720,084.00
17	Dinas Kelautan Dan Perikanan	17,205,591,462.00
18	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	18,205,591,462.00
19	Sekretariat Daerah	110,843,528,333.00
20	Sekretariat DPRPT	176,299,910,783.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	23,669,642,817.00
22	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	758,897,701,639.00
	UPT Pendapatan Nabire	3,000,000,000.00
	UPT Pendapatan Paniai	2,500,000,000.00
	UPT Pendapatan Mulia	2,000,000,000.00
	UPT Pendapatan Mimika	4,000,000,000.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17,452,694,297.00

24	Inspektorat	32,290,580,078.00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21,865,700,291.00
26	Sekretariat MRP PROVINSI PAPUA TENGAH	55,253,937,885.00
TOTAL		

Sumber : SIPD RI Tahun 2027

6.2 Rencana Program Pemerintah Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran "*money follow function*" kepada "*money follow program*", maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan: (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra-Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2027 untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam:

Tabel 6. 2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2027

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.714.322.160,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	19.443.444.900,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	317.628.501.589,00	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.375.352.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.533.973.575,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	205.333.700,00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	472.390.200,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.621.875.999,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	133.147.613.486,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.710.961.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.900.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	480.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.374.463.818,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	300.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	350.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	350.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	138.860.371.139,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	27.173.458.400,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.000.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.200.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.000.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.000.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6.457.059.800,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	20.000.000.000,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.000.000.000,00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	500.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	53.287.718.600,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	500.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	500.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN

		KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.300.000.000,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.200.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.055.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI*	582.728.200,00	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.900.000.000,00	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA*	765.136.000,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	815.913.900,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	582.728.200,00	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	765.136.000,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	815.913.900,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		DINAS SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.190.075.526,00	
PEMBERDAYAAN SOSIAL	628.000.000,00	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.350.000.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.247.000.000,00	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI

		DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.065.895.835,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.150.000.000,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100.000.000,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	600.000.000,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	500.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	350.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	200.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	37.071.373.200,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	350.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.465.427.619,00	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.300.000.000,00	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	525.000.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	475.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	300.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	350.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	350.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	400.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.288.761.506,00	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.000.000.000,00	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.740.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.000.000.000,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.600.000.000,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.300.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	200.000.000,00	
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	300.000.000,00	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.604.130.945,00	

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	300.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.201.816.010,00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.201.816.010,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.000.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.904.155.287,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	500.000.000,00	
PROGRAM PENDATAAN PENDUDUK	500.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAMPUNG	500.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	500.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.500.353.996,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.000.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	600.757.100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	1.100.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		DINAS KOMUNIKASI,

		INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.086.677.352,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.600.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.245.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.100.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	500.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.670.991.956,00	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.300.000.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	164.133.572,00	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	50.000.000,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	50.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	874.485.928,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
PROGRAM PEN GEMBANGAN EKSPOR	120.000.000,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	620.000.000,00	

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	490.000.000,00	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	270.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.651.994.400,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.200.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.000.000,00	
PROGRAM IZIN USAHA INDUSTRI	150.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.980.290.390,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.000.000,00	
PRORAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	630.299.000,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	868.545.900,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.631.505.100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	250.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.634.704.474,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.519.015.610,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.920.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PARIWISATA		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	800.000.000,00	

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	550.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.200.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	450.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.623.071.129,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PILAU-PULAU KECIL	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.000.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	11.715.259.744	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	78.213.760,00	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.384.520.333,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.491.071.129,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.549.040.667,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAAN	7.430.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	720.000.000,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.000.000.000,00	
SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.403.528.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	400.000.000,00	

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	200.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	400.000.000,00	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	6.000.000.000,00	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.900.000.000,00	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.480.000.000,00	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	6.000.000.000,00	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.750.000.000,0	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.000.000.000,00	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.250.000.000,00	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	620.000.000,00 19.440.000.333,00	
SEKRETARIAT DPRPT		SEKRETARIAT DPRPT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87.888.316.663,00	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRPT	78.411.594.120,00	
PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	10.000.000.000,00	
PERENCANAAN		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.969.657.817,00	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.200.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.549.985.000,00	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.786.384.700,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.163.615.300,00	

KEUANGAN		BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	383.146.336.571,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	369.787.370.968,00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.200.444.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.763.550.100,00	
KEPEGAWAIAN		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.522.994.297,00	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.400.000.000,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.479.700.000,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
INSPEKTORAT DAERAH		INSPEKTORAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.153.236.681,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.882.343.397,00	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.255.000.000,00	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.913.935.491,00	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.500.000.000,00	5.340.256.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	500.000.000,00	2.477.764.800,00
PROGRAM PENINGKATANKEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.133.744.000,00	
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN		MAJELIS RAKYAT PAPUA
KEKHUSUSAN PAPUA		
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA TENGAH	45.915.603.766,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.288.334.119,00	

Sumber : SIPD RI Tahun 2027

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan yang dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan yang diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut; maka perangkat kerja pemerintah daerah harus mampu menerapkan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pembangunan dalam dinamika serta suasana kerja yang kondusif, sinergi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sejak dimulainya proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Prinsip *Good Governance* merupakan komitmen yang mutlak diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan profesionalisme, transparansi, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan variabel-variabel pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran serta program kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Variabel-variabel dimaksud, kemudian disebut dengan Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal; maka ditetapkan suatu variabel pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas pada setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman dari pada sasaran prioritas pembangunan pada masing-masing sektor pembangunan.

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari pada program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada awal tahun perencanaan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029. Berikut masing-masing indikator kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Tengah Tahun 2027

No.	Indikator	Target Tahun Ke 2027
1	2	3
1	PDRB Per Kapita (Rp.Juta)	514
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	22,66
3	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	0,39
4	Tingkat Kemiskinan (%)	26,50 -27,00
5	Rasio Gini (indeks)	0,380 – 0,383
6	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,8
7	Pertumbuhan Ekonomi	6,9
8	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Tinggi
9	Indeks Modal Manusia	0,435
10	a. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	63,15
11	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,88
12	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	69,4
13	Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) b. Pravelensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek) Pada balita (%)	 371 28,25
14	a Cakupan penemuan dan pengobatan kasus	85

	tuberkulosis *(treatment coverage)* (%)	
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)* (%)	85
	c. Eliminasi Malaria Per Kabupaten d. Jumlah Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk di daerah terinfeksi	65 3.200
15	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	99
	Hasil Pembelajaran :	
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat nasional untuk :	
	i) Literasi Membaca	12,50-12,50
	ii) Numerasi	0,00-12,50
	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
	i) Literasi Membaca	21,24-23,74
	ii) Numerasi	15,68-18,18
16	c. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,2
17	d. Harapan Lama Sekolah	9,81
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,64
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	78,78
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	31,21
21	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	17
22	a. Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	350
23	b. Jumlah Unit Layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Tingkat kab/kota/provinsi	5
24	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,52
25	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,85
26	Pengembangan Pariwisata	
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,225
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (orang)*	4,9
27	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,1
28	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	0,375
	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,75
	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,52
	d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,175
	e) *Return on Aset (ROA)* BUMD (%)	2,11
29	Penciptaan Lapangan Kerja yang baik	
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,65 – 3,12
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23

30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,45 – 65,00
31	Tingkat Penguasaan Iptek	25
32	Indeks Reformasi Hukum	70,7
33	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,24
34	Indeks Pelayanan Publik	1,13
35	Indeks Integritas Nasional	64,32
36	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4
37	Rasio Elektrifikasi RT (%)	47,80
38	Indeks Kepemimpinan Daerah	Tinggi
39	Persentase Penurunan Konflik SARA	43
40	Usulan Proksi :	
	- Persentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	72,8
	- Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65
41	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya (%)	75,5
42	Indeks Demokrasi Indonesia	60,00-63,25
43	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	49,54-49,61
44	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,18-81,22
45	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	54,07
46	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	82,17-82,32
47	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	19,4
48	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,64-25,48
49	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	48,82-49,14
50	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,51
51	Tingkat Inflasi (%)	3,6-5,3
52	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan: Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,45
	a. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,32
	b. Nilai Transaksi saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	1.111.897
	c. Total Kredit/PDRB (%)	13,35
	d. Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	2,81
53	Inklusi Keuangan (%)	87,79
54	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan: a. Proporsi Kontribusi PDRB wilayah Provinsi Terhadap Nasional	0,75
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	23,98
	c. Persentase Kampung mandiri	2,82
	d. Persentase Mantap Jalan	36
55	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,4
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,9
56	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,394
57	Kualitas Lingkungan Hidup: a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,65
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7,86
	c. Pengelolaan Sampah - Timbunan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,25
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	40
58	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan: a. Ketahanan Energi	
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	353

	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	87
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	31,2
	c. Ketahanan Air	
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	1,5
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	25
59	Indeks Risiko Bencana	191,94-185,88
60	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
	- Kumulatif	12,87
	- Tahunan	30,53

Sumber: RPJMD Papua Tengah Tahun 2025 – 2029

Tabel 7. 2 Target Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi	Proyeksi	Target RPJMD Tahun 2027
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,36	5,2	6,05	6,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	%	27,60	26,50 -27,00	26,50 -27,00	26,50-72,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,75	2,65 – 3,12	2,65 – 3,12	2,65-3,12
4	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah per kapita)	Rp/Juta	119,5	128,7	141,7	154
5	Indeks Modal Manusia (indeks)	Indeks	0,42	0,42	0,427	0,435
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Rasio	0,383	0,380-0,383	0,380-0,383	0,380-0,383
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	%	59,28	59,28	61,22	63,15
8	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks	82,56	82,56	82,72	82,88
9	Kontribusi PDRB PROVINSI (%)	%	0,8	0,8	0,8	0,8

Sumber: RPJMD Papua Tengah tahun 2025 – 2029

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman *Outcome* pada tingkat OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah. IKK merupakan sasaran kerja dan sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Kunci masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah 2027

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Target 2027
1	2	3	4
Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan		
1.1.	Hasil Pembelajaran :	Persen (%)	18,76
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat nasional untuk :		
	Literasi Membaca		
1.2.	Numerasi	Persen (%)	18,76
1.3.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca	Persen %)	9,36
	Numerasi	Tahun	55,52
1.4.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,2
1.5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,81
1.6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen (%)	9,4
2	Kesehatan		
2.1.	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tahun	69,4
2.2.	Kesehatan Ibu dan Anak		
.	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Persen (%)	13,52
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita (%)	Persen (%)	91,25
2.3	Penanganan Tuberkulosis	Persen (%)	84,00
2.4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)* (%)	Persen (%)	84,00
2.5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success* rate) (%)	Persen (%)	83
2.6	Eliminasi Malaria Per Kabupaten	Persen (%)	69
2.7	Jumlah lnfeksii Baru HIV per 1000 Penduduk di daerah terinfeksi	Jiwa	3170
2.8	cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	Persen (%)	99,5
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1.	Pekerjaan Umum:		
3.2	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	M3/detik	3
3.3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen (%)	3
3.4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Kilometer	182,89

3.5	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen (%)	9,90
3.6	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen (%)	55
3.7.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen (%)	31,15
3.8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen (%)	43,44
3.9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen (%)	6,25
3.1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen (%)	3,07
3.11	Rasio Jaringan Irigasi	Hektar (Ha)	374
3.12	Persentase penduduk berakses air minum	Persen (%)	84,53
3.13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perkampungan	Persen (%)	84,53
3.14	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen (%)	15,00
3.15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Angka	4
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
4.1.	Rasio rumah layak huni	≥ 80% rumah masuk kategori layak huni (RJPMN 2025-2030)	30
4.2.	Rasio permukiman layak huni	≥ 75% permukiman memenuhi standar kelayakan (Inmendagri No. 2/2025)	30
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1:1 (rasio kebutuhan vs ketersediaan) (RJPMN 2025-2030)	30
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	≥ 60% rumah terjangkau bagi MBR (Permendagri 86)	26
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	≥ 70%	25
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	pemukiman terencana (Inmendagri No.2/2025) ≤ 10% dari total pemukiman (RJPMN 2025-2030)	14
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	≤ 15 luasperkotaan (Permendagri 86)	28

4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	≤ 5% rumah tangga (Inmendagri No. 2/2025)	17
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	≥ 80% permukiman memiliki PSU lengkap (RJPMN 2025-2030)	41
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen (%)	40
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen (%)0	60
6	Sosial		
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen (%)	57
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen (%)	57
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen (%)	57
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen (%)	59
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen (%)	59
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	60
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen (%)	60
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen (%)	60
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen (%)	60
Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Tenaga Kerja		
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	sengketa	28
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	4
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen (%)	25
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	Persen (%)	35
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	24700
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen (%)	30
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen (%)	45
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen (%)	15

1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	50
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	150
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	150
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	16
1.13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persen (%)	61,12
1.14	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persen (%)	20
1.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen (%)	2,00
1.16	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Persen (%)	25
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen (%)	40
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRRPT/DPRK	Persen (%)	11
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen (%)	54
2.4.	Rasio KDRT	Persen (%)	3
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	Persen (%)	0
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen (%)	44
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen (%)	25
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen (%)	25
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen (%)	25
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen (%)	25
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen (%)	25
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen (%)	15
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen (%)	15
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen (%)	50
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen (%)	50
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen (%)	50
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Persen (%)	60

2.18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen (%)	58
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Persen (%)	10
3	Pangan		
3.1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Persen (%)	34,70
3.2	Rasio jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 (%)	Persen (%)	27,33
3.3	Skor Pola Pangan Harapan (%)	Persen (%)	76,76
3.4	Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	Persen (%)	27,27
3.5	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Persen (%)	47,88
4	Pertanahan		
4.1	Persentase tanah yang diadakan oleh provinsi untuk kepentingan umum	Persen (%)	14
4.2	Jumlah tanah yang diganti rugi	Ha	20
4.3	Persentase penataan tanah yang digunakan	Persen (%)	45
4.4	Persentase jumlah tanah ulayat yang ditetapkan	Persen (%)	25
5	Lingkungan Hidup		
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada
5.3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana	Persen (%)	23
5.4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada
5.6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Persen (%)	57.91
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen (%)	9
5.8.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persen (%)	3
5.9.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Persen (%)	1
5.10.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Persen (%)	6
5.11.	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	Persen (%)	35
5.12.	Persentase pengelolaan RTH	Persen (%)	11
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1.232.861
6.2.	Rasio bayi ber-akte kelahiran	Rasio	239.57
6.3.	Rasio pasangan ber-akte nikah	Rasio	102.116
6.4.	Ketersediaan *database* kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada/Tidak Ada	Ada
6.6.	Jumlah Kepemilikan kartu Keluarga	KK	458.794
6.7.	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	14.964
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		

7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kampung yang baik	Persen (%)	93
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	325
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	18
7.4.	Persentase LSM aktif	Persen (%)	36
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	Persen (%)	154
7.6.	Persentase PKK aktif	Persen (%)	2.315
7.7.	Persentase Posyandu aktif	Persen (%)	2.999
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	orang	347
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1.	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)*	Tahun	2.63
8.2.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun *(Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19)*	*Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19*	45/1000
8.3.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive (mCPR)*	Persen (%)	22.8
8.4.	Presentasi Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	Persen (%)	22.3
8.5.	Presentasi Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen (%)	93.3
9	Perhubungan		
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Penumpang/Tahun	1.850.000
9.2.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0837
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	144
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Unit	4 P, 13 B, 4 T
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	Persen (%)	30
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen (%)	45
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	Persen (%)	80,89
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,2700
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/barang	1.467.046/1,782.85
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/barang	1.467.046 / 1.784.318
10	Komunikasi dan Informatika		
10.1.	Persentase Tingkat Masyarakat terhadap Akses Kualitas lnformasi Publik Daerah (Survei)	Survei	70,5
10.2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,2

11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
11.1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Persen (%)	0,15
11.2	Persentase koperasi aktif	Persen (%)	6,9
11.3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen (%)	0,54
11.4	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen (%)	0,54
11.5	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	Persen (%)	60
11.6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Persen (%)	60
11.7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	Persen (%)	60
11.8	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Angka	3
11.9	Tingkat Inflasi	Persen	2,0
11.1	Pengendalian Harga Bahan Pokok / Penting	Persen (%)	60
11.11	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	Persen (%)	65
12	Penanaman Modal		
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	393
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		30,34
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	5.111
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Miliar	54
12.5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persen (%)	83
13	Kepemudaan dan Olah Raga		
13.1.	Partisipasi pemuda dalam pembangunan (Satuan, persen)	Persen (%)	45
13.2.	Jumlah Pelaku wirausaha muda (Satuan, Usaha)	Usaha	40
13.3.	Persentase organisasi pramuka yang dibina (Satuan, persen)	Persen (%)	45
13.4.	Prestasi olahraga (Satuan, Medali)	Medali	35
13.5.	Jumlah Atlet Berprestasi (Satuan, Atlet)	Atlet	150
13.6.	Cakupan pelatih yang bersertifikat (Satuan, Persen)	Persen (%)	25,03
14	Statistik		
14.1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,2
15	Persandian		
15.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait keamanan	Indeks	2,2
16	Kebudayaan		
16.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	50,55
17	Perpustakaan		
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	1.861
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	5
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	1/182.444
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	jiwa	12
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	1
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	1

18	Kearsipan		
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen (%)	5
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	3
Layanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata		
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	10.404
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	5 Hari / 4 Malam
1.3.	PAD sektor pariwisata	Usaha	25
2	Pertanian		
2.1.	Meningkatnya Produksi Pertanian Produksi Padi	Ton	3.037,50
2.2.	Produksi Jagung	Ton	7.087,50
2.3.	Produksi Bawang Merah	Ton	7.087,50
2.4.	Produksi Cabai	Ton	1,22
2.5.	Produksi Kelapa	Ton	60,75
2.6.	Produksi Kakao	Ton	5.062,50
2.7	Produksi Kopi	Ton	20,25
2.8	Produksi Ubi Jalar	Ton	
2.9	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	2.537,50
2.1	Produksi Hasil Ternak Besar/Kecil/Unggas	Ton	30,38
2.11	Produksi Telur	Ton	10,13
2.12	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	Persen (%)	0,19
2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	Persen (%)	3,1
2.14	Laju Pertumbuhan PDRB Perkebunan (%)	Persen (%)	6,13
2.15	Laju Pertumbuhan PDRB Peternakan		6,23
2.16	Nilai Tukar Petani (NTP) (%)	Persen (%)	104,67
3	Kehutanan		
3.1.	Jumlah dokumen inventarisasi hutan tingkat provinsi	dokumen	4
3.2.	Jumlah permohonan PBPHH bukan kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	permohonan	1
3.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen (%)	20
3.4	Jumlah kelompok tani hutan yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan serta persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial	Kelompok	20
3.5	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	penyuluh	10
3.6	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan serta persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	dokumen	15
3.7	Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan	orang	6

4	Energi dan Sumber Daya Mineral		
4.1.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	kWh	450
4.2.	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*		86
4.3.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) - Kumulatif	Persen (%)	24,7
4.4	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) - Tahunan	Persen (%)	42
5	Perdagangan		
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	komoditas	1
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	30
5.3	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	2
6	Perindustrian		
6.1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen (%)	13
6.2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen (%)	13
6.3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	Persen (%)	60
7	Transmigrasi		
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	Persen (%)	40
8	Kelautan dan Perikanan		
8.1.	Produksi perikanan tangkap	ton	166
8.2.	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	12,28
8.3.	Konsumsi ikan	(kg/Kap/th)	10,44
8.4.	Kawasan Konservasi daerah yang Operasional (Ha)	Ha	624.106,47
8.5.	Kepatuhan Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	Persen (%)	16,16
8.6.	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	kali	1,00
8.1	Produksi garam	Ton	10,54
8.11	Laju Pertumbuhan PDRB Perikanan (%)	Persen (%)	4,44
8.12	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	Persen (%)	105,11
8.13	2 Nilai Tukar Pembudidayaan Perikanan (NTPi (%)	Persen (%)	102,03
Penunjang Urusan Pemerintahan			
1	Perencanaan Pembangunan		
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/TidakAda	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perdasi/Pergub	Ada/TidakAda	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Pergub	Ada/TidakAda	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen (%)	96
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD	Persen (%)	96
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Tidak Sesuai	Sesuai
2	Keuangan		
2.1.	Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Belanja pegawai di Luar	Persen (%)	10,09%

	Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen (%)	60,70%
	Persentase Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen (%)	35,00%
	Persentase Penurunan SILPA	Persen (%)	49,69%
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen (%)	75%
	Opini atas LKPD	Persen (%)	10,09%
2.2	Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen (%)	42,68%
2.5.	Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen (%)	20%
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pendapatan	Persen (%)	50%
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen (%)	50%
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3.1.	Penilaian Indeks Sistem Merit	Nilai	250
3.2.	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen (%)	80
3.3.	Persentase Disparitas Data/Informasi ASN	Persen (%)	20
3.4.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80
3.5.	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Persen (%)	100
3.6.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	hari	20
3.7	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen (%)	35
3.8	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen (%)	35
3.9	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	38
3.1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	600
3.11	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	30
4	Penelitian dan pengembangan		
4.1.	Persentase implementasi rencana ke-Litbang-an.	Persen (%)	12
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil ke-Litbang-an.	Persen (%)	12
	Penerapan SIDa:		
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen (%)	13
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen (%)	13
5	Sekretariat Daerah		
5.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	A
5.2	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	A
5.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,26
5.4	Tingkat Pemahaman OPD terhadap Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi	Persen (%)	75

5.5	Tingkat Pemahaman OPD terhadap Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen (%)	75
5.6	Tingkat Kerja sama Daerah	Persen (%)	75
5.7	Tingkat Penyelesaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen (%)	100
5.8	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Fasilitasi Kepala Daerah Tingkat Provinsi	Persen (%)	90
5.9	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pengembangan Otonomi Khusus dan Penataan Urusan	Persen (%)	80
5.1	Tingkat pemahaman penerima manfaat otonomi khusus	Persen (%)	80
5.11	Tingkat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Urusan Bina Spiritual	%	100
5.12	Tingkat Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM/ Aneka Usaha)	Jumlah	200
5.13	Tingkat Pengelolaan Dokumen Administrasi Pembangunan	%	90
5.14	Tingkat Efektivitas PBJ Pemerintah	%	100
5.15	Tingkat Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	%	3,20%
5.16	Persentase OPD dalam mengumumkan RUP	%	100
5.17	Persentase OPD dalam mengumumkan RUP	%	65
5.18	Persentase pemenuhan formasi Jabatan Fungsional PBJ	%	80
5.19	Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ berdasarkan penilaian LKPP	Indeks	8
5.2	Persentase penyelesaian permasalahan PBJ yang ditangani melalui advokasi	%	92
5.21	Tingkat Penyelesaian Permohonan Bantuan Hukum	%	90
5.22	Tingkat Penyusunan Peraturan Gubernur	%	90
5.23	jumlah Produk Hukum Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus	%	90
5.24	tingkat ketersediaan produk hukum di JDIH	%	100
5.25	Tingkat Penyelesaian Fasilitasi Produk Hukum delapan Kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah	%	100
5.26	Rasio pembinaan dan pengawasan produk hukum di delapan kabupaten di Papua Tengah	%	100
6	Pengawasan		
6.1.	Persentase tindak lanjut temuan	Persen (%)	70
6.2.	Persentase pelanggaran pegawai	Persen (%)	0,1

6.3.	Jumlah temuan BPK	Temuan	20
7	Sekretariat Dewan		
7.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRPT Provinsi/Kab/Kota	Persen (%)	65
7.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRPT untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen (%)	83
7.3.	Terintegrasi program-program DPRPT untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRPT	Persen (%)	83
7.4	Jumlah Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen (%)	8
7.5	Jumlah laporan tindaklanjut hasil audit	Persen (%)	1
8	Majelis Rakyat Papua		
8.1	Terlaksananya Pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh MRP-PPT bersama-sama dengan Gubernur	Jumlah	3
8.2	Jumlah Penyelesaian Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah	4
8.3	Jumlah Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama, Pemberdayaan Perempuan serta Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah	8
8.4	Jumlah Sosialisasi Dalam Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945	Jumlah	2

BAB VIII
PENUTUP

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2027 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2027. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2027, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2027, RKPD Tahun 2027 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Papua Tengah sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2027;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
5. Secara proaktif, BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2027 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2027, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2027, sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;
7. RKPD Tahun 2027 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 ini dengan sebaik- baiknya.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002